



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 – 2017**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2013**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a Bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai visi dan misi Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengeluaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun setiap tahun sekali.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKPD pada setiap tahunnya.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan;
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

SKPD melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD, dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2013-2017.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati bersama DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Guna menghindari terjadinya kekosongan perencanaan pada tahun 2018, RPJMD Tahun 2013-2017 ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman untuk menyusun RKPD Tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2018-2022 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode tahun 2018-2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA


H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 1 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,


H. SUYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 - 2017

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Dokumen RPJMD Tahun 2013-2017 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 sebelum RPJMD Tahun 2018-2022 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1.

SAMBUTAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi ALLAH yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu serta substansi yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan penyusunannya. Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 merupakan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di daerah kita dalam kurun waktu tahun 2013-2017 nanti. Dalam dokumen RPJMD ini juga terkandung berbagai gagasan dan konsep serta visi dan misi kepala daerah terpilih yang disampaikan pada proses pemilihan kepala daerah yang lalu dan merupakan pendekatan politis sebagai janji kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perlu kita sadari bersama bahwa pembangunan daerah yang kita laksanakan tentunya tidak terlepas dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan daerah sangat penting artinya terhadap keberhasilan pembangunan nasional dan karena itu sinergi daerah dan pusat sangat penting demi tercapainya tujuan, target dan sasaran pembangunan nasional di segala bidang. Apa yang menjadi tujuan, target dan sasaran pembangunan nasional tentu juga menjadi tujuan kita bersama dalam konteks perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam menyusun dokumen RPJMD ini telah dilakukan berbagai pendekatan sebagaimana aturan perundang-undangan yakni dengan pendekatan politis, teknokratis, *top down* dan *bottom up*, serta pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti unsur pemerintahan, lembaga legislatif, komponen masyarakat, LSM dan berbagai pihak lainnya.

Pada kesempatan ini pula saya selaku kepala daerah ingin mengingatkan kita semua bahwa dokumen ini nantinya benar-benar menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di daerah, dalam memberikan layanan dan pemberdayaan masyarakat di Hulu Sungai Utara yang kita cintai ini. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya, semoga ALLAH senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita semua dan meridhoi upaya-upaya yang kita lakukan sehingga ke depan dapat membawa masyarakat dan daerah kita pada kondisi yang jauh lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bupati Hulu Sungai Utara,

Drs. H. ABDUL WAHID HK., MM., M.Si.

BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus dibuat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni rencana pembangunan yang menjadi program kerja pemerintahan di daerah selama lima tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau biasa disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 khususnya tahapan ketiga RPJPD, serta dengan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Pada proses penyusunannya digunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan secara politis, pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan secara politis dipahami bahwa pemilihan kepala daerah adalah salah satu bagian dari penyusunan rencana karena rakyat memilih dan menentukan pilihannya didasarkan atas program-program terbaik yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran terhadap agenda-agenda pembangunan yang disampaikan oleh kepala daerah saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan rencana secara teknokratik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga, satuan kerja atau seseorang yang secara fungsional bertugas untuk itu. Untuk melakukan pendekatan secara teknokratis maka dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahun daerah ini dilibatkan tenaga ahli/profesional dari perguruan tinggi. Pendekatan perencanaan secara partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan yang mana dalam hal ini terdapat adanya pelibatan unsur masyarakat pada tahapan-tahapan penyusunan rencana. Pelibatan unsur masyarakat ini dilakukan untuk memperoleh aspirasi masyarakat luas disamping agar masyarakat juga merasa ikut memiliki dan menyadari untuk terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah. Pendekatan perencanaan bawah-atas dan atas-bawah dilaksanakan atas dasar jenjang pemerintahan. Perencanaan bawah-atas dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat umum secara berjenjang ditingkatkan desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten, sedangkan atas-bawah yakni dengan mengacu dan memperhatikan serta mempedomani kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam prosesnya penyusunan RPJMD didasarkan atas berbagai kondisi dan permasalahan serta potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika dan perkembangannya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi 1) Persiapan penyusunan RPJMD, dengan melakukan pengumpulan dan penelaahan/analisa data; 2) Penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) Penyusunan Rancangan RPJMD; 4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD; 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan 6) Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah.

Keberadaan dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya selama lima tahun. Dokumen RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut :

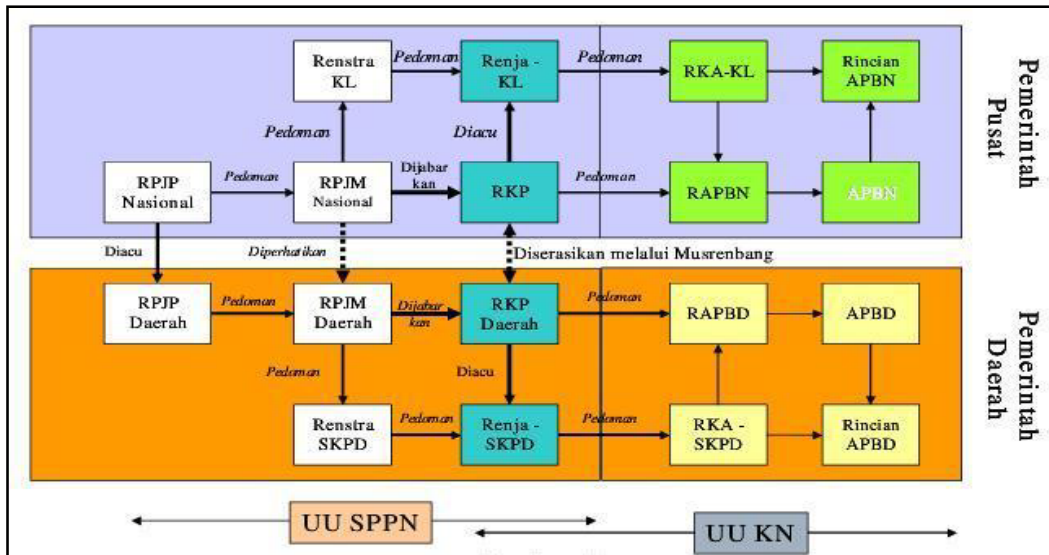
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara 48, TLN 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032;

2.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025, dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. Pola hubungan yang tidak terpisahkan ini seperti terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini juga memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 dan Dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Selatan. Perencanaan ruang yang telah dipersiapkan dalam dokumen RTRW, baik itu pola ruang maupun struktur ruang harus sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan disusun.

Tabel 1.1
Hubungan Keterkaitan antar RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2013-2017 dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

RTRW		
Kabupaten HSU	Provinsi Kalsel	RTRW Nasional
Keterkaitan RPJMD dengan RTRWK adalah dimulai dari penentuan isu-isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, sampai kepada indikasi program	Indikasi program yang ada dalam RTRWP (2012-2014) sudah selaras dengan indikasi program di RTRWK. Indikasi program yang ada di RTRWP mengutamakan peningkatan infrastruktur dan upaya-upaya mewujudkan Kota Amuntai sebagai PKW dan merupakan program yang selaras dengan kebijakan umum dan program 5 tahunan di RPJMD	Penetapan Sistem Perkotaan Nasional, yaitu PKW Kota Amuntai merupakan acuan dalam penetapan sistem perkotaan di RTRWP dan RTRWK dan menjadi dasar dalam pengembangan wilayah perkotaan Amuntai selama 5 tahun pada RPJMD
Strategi dan arah kebijakan pada RTRWK adalah selama 20 tahun yang kemudian diacu dan dipedomi oleh strategi dan arah kebijakan RPJMD selama 5 tahun.		

RTRW		
Kabupaten HSU	Provinsi Kalsel	RTRW Nasional
Indikasi program yang ada dalam RTRWK di PJM I (2013-2017) sebagian besar dijabarkan oleh program-program di RPJMD yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006		

Selanjutnya untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategik perlu dijabarkan kedalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap tahunnya.

2.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini memuat tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah;
- Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan;
- Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini memuat tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah;
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini menyajikan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2013-2017;
- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran;
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan daerah atas dasar misi-misi yang telah ditentukan;
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD;

- Bab IX Penyajian Kerangka Indikator Kinerja Daerah. Bab ini menetapkan berbagai indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode jabatan;
- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini memuat tentang pedoman dalam penyusunan RKPD masa transisi yang merupakan tahun pertama RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Selain itu juga memuat tentang Kaidah Pelaksanaan dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD yang harus berpedoman pada RPJMD serta Renja SKPD yang harus berpedoman pada Renstra SKPD.

2.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi daerah tahun 2013-2017.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 adalah :

1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan serta pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun perencanaan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.
2. Merumuskan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan perencanaan penganggaran.
5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan baik Pemerintah Daerah maupun SKPD.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 219 desa/kelurahan. Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 224,49 km² atau 25,15% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km² atau 3,28% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada table 2.1 berikut.

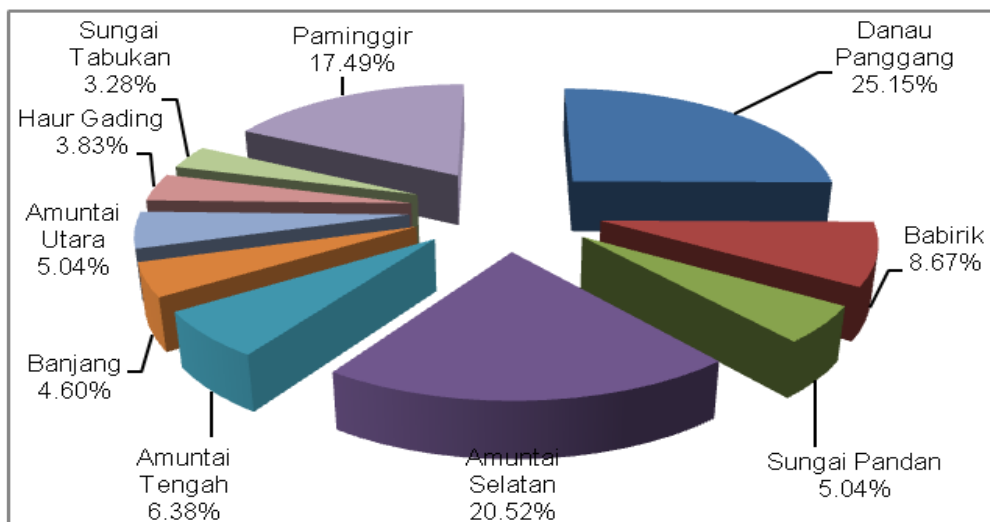
Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	224,49	25,15	-	16
2.	Babirik	77,44	8,67	-	23
3.	Sungai Pandan	45,00	5,04	-	33
4.	Amuntai Selatan	183,16	20,52	-	30
5.	Amuntai Tengah	56,99	6,38	5	24
6.	Banjang	41,10	4,60	-	20
7.	Amuntai Utara	45,00	5,04	-	26
8.	Haur Gading	34,15	3,83	-	18
9.	Sungai Tabukan	29,24	3,28	-	17
10	Paminggir	156,13	17,49	-	7
	Jumlah	892,70	100,00	5	214

Sumber : BPS Hulu Sungai Utara, 2012

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 25,15%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 3,26%. Secara lengkap proporsi masing-masing kecamatan terhadap luasan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1.
 Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : BPS Hulu Sungai Utara, 2012

b. Letak dan Kondisi Geografis

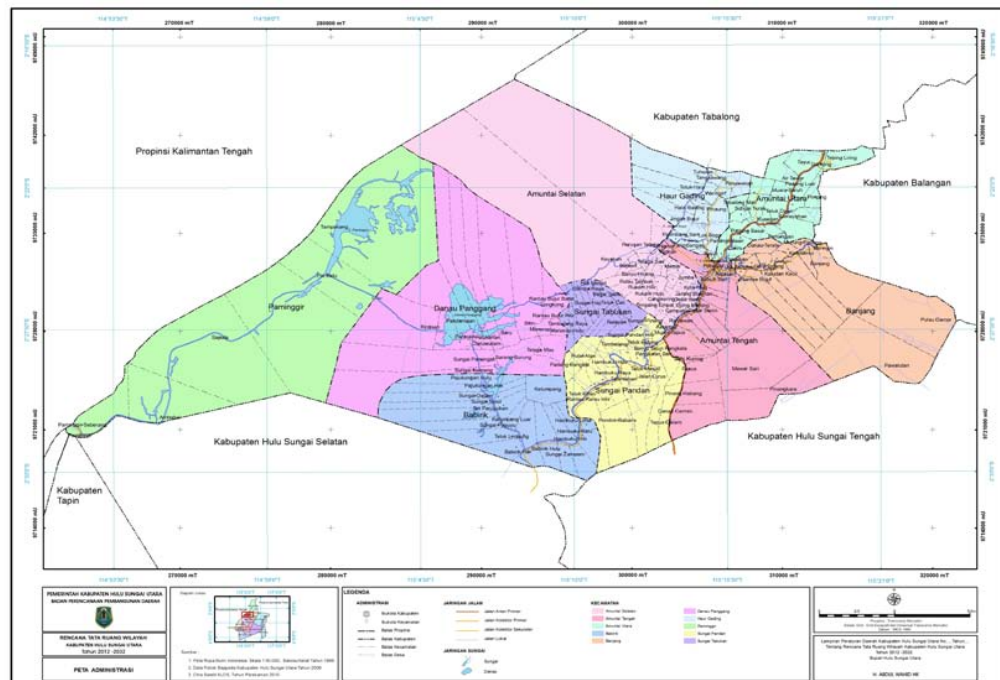
Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°13'7" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km² atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada gambar 2.2 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032.

Gambar 2.2.
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

c. Tofografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0-2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut (*dome*) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini

mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePPProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa *levee* dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjarang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

d. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjarang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah :

- 1) Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit $\pm 350 \text{ m}^3/\text{detik}$ merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit $\pm 250 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $\pm 300 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- 2) Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (T_c) debit limpasan air hujan menuju titik *outlet* DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
- 3) Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi sungai merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada $115^{\circ} 17' \text{ BT}$ dan $02^{\circ} 17' \text{ LS}$ sampai $115^{\circ} 26' \text{ LS}$ dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar $11,43 \text{ km}^2$ dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar $57,02 \text{ km}^2$. Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa $0,2-0,5 \text{ m}$ dan Danau Panggang antara $0,5 \text{ m}-1,5 \text{ m}$.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga-Danau Panggang-Negara maupun Danau Panggang-Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di empat kecamatan daerah

pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Tabel 2.2.
Jumlah Curah Hujan (mm) Tahun 2007-2011

Bulan	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	358	349	174	346,3	247,9
Februari	239	197	279	355,3	384,5
Maret	265	249	159	412,8	359,2
April	308	108	133	273,2	266,4
Mei	174	104	104	202,0	203,3
Juni	184	125	14	191,8	64,8
Juli	71	81	7	124,2	31,4
Agustus	30	68	63	153,4	18,9
September	34	104	35	129,9	98,4
Oktober	129	173	105	-	188,3
November	341	271	196	-	168,4
Desember	222	267	296	-	326,8
Rata - rata	196	175	130	243,2	196,5

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka, Tahun 2008-2012

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.

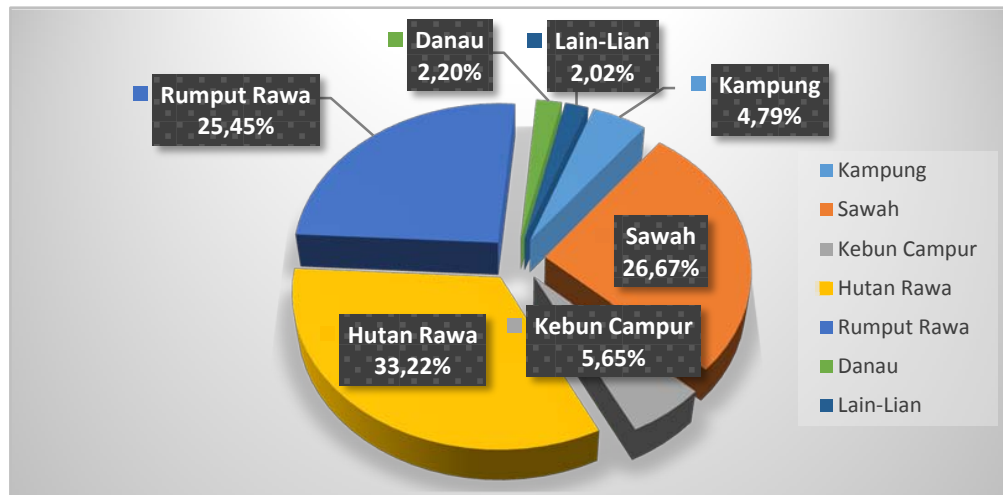
Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam tiap bulan. Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi selama bulan Desember dengan curah hujan tertinggi mencapai 296 mm, sementara pada bulan Juni sampai September paling sedikit mendapat curah hujan. Jumlah curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada Tabel. 2.2.

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa hutan rawa dengan vegetasi utama galam (*Malaeuca cajaputy*) disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah gambar penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun didominasi oleh hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha.

Gambar 2.3.
Penggunaan Lahan 2011



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2012

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara, dan Paminggir. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan Mesjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami' Besar di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha,

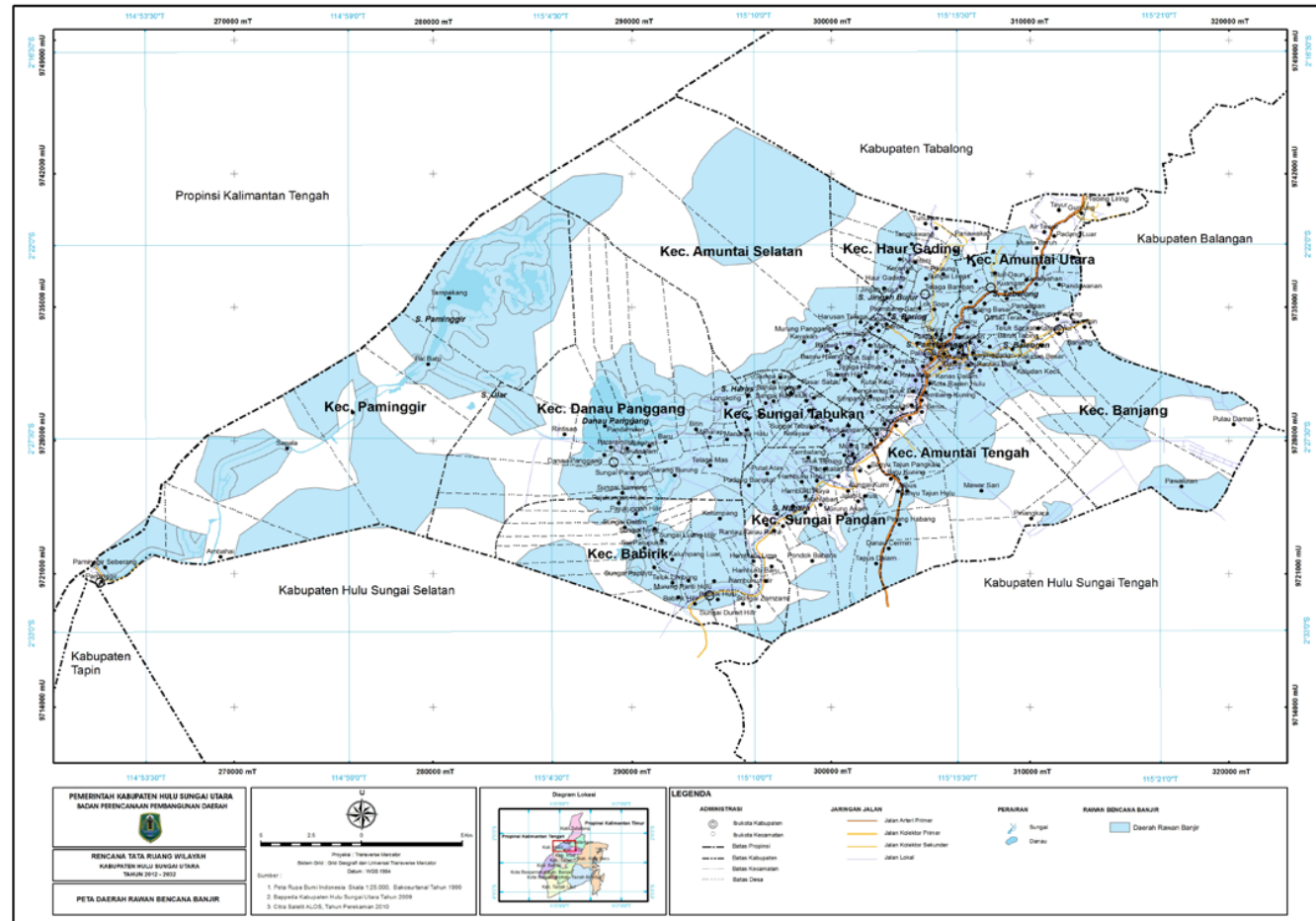
Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjarang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat. Secara rinci kawasan budidaya akan diuraikan pada potensi pengembangan wilayah (Sub Bab 2.1.2).

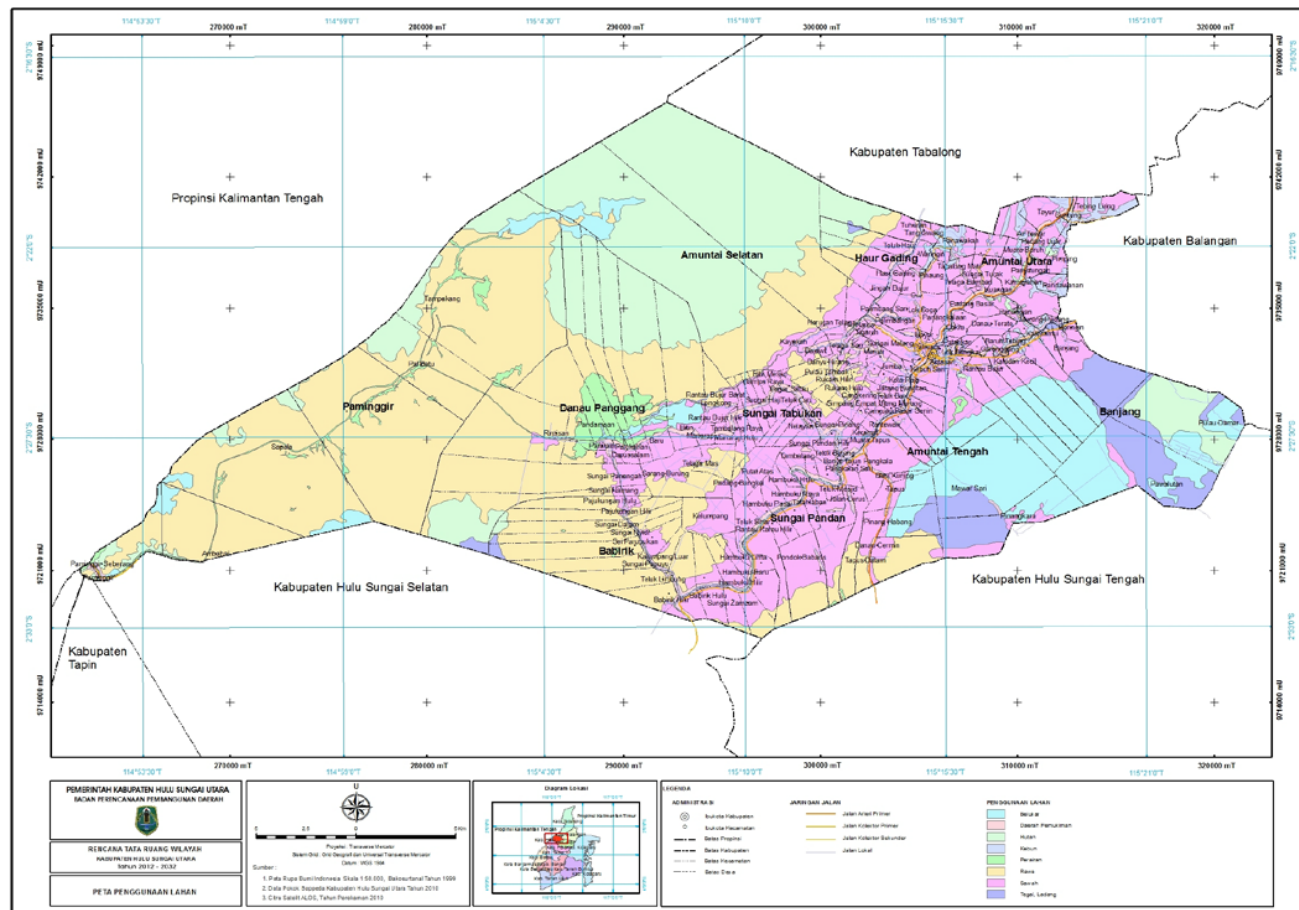
Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

Gambar 2.4.
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara



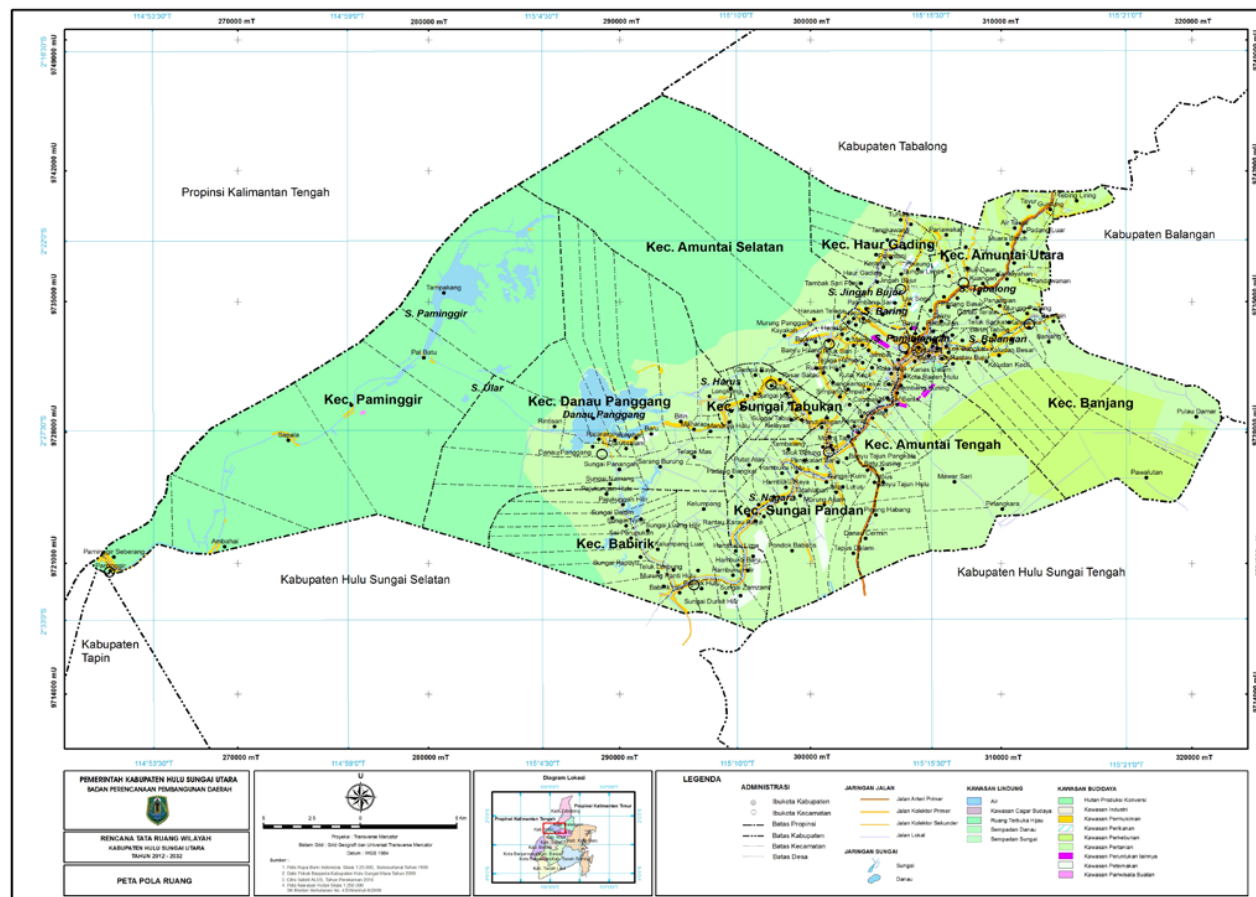
Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.5.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.6.
Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun terus-menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan produksi yang dapat di konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh sebab itu, kawasan ini dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan melihat peluang berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan Amuntai Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 5.298 ha, Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan Sungai Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan Kecamatan Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 ha terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 ha dan Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 553 ha.

Perluasan areal tanam tanaman pangan dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi lahan (mencetak sawah baru) dan peningkatan intensitas tanam. Sedangkan optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak. Lokasinya tersebar di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjarmang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunan rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjarmang dan kecamatan Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutung, yang dinilai sesuai untuk dikembangkan di lahan rawa.

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjarmang dan pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pemurnian ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan; pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan pengembangan kawasan peternakan Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kabupaten, namun sentra untuk peternakan Itik Alabio terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan, Babirik dan Danau Panggang.

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus (*Channa striata*), toman (*Channa micropeltes*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*) dan betok (*Anabas testudineus*).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana pengembangan daerah *reservaat* perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha.

Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi pengembangan untuk kawasan

perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dan tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai-sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian provinsi berupa sentra industri Amuntai yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang di alokasikan seluas kurang lebih 33 ha. Kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan di Desa Banyu Hirang (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai seluas kurang lebih 8 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, dan kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 ha.

Untuk pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi peninggalan sejarah yang layak untuk dikembangkan, disamping kemungkinan pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya. Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan obyek-obyek wisata yang ada serta pemanfaatan rawa sebagai potensi obyek pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata pada RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan seluas kurang lebih 10 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya (kawasan Candi Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan pariwisata yang direncanakan adalah (a) pengembangan kawasan peruntukan pariwisata provinsi berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang; (b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 ha; dan (c) wisata belanja kerajinan rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu perlu pengembangan jalur wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

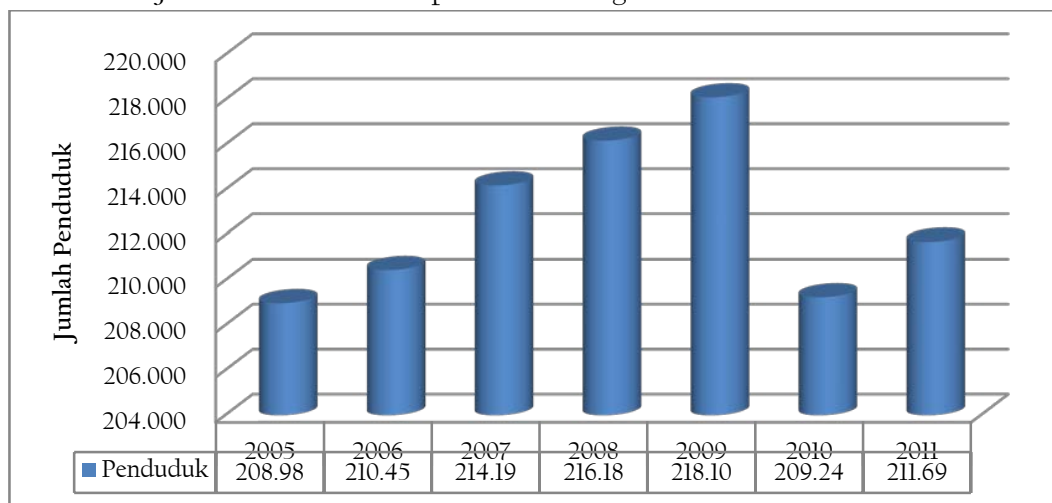
Kabupaten Hulu Sungai Utara dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong di sebelah utara serta dua sungai lainnya yaitu Sungai Pamintangan dan Sungai Negara. Dengan adanya sungai besar yang mengelilingi dan elevasi kawasan yang tidak terlalu tinggi (sebagian besar kelerengannya 0-2%), maka wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar berpotensi banjir.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

2.1.4. Kondisi Demografi

Dengan luas wilayah 892,7 km² atau hanya 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari BPS kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011, Kabupaten Hulu Sungai Utara dihuni oleh 211.699 jiwa yang tersebar pada 10 kecamatan, 219 desa/kelurahan dan terdiri dari 54.430 rumah tangga.

Gambar 2.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2011



Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2005-2011

Dari sisi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara relatif kecil yang masih dibawah 1% per tahun. Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 sebesar 237 jiwa/km², dimana kecamatan terpadat adalah Kecamatan Amuntai Tengah (855 jiwa/km²) disusul Kecamatan Sungai Pandan (582 jiwa/km²). Sedangkan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Paminggir (48 jiwa/km²) dan Danau Panggang (88 jiwa/km²). Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

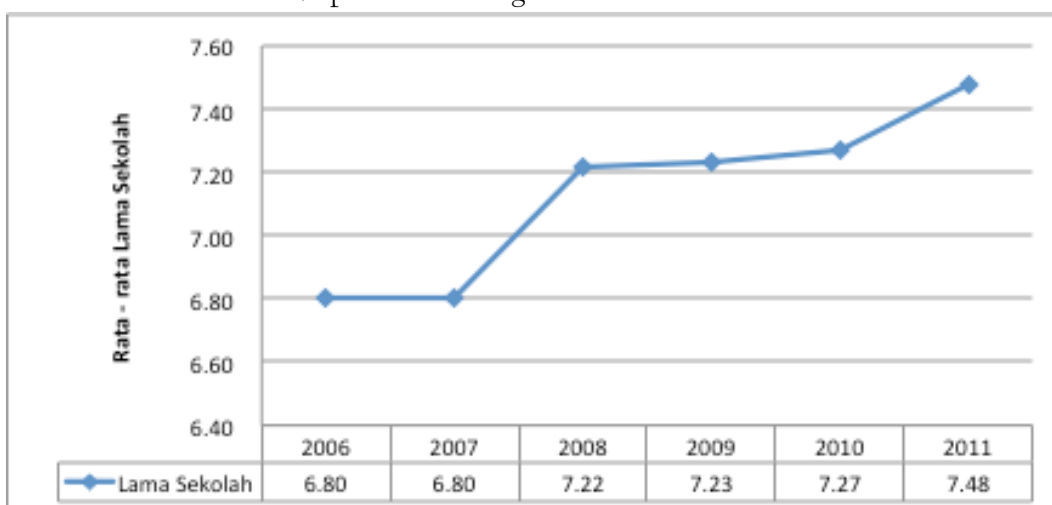
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	LUAS (KM2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN RATA-RATA
1	Danau Panggang	16	224.49	19.704	87,77
2	B a b i r i k	23	77.44	18.108	233,83
3	Sungai Pandan	33	45.00	26.208	582,40
4	Amuntai Selatan	30	183.16	26.822	146,44
5	Amuntai Tengah	29	56.99	48.713	854,61
6	B a n j a n g	20	41.01	16.329	398,27
7	Amuntai Utara	26	45.00	20.136	446,57
8	Haur Gading	18	34.15	14.306	418,92
9	Sungai Tabukan	17	29.24	13.875	474,52
10	Paminggir	7	156.13	7.498	48,02
Jumlah		219	892.61	211.699	237,14

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2012

Profil penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari komposisi penduduknya, yakni berdasarkan jenis kelamin, usia, lapangan usaha dan pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan dalam 5 tahun terakhir lebih banyak daripada laki-laki. Sedang dari usianya, persentase penduduk dengan usia produktif (usia antara 15-64 tahun) yakni 137.477 jiwa atau sekitar 64,94% pada tahun 2011, dengan demikian terdapat rasio ketergantungan terdapat penduduk usia produktif sebesar 53,99% dari jumlah penduduk.

Menurut tingkat pendidikannya, Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk daerah dengan tingkat pendidikan rata-rata cukup baik. Ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dari penduduk Kabupaten Hulu Sungai yang mencapai 7,48 tahun untuk penduduk yang berusia 15 tahun keatas pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SLTP.

Gambar 2.8.
Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2011



Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2006-2011

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditinjau dari sisi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

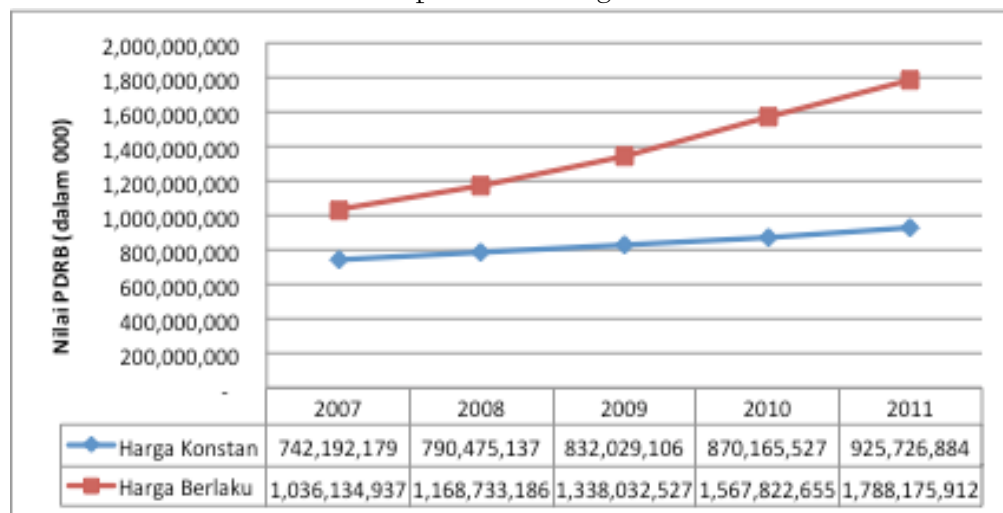
Gambaran umum ditinjau dari kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi didasarkan atas indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan gini ratio, dan laju inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

a. *Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mengalami kenaikan dari Rp 742,19 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 925,73 Milyar pada tahun 2011.

Gambar 2.9.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011



Sumber : Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2007-2011

Tabel 2.4
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan
 (dalam ribuan rupiah)

No	Sektor	2007		2008		2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	253.295.516	34,13	275.563.276	34,87	291.105.400	34,99	291.295.795	33,47	308.202.044	33,29
2	Pertambangan & penggalian	149,444	0,02	155,102	0,02	160,147	0,02	168,958	0,02	180.510	0,02
3	Industri pengolahan	78.011.900	10,51	80.055.090	10,13	82.348.719	9,90	85.422.940	9,82	88.028.123	9,51
4	Listrik, gas & air bersih	4.040.932	0,55	4.223.558	0,53	4.391.873	0,53	4.608.907	0,53	4.870.095	0,52
5	Konstruksi	45.302.292	6,10	48.081.208	6,08	52.066.018	6,26	55.828.667	6,42	59.627.224	6,44
6	Perdagangan, hotel & restoran	146.015.355	19,68	154.605.806	19,55	161.047.077	19,36	171.224.418	19,67	182.000.524	19,65
7	Pengangkutan & komunikasi	52.892.312	7,14	55.202.391	6,98	57.416.287	6,90	61.985.403	7,12	66.069.088	7,14
8	Keuangan, sewa, & jasa	29.015.165	3,91	31.143.824	3,93	33.159.209	3,99	35.080.129	4,04	36.643.671	3,96
9	Jasa-jasa	133.469.262	17,99	141.444.882	17,89	150.334.380	18,07	164.566.310	18,91	180.105.605	19,45
	PDRB	742.192.179	100	790.475.137	100	832.029.106	100	870.165.527	100	925.726.884	100

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2007-2011

Berdasarkan tabel 2.4 sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam penciptaan nilai dan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, trend kontribusinya mengalami kenaikan (Positif), kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu sebesar 34,47% (Tahun 2010) dan 33,29% (Tahun 2011). Sub sektor yang memberikan kontribusi pada sektor pertanian adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sub sektor yang memegang peranan penting dalam sektor pertanian adalah sub sektor tanaman bahan makanan. Kontribusi sub sektor tanaman bahan pangan dari tahun 2007-2009 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan karena pengaruh musim dan iklim serta kerentanannya terhadap pengaruh alam (banjir) sehingga banyak petani yang gagal panen.

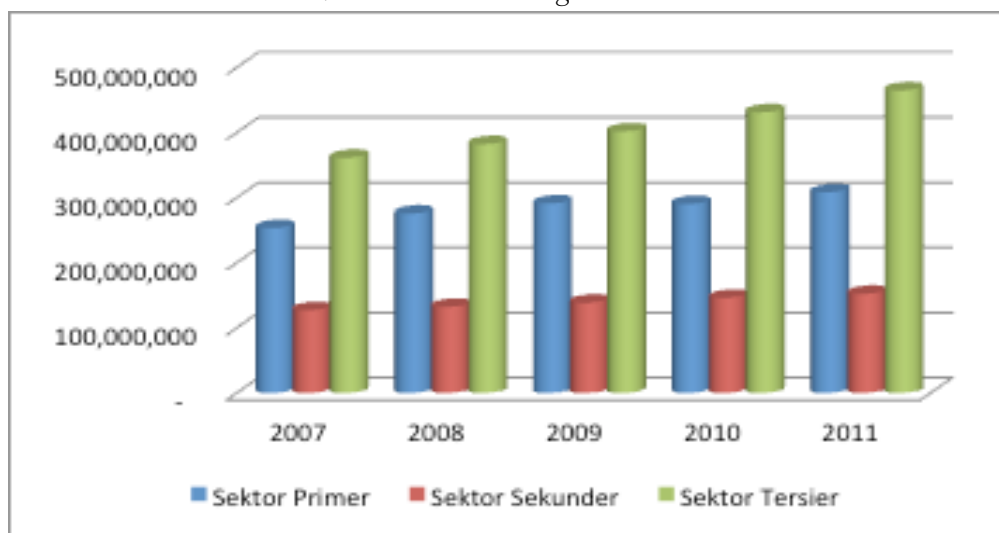
Selanjutnya pada sektor Industri Pengolahan (tanpa migas) kontribusinya mengalami trend yang menurun dari tahun 2007-2011. Hal ini disebabkan oleh semakin sulitnya pasokan bahan baku industri. Selain itu juga karena masih rendahnya investasi yang masuk akibat belum kondusifnya perekonomian daerah serta dukungan infrastruktur ekonomi.

Kalau dilihat trend kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kabupaten dari Tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada sektor jasa penggerak perekonomian di sektor ini adalah sub sektor jasa pemerintahan umum. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor ini tidak terlepas dari program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui peningkatan besaran APBD tiap tahunnya yang secara langsung maupun tidak langsung akan menstimulus kinerja perekonomian daerah.

Berdasarkan pengelompokan dalam struktur ekonomi (Gambar 2.10), potensi unggulan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kelompok sektor tersier yang meliputi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan subsektor jasa. Sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian daerah sebesar 48,69% atau sekitar 361 Milyar pada tahun 2007 dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar 50,21% atau 464,8 Milyar dengan peningkatan 103,8 Milyar. Fenomena dominannya sektor tersier dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang semakin mengarah pada kota perdagangan dan jasa.

Perkembangan tersebut merupakan kecenderungan yang lazim terjadi pada berbagai kota, namun bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diantisipasi berbagai hal berikut ini, yaitu *Pertama*, kesiapan infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengantisipasi perkembangan sektor ini, karena dampaknya cukup besar, seperti terhadap konsentrasi penduduk, kelancaran lalu lintas, sampah, dan masih banyak lagi. *Kedua* adalah seberapa besar peran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam sektor ini, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat kelompok tertentu dan masyarakat dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bila hal ini sampai terjadi, maka yang akan memperoleh manfaat dari kemajuan sektor tersier ini akan keluar dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Ketiga*, terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai kota perdagangan dan jasa di kemudian hari, seharusnya juga dapat mengangkat dan berdampak positif bagi sektor lainnya, dan bukan sebaliknya.

Gambar 2.10.
Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Sektor
Tahun 2007-2011 atas dasar harga konstan tahun 2000



Sumber : Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2007-2011

Adapun sektor primer (pertanian), selama kurun waktu 2007 hingga 2011 mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2007 sektor ini masih memberikan peran 34,15% atau 253,44 Milyar, maka di tahun 2011 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 33,31% atau 308,38 Milyar. Menurunnya peran sektor ini lebih disebabkan pada perubahan musim serta kondisi alam Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memang dataran rendah sehingga sering terjadi banjir, hal ini menyebabkan semakin susah untuk berusaha di bidang pertanian, peternakan dan juga perikanan, sehingga mendorong menurunnya produktifitas sektor ini dan beralihnya pekerjaan masyarakat pada sektor lainnya, khususnya perdagangan dan jasa. Namun demikian, secara kualitatif beberapa produk pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki keunggulan komparatif, yaitu padi dan ternak itik.

Sektor sekunder, khususnya dari sektor industri pengolahan masih belum cukup peranannya terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana proporsinya tidak mencapai 20%. Oleh karena itu peran sektor pengolahan ini perlu mendapat perhatian, terutama dikaitkan dengan semakin menurunnya peran sektor primer. Ini menunjukkan bahwa dominasi bahan baku industri berasal dari luar wilayah. Bila hal ini terjadi, maka ketergantungan pada daerah lain akan semakin meningkat, dan dari sisi biaya produksi, hal ini akan memicu kenaikan yang dapat berdampak pada daya saing hasil industri pengolahan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

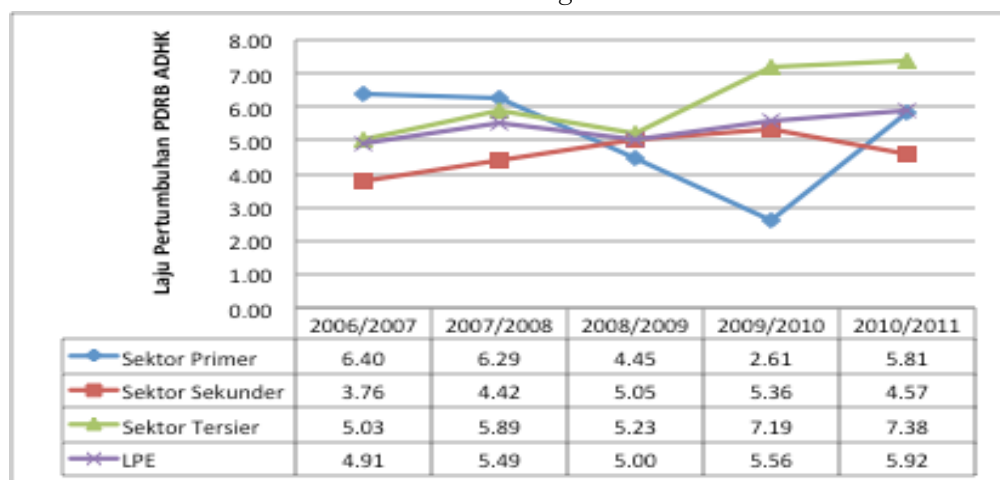
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum trendnya meningkat kecuali terjadi penurunan pada tahun 2008/2009. Pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2010

membalik seiring dengan membaiknya kondisi finansial global meskipun tetap perlu diantisipasi adanya kemungkinan krisis baru. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke depan membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih kuat lagi, sehingga pertumbuhan yang ada dapat stabil dan memiliki kecenderungan yang meningkat.

Berdasarkan kelompok sektor, kelompok sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan trend yang terus meningkat adalah sektor tersier (tumbuh sebesar 7,38%), sedangkan sektor sekunder trendnya juga meningkat, kecuali pada tahun 2011 terjadi penurunan. Adapun sektor primer terlihat menurun dari tahun 2007 hingga 2010, namun kembali meningkat pada tahun 2011 dengan lonjakan yang cukup besar. Hal ini disebabkan kembali meningkatnya produksi sektor pertanian sebagai implikasi kondisi alam yang kondusif untuk budidaya pertanian. Tingginya pertumbuhan sektor tersier disebabkan oleh pertumbuhan yang tinggi pada subsektor jasa-jasa, sedangkan pada sektor sekunder, pertumbuhan tertinggi ditemukan pada subsektor konstruksi.

Gambar 2.11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2007-2010 atas dasar harga konstan tahun 2000



Sumber : PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara 2010

c. PDRB per kapita daerah dan Gini Ratio

PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator makro tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka semakin tinggi kemampuan dan kesejahteraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) secara time series dapat dilihat pada tabel 2.5.

PDRB ADHB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2009 adalah 6.425.003 rupiah, meningkat 13,87% dibandingkan dengan tahun 2008. Besaran PDRB perkapita ini meningkat lagi pada tahun 2010, yaitu sebesar 7.492.342 rupiah. Pada tahun 2011, PDRB perkapita kabupaten ini meningkat lagi menjadi 8.387.322 rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 111,95% dibandingkan dengan tahun 2010.

Tabel. 2.5.

PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Rupiah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Rupiah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	5.642.238	12,72	3.816.140	5,92
2009	6.425.003	13,87	3.995.261	4,69
2010	7.492.342	16,61	4.158.577	4,09
2011 *)	8.387.322	11,95	4.342.079	4,41

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

*) Angka sementara

PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat 4,41 persen pada tahun 2011. Kenaikan PDRB ADHK perkapita yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan jumlah penduduk pertengahan tahun (sekitar 1,17 persen) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduknya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat.

PDRB per kapita berbeda dengan Pendapatan per kapita yang sampai saat ini belum dapat disediakan datanya oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data nasional menunjukkan bahwa pendapatan perkapita rata-rata masyarakat Indonesia sebesar US\$ 2.883 (dengan kurs 1 dollar US sama dengan 9 ribu rupiah, maka pendapatan per kapita rata-rata masyarakat Indonesia mencapai kira-kira Rp. 26 juta).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah distribusi pendapatan, karena pendapatan perkapita lebih menggambarkan rata-rata pendapatan per orang, dan kurang menggambarkan distribusinya. Dengan kata lain, dapat saja nilai tersebut diperoleh dari sekelompok masyarakat dengan penghasilan sangat tinggi dan sekelompok besar lainnya dengan penghasilan yang sangat rendah. Untuk mengukur hal ini digunakan indeks gini rasio yang sering digunakan untuk menilai kesenjangan distribusi pendapatan. Berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2010), angka Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 0,25. Angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,3).

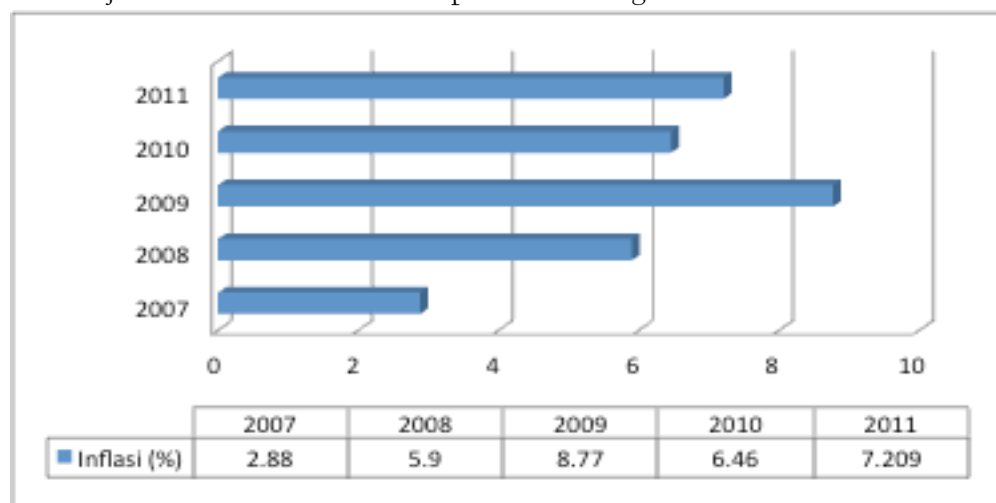
d. *Inflasi*

Indikator inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di level konsumen, penghitungan inflasi didasarkan pada suatu indeks yang disebut Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan paket komoditi yang berjumlah sekitar 300 macam komoditi. Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua harga selama periode tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi tumbuhnya produksi masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya kegiatan perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun demikian, perlu juga diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi,

akan mendorong kegiatan perekonomian menjadi tidak terkendali, sehingga besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu dikendalikan.

Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang mengalami kenaikan. Nilai inflasi rata-rata adalah ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah karena sebagian besar komoditas bahan makanan tidak diproduksi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor lainnya adalah karena adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Gambar 2.12.
Laju Pertumbuhan Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011



Sumber : PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara 2011

Berdasarkan Gambar 2.12, nilai inflasi terus meningkat dan berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata 6,24%. Tahun 2007 sebesar 2,88% dan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 8,77%, walaupun pada tahun 2010 terjadi penurunan nilai inflasi, akan tetapi nilainya masih tinggi sebesar 6,46%. Tahun 2011 nilai inflasi kembali meningkat, yaitu sebesar 7,21% diatas rata-rata inflasi lima tahun terakhir. Dengan melihat perbandingan nilai inflasi tersebut, tentunya ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara atau dengan kata lain mempengaruhi nilai konsumsi masyarakat.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pada Fokus Kesejahteraan Sosial ini diukur dan dianalisis sejumlah indikator yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja dan kriminalitas.

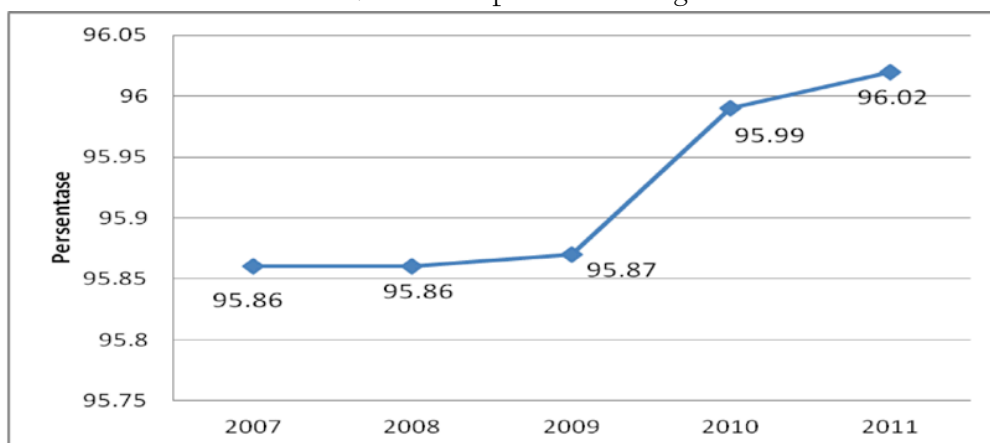
a. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan keberhasilan. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT).

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam Gambar 2.13.

Gambar 2.13.
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)
Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari gambar 2.13 diketahui bahwa dari tahun ke tahun perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kenaikan. Angka melek Huruf tahun 2007 sampai dengan 2011 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,17. Ini berarti bahwa kebijakan di bidang pendidikan yang terkait dengan Angka Melek Huruf perlu peningkatan guna mempercepat proporsi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas agar bisa membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

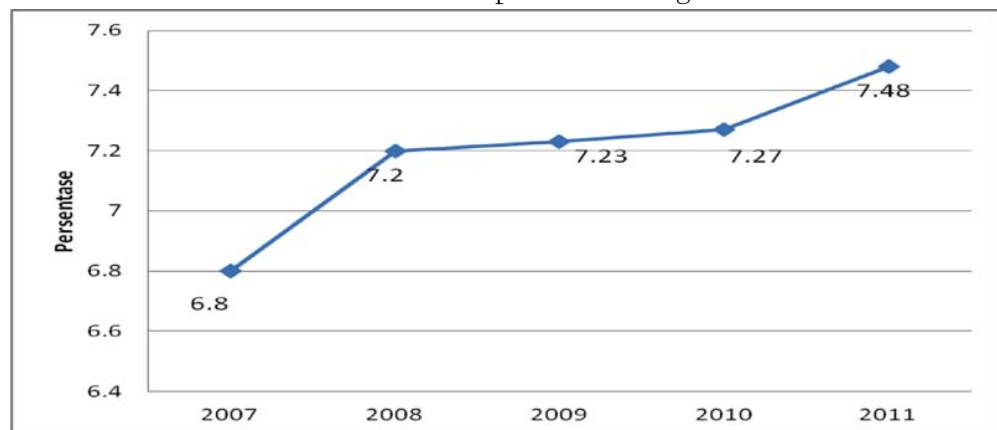
Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2007-2011 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariasi. Mulai tahun 2007 sampai dengan 2008 angka kenaikannya cukup menggembirakan, yaitu sebesar 0,4 persen, tetapi periode tahun 2008 sampai dengan 2010 angka kenaikannya hanya pada kisaran 0,03-0,04. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 kenaikannya cukup tinggi yaitu berada pada angka 0,21. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah provinsi. Hal ini disebabkan Angka Melek Huruf maupun rata-rata pendidikan formal penduduk usia 15 tahun keatas masih rendah.

Gambar 2.14.

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

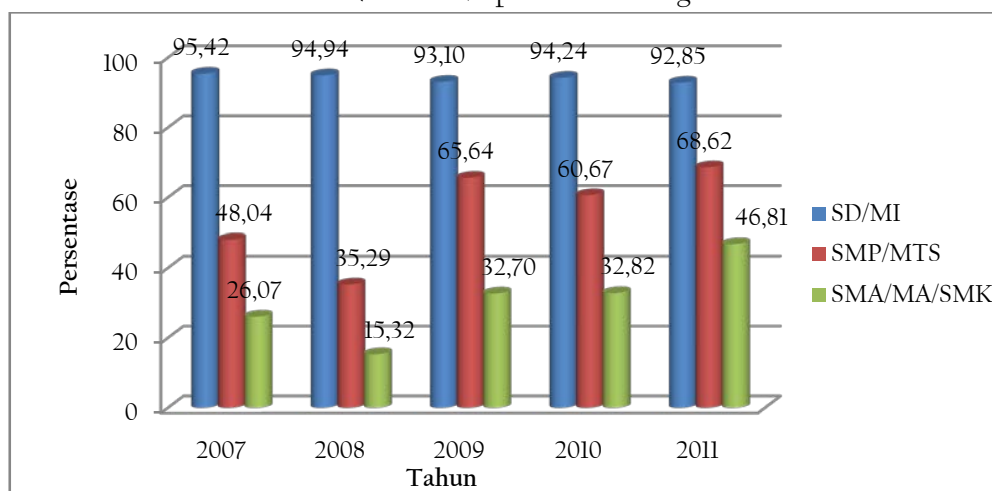
Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan berupa peningkatan Angka Melek Huruf dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Diduga rendahnya rata-rata lama sekolah sebagai akumulasi dari kebijakan pemerintah

daerah bidang pendidikan beberapa periode yang lalu tidak tepat sasaran. Angka rata-rata lama sekolah 7,48 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia lima belas tahun keatas adalah masih kelas 1 SMP/MTS atau kelas 7.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Perkembangan angka partisipasi murni (APM) tahun 2007-2011 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun kecenderungannya turun, dari periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,57%. Hal ini sungguh-sungguh merupakan keanehan/anomali yang perlu dicermati oleh semua pihak, baik penyelenggara pendidikan, pemerintah, masyarakat, para pendidik maupun stakeholder yang lain. Penurunan angka partisipasi murni ini dapat diduga penyebabnya adalah daya tampung sekolah untuk tingkat SD/MI kurang, akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SMP/MTS dan SMA/MA/SMK mengalami trend positif, walaupun kenaikannya variatif. Angka Partisipasi Murni untuk SMP/MTs untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 20,58. Akan tetapi trend yang perlu dicermati adalah selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bahwa terjadi kenaikan maupun penurunan APM

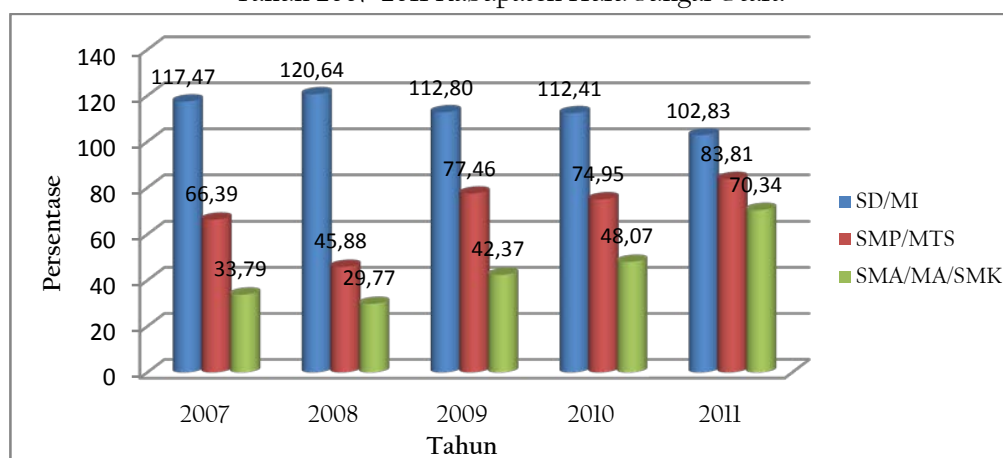
SMP/MTs yang tidak konsisten, walaupun secara umum jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan angka APM. Diduga permasalahan yang terjadi adalah kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, terbatasnya daya tampung sekolah, akses menuju sekolah tidak baik/rusak, peran pemerintah masih belum optimal, maupun belum terciptanya iklim/suasana pendidikan yang kondusif dan belum sadarnya stakeholder bahwa untuk merubah derajat kehidupan yang lebih baik adalah salah satunya melalui pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun mengalami perbaikan, ini teridentifikasi dengan kecenderungan turunnya APK untuk SD/MI dari tahun ke tahun. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 14,64%. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Namun penurunan APK dari tahun ke tahun selalu tumbuh perlu diapresiasi dan dijaga konsistensinya agar dalam jangka waktu tertentu terjadi keadaan dimana Angka Partisipasi Kasar akan linier dengan Angka Partisipasi Murni. Jika APK mendekati atau sama dengan APM bisa dikatakan sudah ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100 persen dapat diduga penyebabnya adalah akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Gambar 2.16.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Angka partisipasi Kasar tingkat SLTP dari tahun ke tahun berfluktuatif, APK tahun 2007 sebesar 66,39 turun menjadi 43,88, kemudian naik lagi menjadi 77,46 pada tahun 2009 kemudian turun lagi menjadi 74,95 pada tahun 2010 dan naik lagi menjadi 83,81 pada tahun 2011. Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi penurunan APK. APK yang trendnya selalu turun adalah APK yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi dikarenakan akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang, penanganan pemerintah daerah diduga tidak tepat, atau bisa jadi karena himpitan ekonomi serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu selalu fluktuatif dan trendnya naik turun, bahkan di tahun 2011 terjadi kenaikan APK. Angka ini sungguh sangat tidak diharapkan karena ini menunjukkan kurang berhasilnya program pendidikan. Permasalahannya juga hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang, penanganan pemerintah daerah diduga tidak tepat, banyak siswa yang tinggal kelas atau bisa jadi karena himpitan ekonomi serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak Punya Ijazah	29,70	34,15	31,99
2	SD sederajat	37,48	33,34	35,35
3	SLTP sederajat	14,01	16,69	15,39
4	SLTA sederajat	14,65	11,00	12,77
5	D.I – D.III	0,39	1,10	0,76
6	D.IV/ S1/ S2/ S3	3,77	3,72	3,74
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 31,99%, penduduk yang mempunyai ijazah SD sebanyak 35,35%, atau dengan perkataan lain bahwa jumlah penduduk yang belum/tidak

mempunyai ijazah SD dan yang mempunyai Ijazah SD lebih dari 50%, ini berarti bahwa masih berat tugas pemerintah daerah dalam hal menyelesaikan wajar 9 tahun. Demikian juga untuk penduduk yang mempunyai ijazah setingkat SLTP sampai SLTA masih rendah, yaitu sebesar 26,06 persen. Sedangkan penduduk yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi baru sebesar 4,04 persen. Hal ini terjadi disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan disamping sedikitnya pemahaman yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah akan arti pentingnya pendidikan, bisa juga dikarenakan biaya pendidikan yang masih dianggap membebani kehidupan bukan dianggap sebagai investasi sumber daya manusia masa depan.

b. Kesehatan

Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu aspek utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

Sektor kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam 5 tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak menjadi masalah urgent. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan

ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi (AKBH) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.

Tabel 2.7.
Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2007-2011
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	TAHUN					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Kematian Bayi	153	42	146	177	125	91
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	4.324	4.334	4.270	3.797	3.927	4.157
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)	35	10	34	47	32	22
4.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKBH)	965	990	966	953	968	978

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari tabel 2.7 tersebut diatas diketahui bahwa angka kelangsungan hidup bayi (AKBH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2011 sebesar 968 per 1000 kelahiran hidup, artinya kemungkinan bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun pada tiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 sebanyak 968 bayi.

Angka kematian bayi dari tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi dimana angka kematian bayi mengalami kenaikan dari 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 47 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 dan mengalami penurunan menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 dan 22 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012, walaupun angka tersebut masih dibawah rata-rata dari angka kematian bayi provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 sebesar 50 per 1000 kelahiran hidup dan telah melampaui target pencapaian MDG'S tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih banyak terjadi pada pada masa perinatal (0-7 hari), hal ini bisa disebabkan oleh kesehatan dan gizi ibu selama kehamilan dan cara persalinan serta gangguan yang diterima neonatus setelah beradaptasi dengan dunia luar, termasuk perawatan dan kebiasaan pemberian makanan padat dini pada bayi baru lahir. Tingginya angka kematian bayi tersebut menunjukkan kualitas dan kemampuan bidan dalam memberikan penanganan terhadap komplikasi neonatus masih rendah untuk itu perlu ditingkatkan kualitas *ante natal care* (ANC) karena dengan ANC yang berkualitas sesuai dengan standart kebidanan akan mencegah dan menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan ibu serta ditingkatkannya partisipasi masyarakat melalui kegiatan posyandu.

Untuk menekan kenaikan angka kematian bayi ini dapat dilakukan dengan peningkatan program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak.

Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2007-2011
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Indikator	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Angka Harapan Hidup (tahun)	61.87	62.28	62.68	63.07	63.47

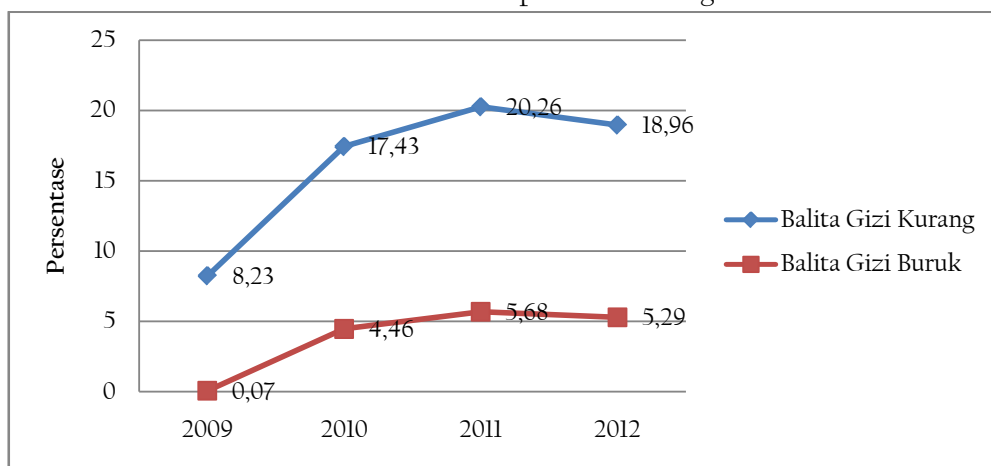
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari tabel 2.8 diatas diketahui bahwa angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan dimana AHH pada tahun 2011 sebesar 63,47 yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2011 di Kabupaten Hulu Sungai Utara diperkirakan akan dapat hidup selama 63 tahun 5 bulan 22 hari dengan syarat besarnya kematian dan kondisi kesehatan tidak akan berubah. Angka ini lebih rendah dari angka harapan hidup provinsi yakni sebesar 64,17. Hal ini mengindikasikan secara rata-rata derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata derajat kesehatan provinsi. Jika dibandingkan dengan AHH periode tahun sebelumnya, AHH Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 bertambah sekitar 0,40 tahun (empat bulan dua puluh enam hari).

Persentase Balita Gizi Buruk

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak.

Gambar 2.17.
 Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Buruk Menurut BB/U
 Tahun 2009-2012 di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

Dari Gambar 2.17 tersebut diatas diketahui bahwa prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2009 s/d tahun 2011 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yakni balita dengan gizi kurang sebesar 18,96 % dan gizi buruk sebesar 5,29%. Kondisi ini masih diatas target MDG's provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 dimana gizi kurang sebesar 16,8 % dan gizi buruk sebesar 5,2 %.

Untuk dapat mencapai target MDG'S tahun 2015 yakni menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 15% perlu kerjasama dari semua *stakeholders*, baik Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan, dan lain-lain. Strategi perbaikan gizi yang berbasis peternakan, perikanan dan kebun keluarga yang dikelola bersama antara SKPD terkait merupakan kunci kemandirian bidang pangan. Selain itu, dua program rutin mengenai gizi yang dominan hingga sekarang adalah (1) kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan dan Penyuluhan di pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang terintegrasi dalam layanan *Antenatal Care* dan penimbangan balita dan (2) Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang dilakukan di sekolah.

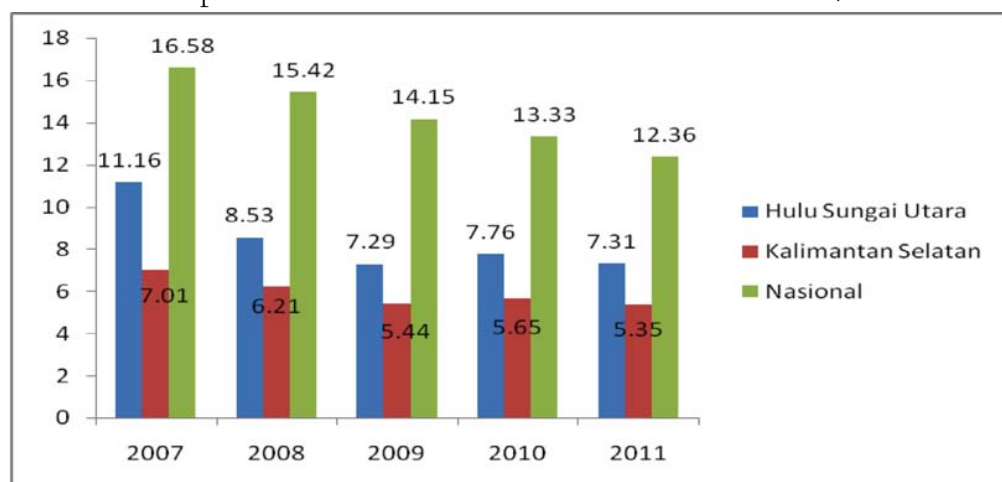
c. Kemiskinan

Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2007 sampai dengan 2011 angka kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun dengan trend yang menurun. Pada tahun 2007 persentase penduduk miskin masih di atas 10% dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2011. Dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan persentase

kemiskinan sebesar 3,85%. Penurunan ini dinilai cukup besar, meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun Kab/Kota yang ada di Kalimantan Selatan persentase kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara paling tinggi. Hal ini disebabkan karena semua Kab/Kota berupaya yang sama untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk lebih mengefektifkan lagi penurunan persentase kemiskinan, perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa program dan kegiatan yang lebih baik dan terencana.

Gambar 2.18.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2007-2011



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2.9.
Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
Garis Kemiskinan	150.275	182.258	216.012	245.812	264.058
Persentase penduduk miskin (%)	11,16	8,53	7,29	7,76	7,31
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	88,84	91,47	92,71	92,24	92,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun berdasarkan Data program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) yang dikeluarkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya di bawah 40% di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 66.252. Paling banyak terdapat di kecamatan Amuntai Selatan yaitu sebesar 8.233 orang.

Tabel 2.10.
Individu Miskin berdasarkan Kecamatan dan Status Kesejahteraan
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

No.	Kecamatan	Status Kesejahteraan			Total
		Individu dgn kondisi kesejahteraan sd 10% terendah	Individu dgn kondisi kesejahteraan sd 11%-20% terendah	Individu dgn kondisi kesejahteraan sd 21%-30% terendah	
1.	Amuntai Selatan	1.623	3.379	3.231	8.233
2.	Amuntai Tengah	1.315	3.132	2.824	7.271
3.	Amuntai Utara	1.011	2.421	1.916	5.348
4.	Babirik	2.803	3.715	1.711	8.229
5.	Banjang	1.526	2.997	2.780	7.303
6.	Danau Panggang	2.266	3.196	1.793	7.255
7.	Haurgading	1.412	2.266	1.633	5.311
8.	Paminggir	1.272	1.652	537	3.461
9.	Sungai Pandan	2.276	3.366	2.495	8.137
10.	Sungai Tabukan	1.556	2.367	1.781	5.704
	Total	17.060	28.491	20.701	66.252

Sumber : Data PPLS 2011 TNP2K Pusat

d. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Tabel 2.11.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kegiatan Utama Tahun 2007-2011

Kegiatan Utama	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Angkatan Kerja:					
- Bekerja	77,90	70,36	70,36	71,28	70,50
- Pengangguran	3,20	3,54	3,54	2,31	3,93
Bukan Angkatan Kerja :					
- Sekolah, mengurus RT	16,40	19,70	19,70	22,26	20,42
- Lainnya	2,60	6,50	6,50	4,16	5,15
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari Tabel 2.11 diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun terjadi penurunan penduduk yang bekerja. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi penurunan penduduk yang bekerja sebesar 7,40%, dan sebaliknya terjadi angka pengangguran yang meningkat sebagai konsekuensi dari penurunan penduduk yang bekerja. Hal ini disebabkan karena terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru (sektor sekunder, sektor tersier), pertumbuhan ekonomi yang masih mendatar, rendahnya investasi, pengaruh krisis global dan masih rendahnya kuantitas pengeluaran pemerintah.

e. **Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)**

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.12.
Angka Kriminalitas Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Uraian	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kasus kriminalitas	168	190	199	153	205
Kasus yang tertangani	127	183	180	108	112
Angka kriminalitas	6	7	9	5	5

Sumber : Polres Hulu Sungai Utara 2012

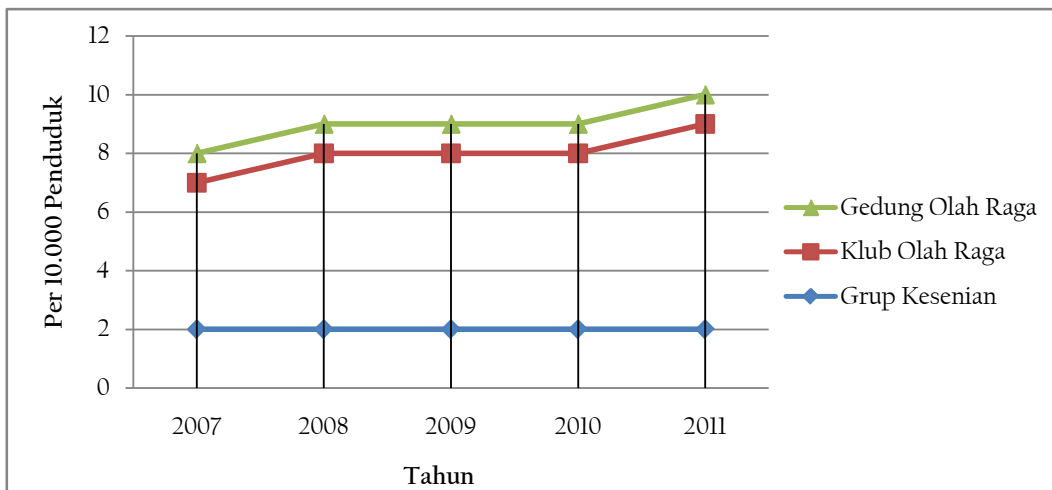
Angka kriminalitas = (Jumlah tindak pidana yang tertangani dlm 1 thn)/(jumlah penduduk) x 10.000

Dari Tabel 2.12 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam 10.000 penduduk terjadi kriminalitas sebanyak 6 kali pada tahun 2007, kemudian meningkat terus menjadi 9 kriminalitas pada tahun 2009 dan terjadi penurunan kriminalitas pada tahun 2010 dan 2011 menjadi sebesar 5 kriminalitas. Persoalan-persoalan ini dapat dieliminir dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tetapi tetap mengedepankan norma-norma negara maupun norma agama.

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak begitu mengalami peningkatan terutama pada jumlah grup kesenian, hal ini dikarenakan tidak adanya gedung kesenian yang representatif untuk bidang seni. Hal tersebut juga berlaku untuk jumlah klub olah raga, walaupun ada peningkatan jumlah klub namun keberadaan gedung olah raga masih tetap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Gambar 2.19).

Gambar 2.19.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga 2007-2011



Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2007-2011

Tabel 2.13.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011
Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Danau Panggang	1/10.000	6/10.000	1/10.000
2	Paminggir	-	7/10.000	1/10.000
3	Babirik	1/10.000	8/10.000	1/10.000
4	Sungai Pandan	2/10.000	8/10.000	1/10.000
5	Sungai Tabukan	-	8/10.000	1/10.000
6	Amuntai Selatan	1/10.000	9/10.000	1/10.000
7	Amuntai Tengah	6/10.000	8/10.000	1/10.000
8	Banjang	1/10.000	6/10.000	1/10.000
9	Amuntai Utara	1/10.000	7/10.000	1/10.000
10	Haur Gading	-	6/10.000	1/10.000
	Rata-rata	2/10.000	7/10.000	1/10.000

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2007-2011

Pada Tabel 2.13 di atas terlihat perkembangan seni, budaya dan olah raga pada tiap kecamatan dengan jumlah grup kesenian dan olah raga terbanyak terdapat pada Kecamatan Amuntai Tengah, ini dikarenakan letak Kecamatan Amuntai Tengah berada di pusat kota. Sedangkan untuk fasilitas gedung baik untuk kesenian maupun olahraga merata di semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

a. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama. Kalau dicermati Tabel 2.14 dapat dijelaskan bahwa untuk semua tingkatan jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA semuanya sudah menunjukkan perubahan yang positif dari tahun ke tahun. Selama periode 2009 sampai dengan 2011, APS SD/MI telah terjadi kenaikan sebesar 1,75%, yang semula 97,35% ditahun 2009 menjadi 98,91% di tahun 2011. Trend kenaikan ini perlu dijaga terus konsistensinya karena sudah berada pada jalur yang benar, namun begitu tetap masih menyisakan permasalahan-permasalahan, antara lain terdapat anak usia SD/MI untuk kelompok umur 7-12 tahun yang belum bersekolah dengan prosentase sebesar 1,01% (265 jiwa, SP 2010)

Demikian juga untuk APS tingkat SMP/MTs telah terjadi kenaikan sebesar 2,93 persen yang semula 76,34% ditahun 2009 menjadi 89,27 persen di tahun 2011, untuk tingkat SMP/MTs dengan kelompok umur 13-15 tahun yang belum bersekolah SMP/MTs prosentasenya sebesar 10,73% (1.369 jiwa, SP 2010). Keadaan ini memperjelas bahwa penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan Tahun belum tuntas.

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK juga mengalami kenaikan, yang semula 18,09% pada tahun 2009 menjadi 62,94% pada tahun 2011. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK masih sebesar 37,06% (4.790 jiwa, SP 2010). Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai sekor yang lebih tinggi pula .

Tabel. 2.14.

Data Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2009-2011
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011
1.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	97,35	99,09	98,91
2.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	76,34	78,52	89,27
3.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	18,09	40,66	62,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Selain Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah juga dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, rasio ini dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.15.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2008-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	SD/MI				
	Jumlah Gedung Sekolah	264	265	267	292
	Jumlah Penduduk kelompok usia 7- 12 tahun	27.096	26.594	26.184	26.184
	Rasio	97,43	99,65	101,97	111,52
2.	SMP/MTs				
	Jumlah Gedung Sekolah	60	59	62	62
	Jumlah Penduduk kelompok usia 13- 15 tahun	14.030	13.688	12.759	1.759
	Rasio	42,77	43,10	48,59	48,59
3.	SMA/SMK/MA				
	Jumlah gedung sekolah	23	23	26	26
	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	13.654	13.846	12.923	12.923
	Rasio	16,84	16,61	20,12	20,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Tabel 2.15 terlihat bahwa rasio ketersediaan Sekolah Dasar dari tahun 2008 sampai dengan 2011 terus naik dari 97,43 per 10.000 penduduk menjadi 111,52 per 10.000 penduduk. Rasio ini menggambarkan ketersediaan sekolah dasar terhadap penduduk usia sekolah dasar, kondisi data ini dapat diinterpretasikan bahwa penyediaan sekolah tingkat dasar sudah terpenuhi, bahkan nilai rasionya sudah melebihi angka 100.

Rasio ketersediaan sekolah tingkat menengah pertama dari tahun 2008 sampai dengan 2011 terus naik dari 42,77 per 10.000 penduduk menjadi 48,59 per 10.000 penduduk. Trend kenaikan rasio ketersediaan sekolah perlu ditingkatkan terus sampai mendekati angka 100, agar terpenuhi angka ketersediaan sekolah atau dengan kata lain bahwa penyediaan sekolah tingkat menengah pertama masih diperlukan.

Demikian juga rasio ketersediaan sekolah tingkat menengah atas dari tahun 2008 sampai dengan 2011 terus naik dari 16,48 per 10.000 menjadi 20,12 per 10.000 penduduk. Trend kenaikan rasio ketersediaan sekolah perlu ditingkatkan terus sampai mendekati angka 100, agar terpenuhi angka ketersediaan sekolah atau dengan kata lain bahwa penyediaan sekolah tingkat menengah atas masih diperlukan.

Rasio guru /murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.16.
Jumlah Guru dan Murid Tahun 2008-2011

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	SD/MI				
	Jumlah Guru	3.201	2.999	3.233	3.374
	Jumlah Murid	29.771	29.105	29.260	29.005
	Rasio	107,52	103,04	110,49	116,32
2.	SMP/MTS				
	Jumlah Guru	1.063	984	1.159	1.113
	Jumlah Murid	9.652	9.833	10.077	9.953
	Rasio	110,13	100,07	115,01	111,83
3.	SMA/MA/SMK				
	Jumlah Guru	662	622	708	710
	Jumlah Murid	5.994	6.042	6.927	7.425
	Rasio	110,44	102,95	102,21	95,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Tabel 2.16 terlihat rasio jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD dari 107,52 tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 103,04 tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011 mengalami kenaikan dari 110,49 menjadi 116,32. Untuk jenjang pendidikan SMP dari 110,13 tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 100,07 tahun 2009, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 115,01 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2011 menjadi 111,83. Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada pendidikan dasar baik untuk jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTS secara umum sudah lebih dari cukup, karena angkanya sudah melebihi 100, hanya saja angka tersebut terdiri dari jumlah guru PNS dan guru belum PNS yang kebanyakan bertugas di sekolah yang dikelola yayasan/swasta.

Adapun untuk jenjang pendidikan SMA Rasionya mengalami penurunan berturut-turut dari 110,44 tahun 2008 menjadi 102,95 tahun 2009 turun kembali pada tahun 2010 sebesar 102,21 dan tahun 2011 turun menjadi 95,63.

b. **Kesehatan**

Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan Untuk dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yang memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana

kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Sarana Kesehatan Tahun 2007-2012

No	Uraian	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Puskesmas	12	12	12	12	13	13
3	Jumlah Pustu	34	34	32	32	31	30
4	Jumlah Poskesdes	20	37	54	28	62	72
5	Jumlah Polindes	33	31	30	30	13	9
6	Jumlah Posyandu	219	219	219	219	219	219
7	Jumlah Penduduk	214.191	216.181	218.109	209.037	213.199	211.699
8	Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk	0,4668	0,4625	0,4584	0,4784	0,4690	0,47
9	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	5,602	5,550	5,502	5,741	6,097	6,14
10	Rasio Pustu terhadap penduduk	1,587	1,572	1,467	1,531	1,454	14,17
11	Rasio Poskesdes terhadap penduduk	9,374	1,711	2,475	1,339	2,908	34,01
12	Rasio Polindes terhadap penduduk	1,541	1,434	1,375	1,435	0,609	4,25
13	Rasio Posyandu terhadap penduduk	1,022	1,013	1,004	1,047	1,027	103,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2007-2012 berjumlah 1 (satu) buah dimana rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah type C yang nantinya diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan lintas daerah. Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2007-2010 sebanyak 12 buah dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah Puskesmas menjadi 13 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 maka 1 (satu) buah Puskesmas dapat melayani 16.438 jiwa penduduk.

Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2007-2012 mengalami penurunan namun fungsi polindes ditingkatkan menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 20 buah tahun 2007 menjadi 72 buah tahun 2012. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki Poskesdes.

Tenaga Kesehatan

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.18.
Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2007-2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Dokter	36	26	21	30	30
2.	Jumlah Tenaga Medis	55	35	29	38	39
3.	Jumlah Penduduk	214.191	216.181	218.109	209.037	213.199
4.	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	0,16801	1,1203	0,0963	0,1435	0,1407
5.	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	0,2568	0,1619	0,1330	0,1818	0,1829

Sumber : Dinas Kesehatan KabupatenHulu Sungai Utara

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Tabel 2.18), fasilitas kesehatan yang ada antara lain 1 RSUD, 13 puskesmas, 30 puskesmas pembantu, 9 polindes, dan 72 poskesdes. Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut juga didukung oleh tersedianya tenaga medis antara lain 30 dokter umum, 4 dokter gigi, 5 dokter spesialis.

c. Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, karena sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perencanaan pembangunan terkait kebijakan/rencana/program harus mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalamnya. Beberapa hal yang biasanya terkait dengan masalah lingkungan hidup adalah penanganan sampah, ketersediaan untuk mengakses air minum, serta penataan pemukiman.

Penanganan Sampah

Untuk pelayanan pengelolaan sampah, cakupan pelayanannya masih terbatas pada wilayah perkotaan Amuntai dan beberapa pusat kegiatan di Ibukota Kecamatan seperti pasar kecamatan. Berdasarkan Tabel 2.19 jumlah penduduk yang terlayani pengelolaan sampah di kawasan perkotaan amuntai hanya sebesar 67,38% dan untuk cakupan luasan wilayah yang terlayani adalah seluas 26%. Frekuensi pengangkutan sampah rata-rata adalah 1 kali rotasi dalam satu hari tergantung kebutuhan dengan tenaga pengangkut 6 orang termasuk sopir. Untuk pemrosesan akhir sampah, Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan TPA Regional Tebing Liring, yang terletak di Desa Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara.

Tabel 2.19.
Wilayah Pelayanan Pengelolaan Persampahan Kota Amuntai

Nama Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km ²)		Jmlh.Penduduk (jiwa)	
	Luas Wilayah Kota	Luas Wilayah Pelayanan	Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Terlayani
Antasari	1,00	1,00	4.270	4.270
Murung Sari	1,00	1,00	1.871	1.871
Kebun Sari	1,00	1,00	3.390	3.390
Paliwara	0,80	0,80	2.138	2.138
Sungai Malang	2,00	2,00	6.077	6.077
Palampitan Hulu	0,70	0,70	20290	2.290
Palampitan Hilir	0,50	0,50	20287	2.287
Kota Raden Hulu	1,00	1,00	1.447	1.447
Kota Raden Hilir	1,00	1,00	1.196	1.196
Kembang Kuning	1,00	-	1.142	-
Pasar Senin	1,50	-	1.727	-
Kandang Halang	2,00	-	1.979	-
Rantawan	1,80	-	1.720	-
Muara Tapus	1,80	-	1.514	-
Batu Kuning	4,70	-	921	-
Tapus	2,50	-	1.015	-
Pinang Habang	3,50	-	540	-
Tangga Ulin Hulu	1,50	1,50	767	767
Tangga Ulin Hilir	1,40	1,40	1.276	1.276
Hulu Pasar	0,60	0,60	1.035	1.035
Tambaiangan	0,70	0,70	1.619	1.619
Sungai Karias	2,00	2,00	1.770	1.770
Jumlah	57,00	15,20	46.648	31.433

Sumber: Data Kependudukan Kec. Amuntai Tengah (Kantor Kecamatan Amuntai Tengah)

Akses Air Minum

Pengertian air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia, dimana syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 tahun 2002 yang dimaksud air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Berdasarkan tabel 2.20, proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2011 tercapai 48,50 persen atau 105.733 sedangkan tahun 2012 mencapai 57,53 persen atau 120.370 jiwa, dimana terdapat kenaikan yaitu sekitar 9,03 persen.

Tabel 2.20.

Status Capaian Sektor Air Minum Tahun 2011 dan 2012

Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	48,50%	57,53%
	105.773 Jiwa	120.370 jiwa
Perkotaan	74,12%	85,68%
	49.510 Jiwa	49.605 jiwa
Perdesaan	37,18%	46,76%
	56.263 Jiwa	70.765 jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan KabupatenHulu Sungai Utara

Capaian sektor air minum untuk kawasan perkotaan sudah cukup baik, hal ini disebabkan karena saluran perpipaan PDAM sudah meliputi hampir seluruh kawasan perkotaan. Selain itu juga tingkat pendapatan masyarakat perkotaan dapat menentukan capaian sektor air minum tersebut. Sedangkan untuk kawasan perdesaan dimana capaian sektor air minum masih rendah dikarenakan selain disebabkan jangkauan perpipaan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan, faktor penghasilan yang masih rendah dan kondisi fisik wilayah yang didominasi rawa juga menentukan masih rendahnya capaian tersebut.

d. Pekerjaan Umum

Kondisi Jalan

Semakin meningkatnya usaha pembangunan dan berkembangnya suatu wilayah, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Kondisi jalan baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 144,037 km atau 37% dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 168,316 km atau 44%. Dari tahun 2010 sampai dengan 2011 terjadi peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik, tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan kualitas yang ditandai dengan jumlah panjang jalan dalam kondisi baik yang menurun menjadi sepanjang 160,451 km atau 42%.

Tabel 2.21.

Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2010-2012

No	Status	Jalan Kondisi Baik			Panjang Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara					
					Panjang Jalan			Persentase Jalan Kondisi Baik		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Jalan Negara	26,350	26,950	26,950	28,450	28,450	28,450	93	95	95
2	Jalan Propinsi	24,000	19,000	19,000	24,000	24,000	24,000	100	79	79
3	Jalan Kab	93,687	122,366	114,501	334,089	334,089	334,089	28	37	34
	Total	144,037	168,316	160,451	386,539	386,539	386,539	37	44	42

Sumber : Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Tabel 2.21 di atas, untuk persentase jalan negara dan jalan provinsi dari tahun 2010 sampai 2012 yang dalam kondisi baik sudah sangat bagus, sedangkan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih sangat rendah, dimana pada tahun 2012 dari total panjang 386,539 km yang dalam kondisi baik hanya sekitar 42 %. Adapun penyebab masih rendahnya persentase jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya banjir yang dapat merusak jalan.

Jaringan Irigasi

Dengan kondisi wilayah rawa yang banyak tergenang air baik yang tergenang secara monoton atau secara periodik (pasang surut), maka memerlukan pengaturan kedalaman air untuk dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selama ini telah banyak digunakan sistem polder untuk mengatur elevasi air sesuai dengan kebutuhan penggunaan lahan yang akan diusahakan. Polder merupakan suatu sistem reklamasi yang diterapkan pada daerah lahan rawa lebak. Pada Tabel 2.22 Polder Alabio merupakan polder yang paling luas areanya dan merupakan polder yang menjadi wewenang pusat karena luas areanya lebih dari 3000 Ha. Adapun untuk polder yang luas areanya lebih dari 1000 ha menjadi wewenang provinsi dan yang kurang dari 1000 ha menjadi wewenang kabupaten.

Tabel 2.22
Sarana Irigasi Polder Tahun 2011

Lokasi	Dimensi (meter; buah)	Luas Area Yang Diairi (Ha)
Polder Alabio (termasuk kedalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pandan, Danau Panggang, Babirik dan Amuntai Selatan)	8.213 m ¹ 50.625 m ² 75 buah ³	6.000
Polder Bakar (Kecamatan Sungai Pandan, babirik)	8.750 m 16.000 m 12 buah	2.400
Polder Simpang Empat (Kecamatan Amuntai Selatan dan Telaga Silaba)	6.000 m 16.000 m 7 buah	1.346
Polder Padang Gusti (Kecamatan Haur Gading)	2.000 m 11.000 m 10 buah	471
Polder Pakacangan (Kecamatan Amuntai Utara)	6.250 m 30.000 m 17 buah	1.831
Polder Murung Bayur (Kecamatan Amuntai Utara)	6.000 m 14.000 m 3 buah	1.750
Polder Kaludan (Kecamatan Banjarang)	17.000 m 16.800 m 7 buah	2.400
Rawa Pinang Habang (Kecamatan Amuntai tengah)	10.000 m 36.000 m - buah	2.000
Jumlah		18.198

Sumber : Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Utara
Keterangan: 1) saluran primer; 2) tanggul; 3) bangunan

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Adapun rasio irigasi yang diperoleh adalah 0,000728, dimana dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.

e. Perumahan

Rumah Layak Huni

Berdasarkan Permen Perumahan Rakyat Nomor : 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, yang dimaksud rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berikut data rasio rumah layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2.23.

Rasio Rumah Tangga Layak Huni

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni (%)
2010	54.430	53.250	97,83
2011	53.742	52.265	97,25
2012	54.342	52.868	97,28

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012

Berdasarkan Tabel 2.23, rumah tangga layak huni pada tahun 2010 sebanyak 53.250 Rumah Tangga atau 97,83%, pada tahun 2011 mengalami penurunan Rumah Tangga Layak Huni menjadi 52.265 atau 97,25%, sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 52.868 rumah tangga atau 97,28%.

Rumah Bersanitasi

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air, dimana sanitasi berhubungan langsung dengan kesehatan dan penggunaan air. Untuk wilayah perkotaan sudah tidak begitu tampak adanya MCK komunal. Di pedesaan MCK komunal lebih sering terlihat di daerah pedesaan. Terdapat dua jenis MCK komunal, yaitu :

- Jamban komunal yang belum layak, yang terletak di tepi-tepi sungai, dan berjumlah sangat banyak. Sumber air yang digunakan untuk jamban tersebut berasal dari air sungai langsung, dan kotorannya pun juga dibuang langsung ke sungai.

- MCK komunal yang sudah cukup layak. Terletak di tepi jalan. Sumber air ada yang berasal dari sumur, ada yang dari saluran pipa air PDAM. Berjumlah sedikit. Namun tidak semua MCK ini sudah dilengkapi dengan septic tank, sebagian MCK kotorannya langsung terbuang ke saluran air yang ada di bawahnya.

MCK komunal yang belum layak (jamban) masih sangat banyak, terutama di daerah pedesaan dan tepi sungai. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sebagian besarnya masih menggunakan air sungai untuk mandi, cuci baju dan cuci piring.

Tabel 2.24.
Rumah Tangga Bersanitasi

Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan pedesaan	47,54%	51,00%
	103.693 Jiwa	106.705 Jiwa
Perkotaan	56,94%	58,90%
	31.831 Jiwa	34.100 Jiwa
Perdesaan	44,30%	47,97%
	71.861 Jiwa	72.605 Jiwa

Berdasarkan Tabel 2.24 di atas, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, pada tahun 2012 capaian untuk perkotaan sebesar 58,90% atau 34.100 jiwa dan akses untuk pedesaan 47,97%, dibandingkan tahun sebelumnya (2011) pada perkotaan 56,94% atau 31.631 jiwa dan akses pada pedesaan 44,30% atau 71.861 jiwa, kenaikan untuk perkotaan sebesar 1,96% dan pedesaan 3,67%.

f. Penataan Ruang

Berdasarkan aspek pelayanan umum, Indikator kinerja pembangunan daerah untuk penataan ruang dilihat dari rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dimana untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara ruang terbuka hijaunya terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL) dan Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTH Binaan).

Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL) adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, di dominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau, dan sebagainya.

Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB) adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, dengan permukaan tanah di dominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Kawasan/ruang hijau

terbuka binaan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan untuk luasan RTH di Perkotaan Amuntai yang terdiri dari RTHL dan RTHB adalah seluas 67 %. Jadi untuk luasan RTH di Kota Amuntai sudah melebihi dari target yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007.

g. Perhubungan

Sesuai kondisi geografisnya, sistem transportasi Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari transportasi darat dan transportasi sungai. Kedua sistem transportasi tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam melayani pergerakan di dalam wilayah maupun dari dan keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam mendukung pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek sistem transportasi darat, maka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibangun beberapa terminal tipe B dan C seperti yang ada di Tabel 2.25. Sehubungan dengan ditetapkannya Kota Amuntai sebagai PKW oleh Pemerintah Pusat, maka diperlukan juga peningkatan/pengembangan terminal Banua Lima Tipe B sebagai terminal regional.

Tabel 2.25.
Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum

Nama terminal	Tipe terminal	Lokasi	Luas Kawasan (m)
Terminal Banua Lima	B	Kecamatan Amuntai Tengah	75 x 400
Terminal Palampitan	C	Kecamatan Amuntai Tengah	85 x 85
Terminal Pasir mas	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80
Terminal Hulu Pasar	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80
Terminal Babirik	C	Kecamatan Babirik	55 x 100
Terminal Alabio	C	Kecamatan Sungai Pandan	65 x 65

Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo. Prop.Kal Sel

Dalam transportasi sungai dan rawa, sungai dimanfaatkan secara alami sebagai jalur pelayaran. Sedangkan sarana yang dipakai untuk aktivitas transportasi sungai meliputi jukung, motor tempel, motor boat, ketotok, dan long boat. Revitalisasi peran transportasi sungai diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap wilayah yang belum terjangkau transportasi darat, selain itu bersama transportasi darat membentuk sistem transportasi secara terpadu.

Pelabuhan sungai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari pelabuhan regional dan pelabuhan lokal. Untuk pelabuhan regional terdiri atas: pelabuhan Babirik, pelabuhan Amuntai, pelabuhan Danau Panggang dan pelabuhan Paminggir. Sedangkan untuk pelabuhan lokal terdiri atas: pelabuhan Alabio, pelabuhan

Banua Lima, pelabuhan Pasar Amuntai, pelabuhan Telaga Silaba, dan pelabuhan Haur Gading.

Kedepannya perlu peningkatan dan pengembangan pelabuhan sungai, mengingat transportasi sungai masih merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan selain itu keberadaan angkutan sungai juga sangat vital. Hal ini disebabkan beberapa bagian wilayah masih belum terjangkau jaringan transportasi darat karena kondisi geografis wilayahnya yang memang daerah perairan atau rawa.

h. Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada 2 (Dua) investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk yaitu Industri Crumb Rubber dan Perkebunan Kelapa sawit dari tahun 2007-2011 (Tabel 2.26).

Tabel 2.26.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007-2011

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2007	Jumlah Investor	1	0	1
2008	Jumlah Investor	1	0	1
2009	Jumlah Investor	2	0	2
2010	Jumlah Investor	2	0	2
2011	Jumlah Investor	2	0	2

Sumber : Bag. Perekonomian & SDA Setda Hulu Sungai Utara

Peran kelembagaan/organisasi industri dan perdagangan selama ini masih sangat kecil, di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat organisasi KADIN, dimana pada dasarnya organisasi ini dibentuk sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, fasilitasi antara pengusaha Indonesia/asing dan Pemerintah, kedepannya diharapkan adanya langkah nyata organisasi/lembaga ini dalam rangka meningkatkan peran perdagangan dan perindustrian di daerah.

Tabel 2.27.
Jumlah Investasi PMDN Tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2007	1	1.024.606.000	1	1.024.606.000
2008	1	1.014.324.000	1	1.014.324.000
2009	2	2.450.907.000	2	2.450.907.000
2010	2	2.914.517.000	2	2.914.517.000
2011	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000

Sumber : Bag. Perekonomian & SDA Setda Hulu Sungai Utara

Semakin banyaknya nilai investasi maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberikan fasilitas penunjang bagi investor untuk memberikan investasi yang telah direncanakan.

Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama tahun 2007-2011 trendnya berfluktuatif dengan kisaran jumlah proyek 1-2 dan nilai investasi 1.000.000.000 s.d 2.900.000. Dari Tabel 2.27 menunjukkan bahwa jumlah Investasi PMDN dari tahun 2007 s/d 2010 cenderung naik walaupun tidak terlalu besar, namun pada tahun 2011 menurun dari Rp. 2.914.517.000 menjadi Rp. 2.000.000.000,-. Ini berarti perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi di daerah sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

Investasi yang diperlukan berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Investasi sektor pemerintah dilakukan dan dibiayai melalui APBD, sedangkan investasi sektor swasta bisa berupa Penanaman Modal Asing maupun penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Dalam perkembangannya investasi lebih banyak dipenuhi dari sektor swasta sedangkan sektor Pemerintah bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi swasta tersebut. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi suatu daerah maka diperlukan adanya investasi memadai dan berkelanjutan dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Adapun untuk rasio daya serap tenaga kerja dengan adanya investasi pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 0,006 kemudian pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,007 karena adanya penambahan jumlah PMDN yang semula 1 perusahaan menjadi 2 perusahaan dan tahun berikutnya relatif tetap (konstan).

Tabel 2.28.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN	163	163	276	276	276
2.	Jumlah Seluruh PMDN	1	1	2	2	2
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007

Sumber : Bag. Perekonomian & SDA Setda Hulu Sungai Utara

Berdasarkan data pada Tabel 2.28 diatas dapat disimpulkan bahwa daya tampung proyek investasi Penanaman Modal Dalam Negeri untuk menyerap tenaga kerja masih rendah. Masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah klasik yang selalu menjadi fokus perhatian semua kalangan. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi hal-hal yang lazim terjadi disetiap daerah. Lapangan kerja yang semakin sempit mengakibatkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap dilapangan kerja. Jika masalah pengangguran ini tidak mendapat perhatian yang serius, maka bisa menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat disamping sulitnya mencapai keberhasilan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

i. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

UKM sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara berperan besar dalam menopang pondasi perekonomian daerah sehingga UKM perlu dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tabel 2.29 menunjukkan Jumlah UKM non BPR/ LKM pada tahun 2007-2011. Tahun 2007 terdapat 250 unit UKM dan meningkat menjadi 306 unit pada tahun 2008 dan menurun pada tahun 2009 menjadi 207 unit. Hal ini karena kondisi perekonomian nasional mengalami krisis dan kondisi iklim yang tidak mendukung terhadap usaha ekonomi produktif terutama di sektor pertanian. Namun pada tahun 2010 kembali meningkat sebesar 290 unit seiring membaiknya kondisi perekonomian nasional dan terus meningkat pada tahun 2011 menjadi 371 unit.

Tabel 2.29.
Jumlah UKM non BPR / LKM Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah seluruh UKM	255	311	312	295	376
2.	Jumlah BPR/LKM	5	5	5	5	5
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	250	306	207	290	371

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara (data diolah)

Adapun untuk data koperasi dapat dilihat pada Tabel 2.30. Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Persentase koperasi yang aktif pada tahun 2007 sebesar 66,98% kemudian pada tahun 2008 turun menjadi 65,83%. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 trend mulai naik. Penurunan tersebut disebabkan adanya koperasi yang tidak dapat menjalankan kewajibannya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan usahanya. Kenaikan Jumlah koperasi dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi baru sedangkan kenaikan persentase koperasi yang aktif tidak terlalu tinggi karena organisasi kelembagaan koperasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini perlu perhatian pemerintah untuk membina keberadaan koperasi sehingga unit usaha ekonomi rakyat dapat berperan secara optimal bagi perekonomian daerah.

Tabel 2.30.
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007-2011

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Koperasi	106	118	120	121	121
2.	Jumlah Koperasi Aktif	71	77	79	85	90
3.	Persentase Koperasi Aktif (%)	66,98	65,25	65,83	70,24	74,38

Sumber Data : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan.

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah disebabkan oleh banyak hal, ada yang disebabkan kelahiran, kematian atau perpindahan/migrasi penduduk baik keluar daerah maupun dari luar daerah. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti terlihat pada Tabel 2.31 sebesar 0,0117, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 209.246 orang meningkat pada tahun 2011 sebesar 211.699 orang.

Tabel 2.31.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (org)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
		2010	2011	2010/2011
1.	Danau Panggang	19.593	19.704	0,0057
2.	Paminggir	7.377	7.498	0,0164
3.	Babirik	17.833	18.108	0,0154
4.	Sungai Pandan	25.905	26.208	0,0117
5.	Sungai Tabukan	13.801	13.875	0,0054
6.	Amuntai Selatan	26.466	26.822	0,0135
7.	Amuntai Tengah	47.961	48.713	0,0157
8.	Banjang	16.185	16.329	0,0089
9.	Amuntai Utara	19.955	20.136	0,0091
10.	Haugading	14.170	14.308	0,0096
	Hulu Sungai Utara	209.246	211.699	0,0117

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012

Pada akhir tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 211.699 jiwa, terdiri 103.498 orang laki-laki dan 108.201 orang perempuan. Ini menandakan bahwa proporsi penduduk perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi daripada laki-laki.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara relative belum merata di tiap kecamatan, hal itu dapat dilihat pada kecamatan Amuntai Tengah yang merupakan ibu kota kabupaten dengan wilayah hanya 6,39 persen dari luas wilayah kabupaten ternyata ditempati penduduk terbanyak sebesar 48.713 jiwa atau 23,01 persen dari total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jika dihitung kepadatannya maka kepadatan di kecamatan ini sangat tinggi jika dibandingkan kepadatan kecamatan Paminggir yang wilayahnya lebih luas, hal ini terjadi karena kecamatan Amuntai tengah dari segi infrastruktur memang paling memadai dibandingkan kecamatan lain. Sebaran penduduk tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Kelompok Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Penyebaran Penduduk	
		Km	%	Jiwa	%
1.	Danau Panggang	224,49	25,15	19,704	9,31
2.	Paminggir	156,13	17,49	7.498	3,54
3.	Babirik	77,44	8,67	18.108	8,55
4.	Sungai Pandan	45,00	5,04	26.208	12,38
5.	Sungai Tabukan	29,24	3,28	13.875	6,55
6.	Amuntai Selatan	183,16	20,52	26.822	12,67
7.	Amuntai Tengah	57,00	6,39	48.713	23,01
8.	Banjang	41,00	4,59	16.329	7,71
9.	Amuntai Utara	45,09	5,05	20.136	9,51
10.	Haugading	34,15	3,83	14.306	6,76
	Hulu Sungai Utara	892,70	100,00	211,699	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012

Berdasarkan tingkat pendidikan, proporsi terbesar penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berpendidikan dasar dan menengah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 7,48 yang artinya penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara rata-rata berpendidikan di tingkat SLTP kelas 1.

Adapun dari jumlah penduduk ber KTP pada tahun 2011 terdapat peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KTP yaitu sebesar 0,675 atau 129.471 orang, dibanding pada tahun 2010 sebesar 0,505 atau sebesar 96.442 orang. Jumlah tersebut belum memenuhi target karena jumlah yang mempunyai KTP masih jauh dibandingkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2011

Indikator	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Jumlah Penduduk Wajib KTP	192.938	200.409	190.729	191.745
Penduduk ber KTP	20.016	47.708	96.442	129.471
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,103	0,238	0,505	0,675

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunyai akte kelahiran. Jumlah kelahiran bayi pada tahun 2010 sebanyak 3.797 kelahiran hidup, dan terjadi peningkatan pada tahun 2011 yang berjumlah 3.927 kelahiran hidup. Rasio bayi yang mempunyai akte kelahiran pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2010 yaitu dari 0,132 menjadi 0,113. Data rasio bayi berakte kelahiran tahun 2010-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Rasio Bayi Berakta Kelahiran Tahun 2010-2011

Indikator	Tahun	
	2010	2011
Jumlah Bayi Lahir	3.797	3.927
Bayi Yang Mempunyai Akta Kelahiran	503	444
Rasio bayi Berakta Kelahiran	0,132	0,113

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012

k. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, Tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

Tabel 2.35.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011

Indikator	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
TPT	3,90	4,79	4,95	3,14	5,28
TPAK	81,1	73,90	73,90	73,59	74,43

Sumber : BPS, Sakernas 2011 (kondisi Agustus)

Dari tabel 2.35 dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi, dengan tren yang menurun dari tahun 2007 hingga tahun 2010, dan kembali meningkat sedikit pada tahun 2011. Hal ini artinya penduduk yang bekerja dan mencari kerja cukup tinggi dan masih ada penduduk pada usia kerja yang tidak bekerja.

l. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.36. Jika dilihat jumlah seluruh pegawai perempuan di Kabupaten Hulu

Sungai Utara dan dibandingkan dengan total pegawai yang ada, maka rasio pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah pada tahun 2010 sebesar 51,24 % sedangkan pada tahun 2011 sebesar 50,92 %. Sebagian besar perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah adalah sebagai staf, kemudian jumlah yang lumayan besar adalah di lingkungan Eselon IV, sedangkan Eselon II dan Eselon III cukup kecil. Untuk tingkat partisipasi perempuan di sektor swasta tidak dapat dilakukan analisis karena tidak tersedianya data.

Tabel 2.36.
Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS)
Tahun 2010-2011

No.	Indikator	Tahun	
		2010	2011
1.	Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon II	1	1
2.	Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon III	22	22
3.	Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon IV	119	122
4.	Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon V	50	8
5.	Jumlah Staf Perempuan	2.615	2.581
	Jumlah PNS Perempuan	2.807	2.734
6.	Jumlah PNS di Kabupaten Hulu Sungai Utara	5.478	5.369

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2012

Indikator lainnya dalam bidang ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar pada instansi Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2010 sebanyak 3 kasus, tahun 2011 sebanyak 8 kasus sedangkan tahun 2012 sebanyak 7 kasus.

m. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Angka rata-rata akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 sebesar 75,68. Angka ini menurun pada tahun 2009 menjadi 74,94, kemudian 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 meningkat menjadi 76,24 dan 100, ini membuktikan bahwa pada tahun 2011 seluruh pasangan usia subur sudah menjadi peserta akseptor KB.

Tabel 2.37.
Jumlah dan Rasio Akseptor KB Tahun 2008-2011

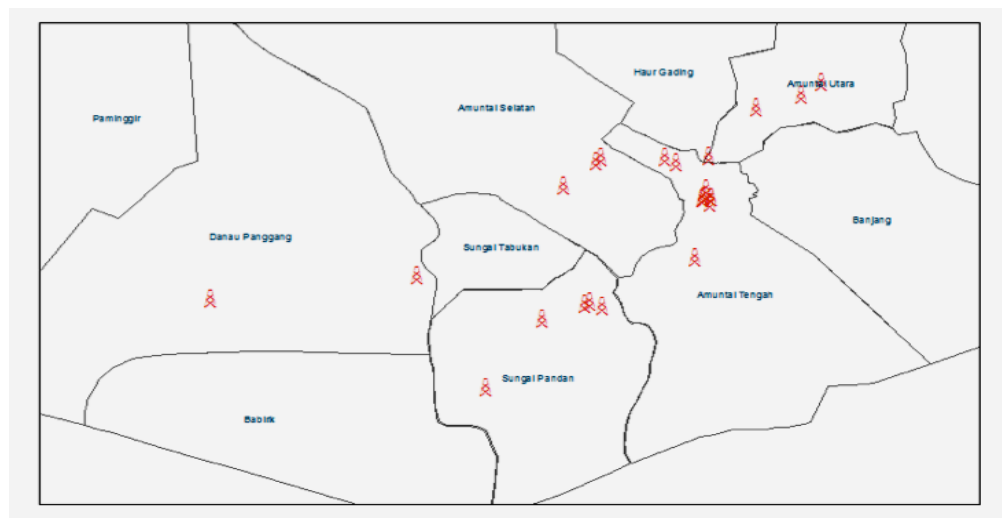
No.	Indikator	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah akseptor KB	32.840	33.939	36.196	35.572
2.	Jumlah pasangan usia subur	43.391	45.290	47.474	35.572
3	Rata-rata akseptor KB	75,68	74,94	76,24	100

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2012

n. Komunikasi Dan Informatika

Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL (9) , INDOSAT (3), TELKOM (2) , 3 (1), FLEXI (3), XL (5). Untuk TV lokal, Amuntai telah memiliki AM TV yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah.

Gambar 2.20.
Peta Sebaran Menara Telekomunikasi Tahun 2011



Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan keadaan di lapangan, banyak menara-menara BTS di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengindahkan standar keselamatan terutama di lingkungan sekitar BTS. Banyak pembangunan BTS berdampingan dengan permukiman, sehingga dapat membahayakan keselamatan penduduk sekitar dimana seharusnya jarak ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara. Permasalahan pembangunan BTS ini lebih banyak disebabkan karena perizinan yang kurang ketat/lemah; belum menguasainya SDM/SKPD pemberi izin terhadap standar pembangunan BTS; belum adanya Perda RTRW/RDTR terbaru; dan pengawasan yang kurang.

Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.

o. Pemberdayaan Masyarakat

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,sejahtera, maju dan mandiri. Perkembangan jumlah kelompok PKK dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.38.
Kelompok Binaan PKK Tahun 2007-2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah PKK	219	219	219	219	219
2.	Jumlah Kelompok Binaan	0	10	10	20	20
3.	Rata-rata jlh kel.binaan	0.000	0.046	0.046	0.091	0.091

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2012

Dari data pada Tabel 2.38 diatas diketahui bahwa jumlah PKK dari tahun 2008-2011 tidak ada penambahan, namun jumlah binaan dari tahun ke tahun semakin bertambah dimana dari tahun 2011 menjadi 20 binaan, begitu pula besaran rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal itu menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan PKK yang ada di desa semakin meningkat.

Adapun untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2007-2010 terdapat 18 buah lembaga swadaya masyarakat, kemudian bertambah pada tahun 2011 menjadi 20 buah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

p. Perpustakaan

Perpustakaan bertujuan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah sebanyak dua buah dan milik swasta 18 buah pada tahun 2011 , tetapi kalau di lihat dari jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2007 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin bertambah tingginya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Banyaknya jumlah pengunjung perlu diiringi dengan banyaknya jumlah perpustakaan yang akan membantu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perkembangan jumlah perpustakaan dan pengunjungnya dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Th 2010-2011

No	Indikator	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Perpustakaan (Milik Pemda)	1	1	2	2	2
2	Jumlah Perpustakaan (Milik Non Pemda)	7	8	10	15	18
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Milik Pemda)	16.069	25.778	11.301	19.235	31.168
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Milik Non Pemda)	-	-	10.551	16.987	29.886

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012

q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator urusan wajib ini diantaranya adalah jumlah polisi pamong praja, jumlah linmas, dan pos kamling. Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Tabel 2.40 memperlihatkan rasio Pol PP dan Linmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.40.
Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Tahun 2007-2011

Uraian	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Polisi Pamong Praja	54	54	55	55	54
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,52	2,49	2,52	2,63	2,53
Jumlah Linmas	-	-	2.248	2.248	2.424
Rasio Linmas per 10.000 penduduk	-	-	103,07	107,54	113,70
Jumlah Penduduk	214.191	216.181	218.109	209.037	211.699

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2012

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 (2,52 per 10.000 penduduk menjadi 2,63 per 10.000 penduduk) namun terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 2,53 per 10.000 penduduk. Artinya pada tahun 2011 kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah semakin menurun.

Adapun kegiatan Perlindungan terhadap masyarakat oleh Linmas sejak tahun 2009-2011 terus terjadi peningkatan. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat .

Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2009 sebesar 103,07 meningkat menjadi 113,70 pada tahun 2011. Ini menandakan semakin meningkatnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Jumlah Siskamling pada Tahun 2011 sebanyak 810 buah yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

r. Pemuda dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan, jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 yang terdaftar sebanyak 38 buah. Banyaknya organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 mencakup kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, fasilitasi kegiatan kepemudaan, bakti sosial bagi pemuda, penyuluhan pencegahan tentang bahaya narkoba dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. Banyaknya kegiatan kepemudaan

menunjukkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Jumlah Organisasi Olahraga serta kegiatan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2007 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan (Tabel 2.41). Hal ini menggambarkan adanya kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Tabel 2.41.
Jumlah Organisasi dan Kegiatan Olahraga Tahun 2010-2011

No.	Kecamatan	Organisasi Olahraga					Jumlah Kegiatan Olahraga				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Amuntai Tengah	35	40	40	41	42	13	15	15	22	16
2.	Amuntai Selatan	12	13	14	14	14	5	7	6	6	9
3.	Amuntai Utara	10	11	11	12	13	3	5	6	6	7
4.	Banjang	9	9	9	10	10	2	3	3	4	4
5.	Haurgading	7	7	8	8	8	2	2	3	3	4
6.	Sungai Pandan	15	15	14	16	16	3	2	3	3	3
7.	Sungai Tabukan	7	7	8	8	9	1	1	1	1	1
8.	Danau Panggang	10	12	12	13	13	2	2	2	2	2
9.	Babirik	15	14	15	15	16	3	3	2	3	3
10.	Paminggir	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1
	Jumlah	127	135	138	144	148	35	41	42	51	50

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2012

s. **Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang biasa disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tiga dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan daerah. Adapun untuk setiap SKPD harus memiliki perencanaan selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tiap tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki RPJPD 2005-2025 dan sekarang sedang menyusun RPJMD 2013-2017, yang merupakan tahapan ketiga dari dokumen RPJPD yang sudah ada. Adapun RKPD setiap tahun telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi dasar untuk penyusunan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi RAPBD dan APBD. Ke depannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dibenahi untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan.

t. Sosial dan Kebudayaan

Tahun 2011 di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 10 panti asuhan yang membina 469 anak asuh yang terdiri dari 380 anak laki-laki dan 89 anak perempuan. Sedangkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2011 jumlahnya mencapai 13.161 orang. PMKS yang terbanyak ditemukan antara lain keluarga fakir miskin yaitu sebanyak 7.191 orang (54,64 persen) dan lanjut usia terlantar (60+) sebanyak 1.384 orang (10,52 persen). Berbagai jenis PMKS yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel. 2.42. Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

Di bidang kebudayaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan urusan ini. Namun untuk hal ini memang belum terlalu berkembang di Kabuapten Hulu Sungai Utara, meskipun peluang itu masih terbuka lebar. Adanya sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan salah satu stimulus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada.

Tabel 2.42.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

No.	Jenis PMKS	Jenis Kelamin		Total
		Lk	Pr	
1.	Balita Terlantar (0-4 th)	56	41	97
2.	Anak Terlantar(5-18 th)	186	142	328
3.	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	-
4.	Anak Nakal	93	38	131
5.	Anak Jalanan	35	-	35
6.	Anak Cacat (0-18 th)	-	-	-
7.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	20	868	888
8.	Wanita Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	8	21	29
9.	Lanjut Usia Terlantar (60 th ke atas)	541	843	1.384
10.	Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	-
11.	Penyandang Cacat (19 th ke atas)	612	584	1.196
12.	Penyandang cacat Eks. Penderita Kronis (19 th ke atas)	-	-	-
13.	Tuna Susila	18	-	18
14.	Pengemis	30	18	48
15.	Gelandangan	28	-	28
16.	Bekas Narapidana	150	11	161
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	125	12	137
18.	Korban HIV/AIDS	-	-	-
19.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	723	457	1.180
20.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	72	54	126
21.	Komunitas Adat Terpencil	21	-	21
22.	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	-	-	-
23.	Korban Bencana Alam	40	9	49
24.	Korban Bencana Sosial/Pengungsi	3	-	3
25.	Pekerja Migran Terlantar	-	-	-
26.	Keluarga Rentan	54	57	111
27.	Keluarga Fakir Miskin	4.647	2.544	7.191
Jumlah Total		7.462	5.699	13.161

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2012

u. Pemerintahan Umum (Otonomi Daerah)

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sebuah daerah otonom mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu mengurus 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemerintah Daerah tidak mengurus urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, seperti Urusan Luar Negeri, Pertahanan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, agama, dan lain-lain.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat terwujud masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sejahtera. Untuk itu berbagai kebijakan, program maupun kegiatan dilaksanakan. Dalam urusan pemerintahan sendiri telah dilaksanakan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah. Selanjutnya juga ada Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pemerintah Daerah.

v. Statistik Dan Kearsipan

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara. Output yang dihasilkan dan menjadi rutinitas setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan.

w. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi isu penting dalam setiap pembangunan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus bisa diwujudkan. Beberapa indikator yang menjadi acuannya adalah harga beras, harga kebutuhan pangan pokok, dan rasio konsumsi pangan normatif terhadap ketersediaan pangan sereal. Ketersediaan pangan utama dilihat dari standar konsumsi pangan utama yang ditetapkan pemerintah dibandingkan dengan produksi pangan utama di kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu beras.

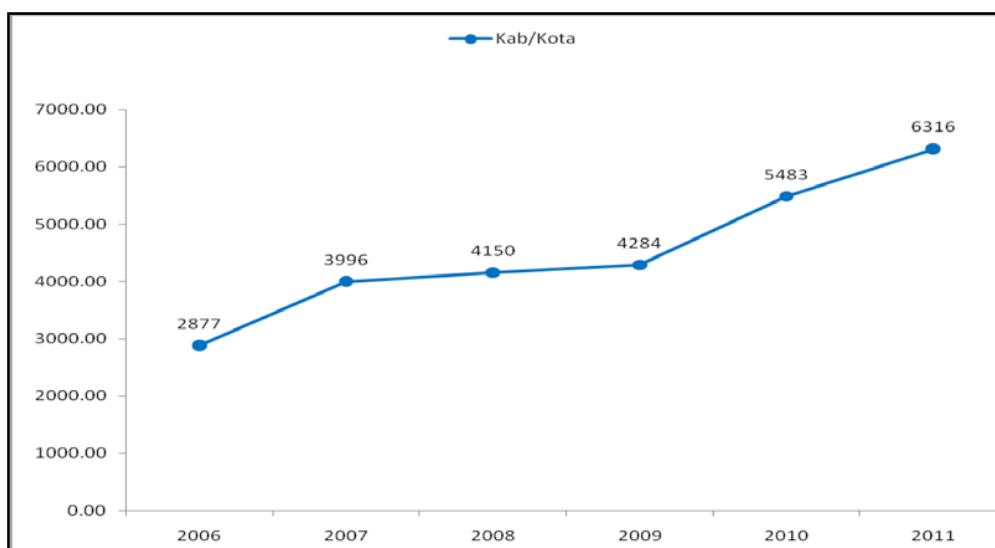
Berdasarkan data dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Konsumsi pangan utama standarnya adalah 126 kg/kapita/tahun, sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari perhitungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah 339.37 kg/kapita/tahun. Nilai ketersediaan pangan utama ini tinggi karena dihitung berdasarkan produksi beras dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Sedangkan seperti diketahui produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu surplus dan cenderung meningkat setiap tahunnya, sehingga wajar jika

nilainya tinggi. Namun perlu diingat bahwa nilai ini hanya untuk ketersediaan pangan, sedangkan akses untuk mendapatkannya dan daya beli masyarakat belum diperhitungkan. Padahal hal ini penting untuk mengetahui keadaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya, terutama pangan.

Adapun untuk harga beras, berdasarkan perkembangan antar waktu, harga beras dengan kualitas medium di Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2.21). Terjadi peningkatan harga beras yang cukup tajam dari tahun 2009 sampai 2011. Harga beras yang terlalu mahal dapat menjadi beban bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan daya beli. Peningkatan harga beras ini sesuai dengan harga pasar. Harga beras yang tinggi di satu sisi menguntungkan petani karena berarti harga gabahnya juga tinggi, namun di sisi lain memberatkan masyarakat yang mempunyai daya beli rendah. Jika dilihat efektifitas capaian program/kegiatan, harga beras tidak bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan.

Salah satu masalah yang perlu dicatat pada urusan ini adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pangan bergizi. Untuk itu perlu banyak dilakukan penyuluhan tentang pangan dan gizi oleh SKPD-SKPD terkait, karena ketersediaan saja tidak cukup tanpa pengetahuan tentang pangan dan gizi itu sendiri.

Gambar 2.21.
Perkembangan Harga Beras (Rp) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2006-2011



Sumber : Dinas Pertanian TPH, 2012

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan perindustrian, meskipun urusan pilihan lainnya juga dilaksanakan, namun tidak menonjol.

a. Pertanian

Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Hulu Sungai Utara sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Jumlah Luas Panen Komoditas Pertanian Tahun 2007-2011 (Ha)

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Padi	27,857	28.629	29.833	8.137	29.242
2.	Jagung	243	291	612	232	397
3.	Ubi kayu	49	39	56	58	38
4.	Ubi Jalar	146	122	116	138	129
5.	Kacang Tanah	795	755	795	16	340
6.	Kedelai	52	60	46	8	-
7.	Kacang Hijau	14	27	17	6	7

Sumber Data : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas panen padi memiliki trend yang menaik dari tahun 2007 sampai tahun 2009, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Untuk tahun 2011 luas panen kembali meningkat menjadi sebesar 29.242 Ha. Dengan demikian apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luasan panen padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian.

Tanaman palawija yang terdiri dari kacang tanah, jagung, Ubi jalar, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau pada umumnya ditanam setelah musim panen padi atau saat air sawah kering, sehingga tanah dapat menunjang sistem perakaran yang tidak tahan genangan. Luas panen tanaman palawija secara umum fluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen terbesar setelah padi adalah kacang tanah dan jagung.

Adapun untuk produksi tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.44. Produksi tertinggi didominasi oleh padi sebesar 174,842 ton pada tahun 2009, akan tetapi terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2010 sebesar 25,09%, dan pada tahun 2011 kembali terjadi peningkatan produksi sebesar 349,42% dari tahun 2010. Produksi padi kembali meningkat di tahun 2011 menjadi 153,313 ton, hal ini terkait dengan luasan tanam padi di tahun tersebut yang juga meningkat. Selain tanaman padi, produksi tanaman lain yang cukup tinggi produksinya adalah jagung dan kacang tanah. Ketersediaan produksi tanaman pangan didaerah berkaitan erat dengan ketahanan pangan disuatu daerah/wilayah. Dari data produksi padi tersebut Kabupaten Hulu Sungai Utara dinyatakan surplus, artinya ketahanan pangan di daerah terjaga.

Tabel 2.44.
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2007-2011 (Ton)

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Padi	166,229	161,343	174,842	43,876	153,313
2.	Jagung	419	802	1,791	630	972
3.	Ubi kayu	697	553	771	801	515
4.	Ubi Jalar	1,812	1,382	1,257	1,518	1,448
5.	Kacang Tanah	938	877	977	19	400
6.	Kedelai	64	67	55	10	0
7.	Kacang Hijau	14	29	19	6	7

Sumber Data : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peternakan

Sub sektor pertanian yang lain adalah peternakan. Bila dilihat tren perkembangannya, populasi ternak besar terlihat meningkat dari tahun 2007 hingga 2010, namun rata-rata mengalami penurunan populasi pada tahun 2011 (Tabel 2.45). Populasi ternak sapi pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ternak sapi yang keluar daerah dan pemotongan betina produktif untuk mencukupi kebutuhan daging karena kurangnya sapi jantan yang siap potong, sementara permintaan daging terus meningkat dan pemasukan sapi kurang. Untuk ternak kerbau di tahun 2011 mengalami penurunan disebabkan karena banyaknya perkawinan *inbreeding* (perkawinan sedarah), sehingga produktivitas kerbau mengalami penurunan. Selain itu juga disebabkan oleh berkurangnya lahan penggembalaan kerbau karena aktivitas pertanian (adanya perebutan lahan peruntukan penggembalaan dan pertanian). Untuk ternak kambing dan domba terjadi penurunan di tahun 2011 disebabkan oleh banyaknya ternak yang terjangkit penyakit dan kondisi geografis yang tidak cocok untuk ternak kambing dan domba.

Adapun untuk populasi unggas terlihat memiliki tren peningkatan populasi dari tahun ke tahun, kecuali ayam buras yang populasinya menurun pada tahun 2011. Populasi ternak terbesar adalah dari kelompok unggas, terutama itik, yang artinya usaha ini cukup diminati oleh masyarakat untuk dijadikan ladang usaha. Sedangkan pada ternak besar, populasi terbanyak adalah kerbau. Kedua jenis ternak ini (itik dan kerbau) merupakan plasma nutfah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah diusahakan masyarakat secara turun temurun.

Tabel 2.45.
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2007-2010 (Ekor)

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Sapi	1.218	1.237	1.281	1.309	659
2.	Kerbau	8.027	8.393	8.599	8.686	7.813
3.	Kambing	2.636	2.650	2.810	2.883	2.477
4.	Domba	318	306	312	310	254
5.	Ayam Ras	679.887	685.835	703.591	708.369	762.332
6.	Ayam Buras	964.778	973.040	1.005.787	1.018.815	713.171
7.	Itik	-	1.216.917	1.254.252	1.280.591	1.339.202

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perkembangan produktivitas ternak, berjalan sesuai dengan perkembangan populasi ternak. Angka pemotongan sapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh tingginya kebutuhan daging masyarakat Hulu Sungai Utara. Sapi yang dipotong kebanyakan berasal dari luar daerah sehingga tidak menambah populasi sapi. Untuk ternak kambing mengalami penurunan disebabkan populasi ternak kambing yang mengalami penurunan. Produksi telur itik mengalami peningkatan disebabkan bertambahnya populasi ternak itik sedangkan telur ayam buras mengalami penurunan disebabkan banyaknya permintaan luar daerah, hal yang sama juga terjadi pada produksi daging unggas.

Melihat produksi peternakan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama itik alabio sebagai plasma nutfah daerah, perlu adanya terobosan dan perhatian oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk, terutama dari sisi pengolahan hasil yang belum banyak yang dilakukan.

Tabel 2.46.
Perkembangan Produksi Ternak Tahun 2007-2010

No.	Uraian	TAHUN				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pemotongan Sapi /th(Ekor)	937	1.247	1.571	1.903	1.938
2.	Produksi daging Kambing (ton)	7.028	6.443	8.489	10.527	8.909
3.	Produksi Domba (ton)	1.067	1.113	1.218	1.362	-
4.	Produksi telur (Kg) :					
5.	Ayam Buras	796.468	852.381	883.706	902.730	583.504
6.	Itik	6.214.529	6.786.352	6.957.575	7.600.995	7.721.964
7.	Produksi Daging Ayam (ton)					
	Ayam Ras Pedaging	257.457	291.240	344.764	356.042	586.250
	Ayam Buras	181.073	211.345	293.354	295.108	110.767
	Itik	239.752	243.28	271.151	291.170	303.974
8.	Jumlah Peternak (Orang) :					
	Sapi	-	392	150	403	396
	Kerbau	-	318	542	296	296
	- Kambing	-	466	88	693	571
	- Domba	-	56	7	70	66
	- Itik	14.100	14.193	14.297	14.426	
	- Ayam Pedaging	792	860	1.140	1.615	

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara

b. Kehutanan

Hutan mempunyai peranan penting untuk stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Hutan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luasan 47,42% dari wilayah daerah atau sebesar 41.934 Ha. Dalam rangka memberdayakan potensi daerah untuk pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka potensi lahan yang ada hendaknya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sebagian wilayah HPK diusulkan untuk dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Namun dalam pemanfaatannya harus tetap memperhatikan lingkungan agar keberlanjutannya tetap terjaga.

c. **Pariwisata**

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Dari tahun 2007-2011 obyek wisata yang jumlahnya mengalami kenaikan hanya pada obyek wisata buatan , tetapi obyek wisata alam dan rekreasi budaya masih tetap. Obyek wisata alam yaitu Lomba Kerbau Rawa, yang sekarang seakan mati suri hingga perlu dihidupkan kembali atau dengan bentuk kegiatan lain yang masih berkaitan dengan kerbau rawa dan alam rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu kerajinan anyaman dan pasar kerajinannya yang hanya ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga bisa menjadi daya tarik kepariwisataan yang dapat meningkatkan perekomian daerah dan pendapatan masyarakat secara langsung.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih belum memadai. Selain itu penggalian potensi-potensi kepariwisataan perlu ditingkatkan yang mencirikan alam rawa dan budaya daerah, serta memperhatikan kearifan lokal.

Tabel 2.47.

Obyek Wisata Tahun 2007-2011 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Obyek Wisata Alam	1	1	1	1	1
2	Obyek Wisata Buatan	10	11	13	13	13
3	Tempat Hiburan/Rekreasi Budaya	7	7	7	7	7
	Jumlah	18	19	19	21	21

Sumber data : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2012

d. **Kelautan dan Perikanan**

Untuk sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dominan adalah perikanan umum, dimana kegiatan perikanan tersebut didukung oleh kondisi daerah yang merupakan rawa. Berdasarkan Tabel 2.48 produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan rawa dan sungai, dari data 5 tahun terakhir cenderung turun disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang mengganggu kelestarian sumberdaya perikanan di perairan. Untuk mempertahankan produksi penangkapan di perairan umum (rawa/sungai) maka perlu adanya upaya yang nyata dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara yang hidup ditengah rawa sangat tergantung dengan sumberdaya alam yang ada di rawa.

Untuk produksi perikanan budidaya cenderung naik dalam kurun 5 tahun terakhir, artinya usaha perikanan budidaya memberikan kontribusi pendapatan yang positif pada petani ikan. Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan

kondisi daerah yang berupa rawa perlu upaya yang lebih dari pemerintah baik itu dari aspek hulu sampai dengan hilirnya, agar dapat memberikan kontribusi ekonomi secara luas.

Tabel 2.48.
Produksi, Tingkat Konsumsi Dan Jumlah Petani Ikan Th. 2007-2010

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	12.858,10	12.891,10	12.514,70	12.505,00	12.365,60
2.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.314,80	1.344,20	1.413,00	2.333,10	6.269,30
3.	Nelayan Perairan Umum (Orang)	53.355	53.355	51.935	51.935	51.935
4.	Petani Ikan (Orang)	2.364	2.489	2.489	1.416	2.361
5.	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/th)	39,00	39,00	39,00	41,80	41,80

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun jumlah nelayan perairan umum sebanyak 53.355 orang tahun 2007 dan menurun menjadi 51.935 orang di tahun 2009 hingga sekarang. Dengan jumlah nelayan perairan umum (rawa) di daerah yang cukup besar, artinya banyak masyarakat yang hidupnya sangat tergantung pada kemakmuran rawa secara langsung, dan kemakmuran rawa sangat menentukan kemakmuran masyarakat nelayan.

Berdasarkan data yang ada, konsumsi ikan perkapita berkisar di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 39,00-41,80 Kg/tahun. Nilai ini bila dibandingkan dengan konsumsi ikan perkapita Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 (42,30 Kg/tahun) masih berada di bawah. Akan tetapi bila dibandingkan konsumsi ikan perkapita nasional yang sebesar 30,0 Kg/tahun menunjukkan bahwa konsumsi ikan perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh berada di atasnya.

e. Perindustrian

Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan ekspor guna menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta mengembangkan kemampuan teknologi.

Bila dilihat dari unit usaha formal dan non formal menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar dengan jumlah mencapai 20.658 unit (Tabel 2.49). Kelompok industri terbesar berikutnya adalah industri pangan sebanyak 2.543 unit dan industri sandang sebanyak 1.076 unit. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kerajinan yang bersifat non formal. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Tabel 2.49.
Jumlah Unit Usaha Formal Non Formal Menurut Kelompok Industri
Tahun 2011

No	Kelompok industri	Formal	Non formal	Jumlah
1	Industri Pangan	2	2.543	2.545
2	Industri Sandang	-	1.076	1.076
3	Industri Kimia Bahan Bangunan	-	122	122
4	Industri Logam	-	814	814
5	Industri Kerajinan	-	20.658	20.658
	Total	2	25.213	25.215

Sumber Data : Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2012

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB kabupaten. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/ angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Selama periode 2006-2010 rasio konsumsi rumah tangga perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar antara 4,28-8,62 per tahun. Dari tabel diatas terlihat adanya perkembangan rasio tertinggi angka konsumsi rumah tangga perkapita terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 8,62.

Tabel 2.50.
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2006-2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Total Pengeluaran RT	219,506	240,799	462,773	376,435	456,907
2	Jumlah RT	51,251	51,582	53,679	54,976	53,742
3	Rasio (1/2)	4,28	4,67	8,62	6,85	8,5

Sumber Data : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (diolah)

b. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur tingkat kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani untuk produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih dari 100 artinya apa yang didapatkan petani dari hasil usahanya lebih besar dibandingkan segala kebutuhan yang harus dikeluarkannya.

Tabel 2.51.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008-2011

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)	112,67	125,24	135,98	142,35
2	Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	117,69	119,55	126,43	131,49
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,73	104,76	108,07	108,26

Sumber Data : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari Tabel 2.51 diatas terlihat adanya kenaikan rasio yang diterima petani, walaupun kenaikan tersebut tidak begitu besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, NTP kurang dari 100, yang artinya petani masih belum bisa memenuhi kebutuhannya dari hasil usaha tani yang dilakukan. Pada tahun berikutnya NTP telah lebih dari 100, dimana petani telah dapat keuntungan meskipun masih kecil. Dari nilai NTP tersebut keuntungan yang diterima petani masih perlu ditingkatkan, karena dengan nilai tersebut keuntungan yang diterima oleh petani atas usaha yang mereka lakukan dinilai masih kecil. Dengan melihat rendahnya nilai tukar petani tersebut, maka diperlukan perhatian pemerintah baik dari segi teknologi, sarana dan prasarana, dan upaya pemasaran untuk meningkatkan nilai jual komoditas yang dihasilkan oleh petani dalam upaya meningkatkan pendapatan petani.

c. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Umumnya, pada rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi, porsi konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi makanan dan non makanan. Dengan demikian porsi konsumsi makanan dan non makanan menggambarkan kesejahteraan penduduk atau rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan) dipakai untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita didapatkan dari proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap pengeluaran.

Tabel 2.52.
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Total pengeluaran RT non pangan	32,73	44,52	33,23	34,28	39,21
2	Total pengeluaran	100	100	100	100	100
3	Rasio	0,33	0,45	0,33	0,34	0,39

Sumber Data : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (diolah)

Pada Tabel 2.52 diatas terlihat persentase konsumsi RT Non-Pangan pada tahun 2007 sebesar 0,33% kemudian naik menjadi 0,45% pada tahun 2008 kemudian turun kembali pada tahun 2009 sebesar 0,33% pada tahun berikutnya naiknya tidak terlalu significant yaitu menjadi 0,34% tahun 2010 dan 0,39% tahun 2011. Dengan melihat data diatas tergambar bahwa pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat dari tahun 2006-2010 di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami banyak perubahan. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum alokasi pengeluaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk pangan tinggi dan alokasi pengeluaran untuk non pangan masih rendah, artinya tingkat kesejahteraan penduduk/rumah tangga masih rendah.

d. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor perangkat kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Tabel 2.53.
Produktivitas Total Daerah Sektor Primer, Sekunder dan Tersier

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Primer (A)	6,00	6,65	7,02	7,03	12,22
2.	Sekunder (M)	5,61	6,27	6,57	6,91	5,30
3.	Tersier (S)	10,29	10,21	10,73	11,55	10,10

Keterangan :

A : Agriculture (Pertanian)

M : Manufacture (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, Air dan Bangunan/Konstruksi)

S : Service (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan)

Dilihat dari persentasi produktivitas total daerah di sektor primer (A) mengalami kenaikan dari tahun 2007-2011, kenaikan significant terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2011, yaitu dari 7,03 menjadi 12,22. Sedangkan pada sektor Sekunder (M) dari tahun 2007 s/d 2010 trendnya meningkat kemudian turun pada tahun 2011, hal ini dipengaruhi oleh turunnya industri pengolahan disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku dan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor tersier. Trend kenaikan sektor tersier fluktuatif. Oleh karena itu perlunya sinergi dari semua sektor primer,tersier dan sekunder untuk meningkatkan produktivitas total daerah.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastruktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten.

a. Aksesibilitas Daerah

Dari sisi transportasi, sesuai kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari transportasi darat dan transportasi sungai. Kedua sistem transportasi tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam melayani pergerakan di dalam wilayah maupun dari dan keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Transportasi sungai sangat vital dalam melayani wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan transportasi darat dan wilayah-wilayah perairan/rawa.

Dari sisi transportasi jalan raya, Akses dari dan ke wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan jaringan transportasi darat dapat dilalui dari empat arah yaitu; (1) dari arah Utara yang merupakan lalu-lintas dari Kota Tanjung dan wilayah sekitarnya; (2) dari arah Timur yang merupakan lalu-lintas dari Kota Paringin dan wilayah sekitarnya; (3) dari arah Selatan yang merupakan lalu-lintas dari Kota Banjarmasin dan wilayah sekitarnya; dan (4) dari arah Barat yang merupakan lalu-lintas dari arah Telaga Silaba dan wilayah sekitarnya.

Adapun panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2010 hingga tahun 2012 relatif stagnan yakni sepanjang 386.539 km, terdiri dari jalan Negara sepanjang 28.450 km, jalan Propinsi sepanjang 24.000 km, sisanya sepanjang 334.089 km merupakan jalan Kabupaten. Dan saat ini kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik justru mengalami penurunan dengan jumlah jaringan jalan yang mengalami kerusakan lebih dari 50% dari total panjang jalan yang ada.

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek (Tabel 2.54). Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terdapat terminal tipe B dan tipe C.

Tabel 2.54.
Trayek Angkutan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

Trayek Angkutan Umum	Jumlah Armada
Antarkota antar provinsi (AKAP)	
Amuntai-Buntok (Kalimantan Tengah)	24 buah
Amuntai-Muara Teweh(Kalimantan Tengah)	7 buah
Amuntai-Grogot (Kalimantan Timur)	15 buah
Amuntai-Balikpapan-Samarinda (Kalimantan Timur)	12 buah
Antarkota dalam provinsi (AKDP)	
Amuntai-Banjarmasin	232 buah

Trayek Angkutan Umum	Jumlah Armada
Amuntai-Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah)	95 buah
Amuntai-Tanjung (Kabupaten Tabalong)	28 buah
Amuntai-Paringin (Kabupaten Balangan)	60 buah
Angkutan perdesaan	
Amuntai-Danau Panggang	40 buah
Amuntai-Babirik	25 buah
Amuntai-Alabio	17 buah
Jumlah	555 buah

Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo, 2009

Terminal Tipe B adalah Terminal Banua Lima, melayani transportasi antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi meliputi :

1. Banjarmasin-Amuntai-Kalimantan Tengah, melalui Pantai Hambawang-Amuntai-Kelua-Pasar Panas (Perbatasan Kalimantan Tengah)
2. Banjarmasin-Amuntai-Kalimantan Tengah melalui Nagara dan Babirik, melewati jalan provinsi.

Terminal tipe C di Kabupaten Hulu Sungai Utara melayani trayek :

1. Kota Amuntai-Lampihong-melewati jalan arteri sekunder
2. Amuntai-Alabio-Danau Panggang-melewati jalan arteri sekunder
3. Amuntai-Alabio-Babirik-melewati jalan kolektor primer
4. Amuntai-Banjang-melewati jalan kolektor sekunder

Jaringan pelayanan berupa trayek yang menghubungkan asal dan tujuan pengguna angkutan umum. Ditinjau dari sisi ini belum seluruh asal tujuan pengguna angkutan umum di Hulu Sungai Utara terlayani secara langsung tanpa melalui perpindahan lebih dari dua moda, atau bahkan belum terlayani sama sekali. Di sisi lain jaringan trayek yang ada belum tertata dalam suatu jaringan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi.

Terminal angkutan umum yang ada dari sisi prasarana pada umumnya sudah cukup memadai, tetapi secara fungsional pada umumnya belum difungsikan secara maksimal sebagai simpul-simpul jaringan pelayanan angkutan umum dan tempat bertemunya pengguna angkutan umum dan angkutan umum itu sendiri.

Dalam transportasi sungai dan rawa, sungai dimanfaatkan secara alami sebagai jalur pelayaran, sedangkan sarana yang dipakai untuk aktivitas transportasi sungai meliputi jukung, motor tempel, motor boat, kelotok, dan long boat. Revitalisasi peran transportasi sungai diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap wilayah yang belum terjangkau transportasi darat, selain itu bersama transportasi darat membentuk sistem transportasi secara terpadu. Untuk menunjang kelancaran arus transportasi sungai, maka jalur pelayaran yang dilalui oleh sarana angkutan sungai dilengkapi oleh rambu-rambu lalu-lintas sungai. Prasarana ini diletakkan dipinggir sungai dan mudah dibaca oleh para pengguna transportasi sungai.

Prasarana lainnya yang sangat vital dalam perangkutan sungai dan rawa adalah pelabuhan sungai. Pelabuhan sungai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

- Pelabuhan Danau Panggang
- Pelabuhan Babirik

- Pelabuhan Sungai Pandan (Alabio)
- Pelabuhan Muara Tapus
- Pelabuhan Negara
- Pelabuhan Amuntai.

Pemeliharaan prasarana jalur dilakukan dengan melakukan pengerukan pada alur sungai/rawa dan dermaga. Pengerukan alur sungai dan ketersediaan pelabuhan sangat diperlukan dalam memperlancar arus transportasi sungai, tetapi kondisi saat ini menunjukkan kapasitas perawatan yang kurang memadai. Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan sangat mengganggu kelancaran angkutan sungai dan rawa yang pada akhirnya akan berdampak pada aktivitas wilayah-wilayah perairan dan rawa.

b. Penataan Wilayah

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 26 tahun 2007 yang menggantikan Undang-undang no 24 tahun 2002 tentang Penataan Ruang, dimana setiap Kabupaten diwajibkan menyusun RTRW Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang terbaru tersebut dan menetapkannya menjadi Perda maksimal 3 tahun setelah UU tersebut keluar. Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri sejak tahun 2005 tidak mempunyai Perda tentang RTRW Kabupaten, hal ini disebabkan Perda No 5 tahun 1995 tentang RTRW Kabupaten sudah habis masa berlakunya yaitu selama 10 tahun. Sehingga dari tahun 2005 sampai sekarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mempunyai arahan perencanaan struktur dan pola ruang. Hal ini jugalah yang menyebabkan rendahnya ketaatan terhadap RTRW Kabupaten.

Untuk mengatasi hal tersebut, dari tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berusaha menetapkan Perda RTRW Kabupaten yang sesuai dengan UU 26 tahun 2007. Proses penetapan ini sangat panjang mulai dari pembahasan di Kabupaten, kabupaten berbatasan, Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Pusat. Pada akhir tahun 2012 Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mempunyai Perda RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032.

Untuk pengembangan wilayah perkotaan direncanakan untuk pembangunan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kota Amuntai yang merupakan kawasan perkotaan harusnya juga sesuai dengan definisi diatas. Namun terdapat beberapa permasalahan keruangan di Kota Amuntai antara lain :

- Bencana banjir yang melanda Kota Amuntai hampir tiap tahun merupakan salah satu penyebab perlunya pengembangan wilayah Kota Amuntai
- Banjir mengganggu fungsi Kota Amuntai sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- Tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang terus meningkat memerlukan upaya pengembangan permukiman dan perumahan yang layak dalam rangka

permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur serta penyebaran atau pendistribusian penduduk yang rasional.

- Terlalu terpusatnya seluruh kegiatan di Kota Amuntai menyebabkan stagnansi dalam pertumbuhannya.
- Adanya rencana pembangunan fasilitas-fasilitas strategis seperti perkantoran dan infrastruktur yang baru, yaitu pembangunan Kantor DPRD, pembangunan pasar serta fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas pendidikan (sekolah).
- Penetapan Kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Perkotaan Amuntai.

Adanya beberapa permasalahan dan kebijakan terkait Kota Amuntai tersebut, sehingga diperlukan pengembangan Kota Amuntai agar pembangunan Kota Amuntai lebih terarah. Pengembangan Kawasan ini memerlukan skenario yang meliputi berbagai aspek perencanaan yang dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan secara bertahap. Dengan keterpaduan ini diharapkan pengembangan wilayah ini dapat terselenggara dengan lebih terkoordinasi serta berjalan secara sinergis dengan pengembangan bagian-bagian lain dari kawasan perkotaan Amuntai.

c. Fasilitas Bank dan Non Bank

Berdasarkan Data BI, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Jumlah Bank yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan bulan Agustus 2012 berjumlah 22 kantor. Jumlah Bank tersebut komposisinya terdiri dari Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, BPR Konvensional dan BPR Syariah. Ini menunjukkan perkembangan perbankan di kabupaten Hulu sungai Utara cukup menggembirakan khususnya Bank Umum Konvensional dan Syariah seperti Bank Danamon Simpan Pinjam, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Mega, BTPN, dan Bank mandiri Syariah. Segmentasi Pasar bagi bank-bank ini terutama pada sektor perdagangan.

d. Ketersediaan Air Bersih

Cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini telah mencapai 95.695 jiwa atau 44.60% dari total jumlah penduduk sebanyak 214.552 jiwa pada tahun 2010. Wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 11 (sebelas) unit bangunan IPAM yang tersebar di setiap kecamatan. Untuk cakupan pelayanan air minum PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara per masing-masing IKK berdasarkan jumlah pelanggan pada Tahun 2010 terbanyak adalah BNA Amuntai. Jumlah pelanggan BNA Amuntai sebagai ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 8.456 jiwa atau sekitar 76% dari total pelanggan. Berikut ini adalah jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2010.

Tabel 2.55.

Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

IKK	Jumlah Pelanggan Sambungan Rumah		Jumlah Pelanggan Hidran Umum		Total Pelanggan (Orang)
	Unit	Orang	Unit	Orang	
BNA Amuntai	12.924	64.620	80	8.000	72.620
IKK Alabio	920	4.600	14	1.400	6.000
IKK Danau Panggang	397	1.985	9	900	2.885
IKK Babirik	378	1.890	16	1.600	3.490
IKK Rantau Bujur	702	3.510	24	2.400	5.910
IKK Banjarang	255	1.275	5	500	1.775
IKK Muara Tapus	378	1.890	10	1.000	2.890
IKK Paminggir	50	125	0	0	125
IKK Sungai Tabukan	0	0	0	0	0
Jumlah	16.004		158		95.695

Sumber : PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Keterangan : 1 Unit Sambungan Rumah melayani 5 orang; 1 Unit Hidran Umum melayani 100 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak dilayani PDAM, memperoleh air bersihnya dari sumur bor dan sumur gali yang dibangun oleh pemerintah daerah ataupun dikelola oleh masyarakat setempat. Air bersih yang dihasilkan dari sumur gali atau sumur bor pada umumnya mempunyai kualitas yang cukup baik sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakat yang tinggal di daerah sepanjang sungai masih banyak menggunakan air sungai untuk keperluan rumah tangga dengan cara cukup diendapkan saja.

Cakupan pelayanan untuk sistem pelayanan non perpipaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mencapai sekitar 3000 KK. Adapun sebaran lokasi sumur bor sebanyak 350 unit di 10 (sepuluh) kecamatan. Sarana dan prasarana air bersih non perpipaan yang digunakan masyarakat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari Sumur Pompa Tangan (SPT), Sumur Pompa Dalam Listrik (SPDL).

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal pelayanan air bersih pedesaan adalah Pansimas. Program Pansimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Adapun jumlah penduduk yang terlayani sarana air bersih di Kabupaten Hulu sungai Utara di masing-masing kecamatan sebagian besar sudah diatas 50%, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Pelayanan Air Bersih Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jumlah Sarana	jiwa	% Terlayani
1	Amuntai Tengah (Sungai Karias dan Sungai Malang)	46891	6.939	38393	81,87
2	Amuntai Utara (Sungai Turak dan Guntung)	20773	1206	12463	59,99
3	Haur Gading	15109	1195	8161	54,01
4	Amuntai Selatan	26997	2441	17581	65,12
5	Babirik	19325	426	8423	43,58
6	Daun Panggang	21541	2777	15310	71,07
7	Paminggir	7717	90	2190	28,37
8	Sungai Pandan	26200	2226	13637	52,04
9	Sungai Tabukan	14470	1323	8394	58,00
10	Banjang	15529	1185	9970	64,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator yang berguna dalam menggambarkan tingkat keamanan masyarakat adalah indikator angka kriminalitas, semakin rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan. Selain itu investasi yang masuk ke suatu daerah juga bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing suatu daerah berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan di pengaruhi oleh berbagai variabel diantaranya regulasi, perbankan, stabilitas (keamanan/kriminalitas), perijinan dan hotel. Investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung tingkat resiko yang rendah (keamanan) dan iklim investasi yang kondusif diantaranya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*High Cost*).

Tabel 2.57.
Angka Kriminalitas Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2011

No	Jenis Kriminal	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah kasus narkoba	5	9	14	12	12	30
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	1	3	2	0	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	1	3	1	3	3	2
4.	Jumlah kasus penganiayaan	7	26	16	13	8	2
5.	Jumlah kasus pencurian	65	62	54	44	51	89
6.	Jumlah kasus penipuan	5	12	10	1	2	4
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	1	1	1	-
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 Th	83	114	99	76	77	128
9.	Jumlah penduduk	210.455	214.191	216.181	218.109	209.246	211.699
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,0004	0,0005	0,0004	0,0003	0,0004	0,0006

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2006-2010

Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2006 sampai dengan 2011 cukup berfluktuatif. Jika dilihat dari jumlah kasus maka pada tahun 2011 terlihat kenaikan yang cukup signifikan, terutama untuk kasus narkoba dan pencurian. Untuk itu perlu penanganan serius untuk kedua masalah ini.

Selain angka kriminalitas, jumlah demonstrasi juga berpengaruh terhadap iklim berinvestasi. Jumlah demonstrasi merupakan jumlah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah penekanan secara politik oleh kepentingan tertentu.

Tabel 2.58.
Jumlah Demo Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Bidang politik	0	0	1	1	1
2	Ekonomi	0	0	1	3	2
3	Kasus pemogokan kerja	1	1	1	1	1
4	Jumlah unjuk rasa	0	0	2	0	2

Sumber : Kab Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2006-2010

Jumlah demo di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 tidak banyak terjadi, kecuali untuk bidang ekonomi yang mengalami peningkatan dari 1 pada Tahun 2008 menjadi 3 pada Tahun 2009, kemudian terjadi penurunan menjadi 2 pada Tahun 2010.

Untuk kebijakan pajak dan retribusi, sampai dengan tahun 2012 terdapat 10 Pajak Daerah dan 31 Retribusi Daerah. Rincian pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Jenis Sumber Penerimaan
A	PAJAK DAERAH
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Galian Golongan C
7	Pajak Air Bawah Tanah
8	Pajak PBB Pedesaan / Perkotaan
9	Pajak Sarang Burung Walet
10	Pajak BPHTB
B	RETRIBUSI DAERAH
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan/ BP / RSUD Pambalah Batung
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan / Sampah
3	Retribusi Penggantian Cetak KTP, Akte catatan Sipil, leges dan kartu Keluarga
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	Retribusi Pelayanan Pasar
6	Retribusi Pasar Khusus Mebel
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Sumber Penerimaan
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9	Retribusi sewa pasar grosir / Pertokoan
10	Retribusi Petak Toko
11	Retribusi Pasar Banua Lima
12	Retribusi Terminal
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir
14	Retribusi Rumah Potong Hewan
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
16	Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha
18	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
19	Retribusi Gangguan Keamanan / HO
20	Retribusi Izin Usaha Perbengkelan
21	Retribusi Tempat Usaha Lainnya (SITU)
22	Retribusi Penerbitan SIUP / TDP
23	Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri (SIUI)/UPT
24	Retribusi Pelayanan Administrasi PerKantoran
25	Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
26	Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa
27	Retribusi tempat pengolahan rotan
28	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pernakan)
29	Retribusi Huller Gabah
30	Retribusi Pasar / Grosir/Toko PLAZA AMUNTAI
31	Retribusi penjualan Produksi Usah Daerah (Pertanian)

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan terhadap tingkat kelulusan pada S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang berusia produktif.

Tabel 2.60.
Rasio Kelulusan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	2.218	4.957	2.895	6.285	7.974
2.	Jumlah penduduk	214.191	216.181	218.109	209.246	211.699
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, dan pada tahun 2011 tingkat pendidikan mengalami peningkatan yakni dari jumlah penduduk sebanyak 211.699 orang ada 7.974 orang jumlah penduduk yang berpendidikan S1/S2/S3 atau dengan rasio sebesar 0,04. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dari tahun 2010 yang rasionya sebesar 0,03.

Tabel 2.61.
Rasio Ketergantungan Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	60.073	64.482	64.066	63.532	62.710
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	9.801	8.979	9.114	9.310	8.515
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	69.874	73.461	73.180	72.842	71.225
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	140.580	140.730	143.000	145.267	138.021
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,50	0,52	0,51	0,50	0,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk berusia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Sedangkan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap penduduk yang belum produktif dan penduduk yang berusia diatas 65 tahun dianggap sebagai penduduk yang tidak produktif.

Dari Tabel 2.61 di atas rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 berfluktuatif dari sebesar 0,50 pada tahun 2006 meningkat menjadi 0,52 pada tahun 2007 kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 0,51 pada tahun 2008 dan 0,50 di tahun 2009, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 0,52 pada tahun 2010.

Tabel 2.62.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2011)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,45
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi	
1.	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,39
2.	PDRB per kapita (berlaku) (juta rupiah)	8.387.322
3.	PDRB per kapita (konstan) (juta rupiah)	4.342.079
4.	Indeks Gini	0,20
5.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	7,31
B	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	
1.	Angka melek huruf (%)	96,02
2.	Angka rata-rata lama sekolah(%)	7,48
3.	Angka partisipasi kasar (%)	
a.	SD/MI	102,84
b.	SMP/MTs	83,81
c.	SMA/SMK/MA	70,30
4.	Angka Partisipasi Murni (%):	
a.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,85
b.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,62
c.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	46,81

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2011)
5.	Angka usia harapan hidup (tahun)	63,47
6.	Persentase balita gizi buruk (%)	5,68
C	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
1	Jumlah gedung (buah)	11
II	ASPEK PELAYANAN UMUM	
A	Fokus Layanan Urusan Wajib	
a	Pendidikan	
1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	96,02
2.	Fasilitas Pendidikan (buah)	
	a. Taman Kanak-kanak/RA	164
	b. Sekolah Dasar/MI	268
	c. SMP/MTs	61
	d. SMA/SMK/MA	27
	e. Perguruan Tinggi	4
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	71,11
4.	Angka Putus Sekolah (%):	
	a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,42
	b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	10,73
	c. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	35,80
5.	Angka Kelulusan (%):	
	a. Angka Kelulusan (AL) SD	97,5
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP	86,9
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	91,1
6.	Angka Partisipasi Sekolah (%):	
	a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	98,91
	b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	89,27
	c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	62,94
b	Kesehatan	
1.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	80,8
2.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	85,8
3.	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	79,7
4.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	51,11
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100
7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	73,5
8.	Cakupan kunjungan bayi (%)	83,46
9.	Cakupan kunjungan puskesmas (%)	78,43
10.	Cakupan kunjungan balita (%)	49,60
c	Pekerjaan Umum	
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,42
2.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	58,66
3.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	347,626
4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) (km)	122,366
d	Perumahan	
1.	Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%)	26,78
e	Perencanaan Pembangunan	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2011)
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERBUP	Ada
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Ada
f	Perhubungan	
1.	Rasio ijin trayek	0,04
2.	Jumlah Pelabuhan Sungai/Terminal Bis	14
g	Lingkungan Hidup	
1.	Persentase penanganan sampah (%)	92,55
2.	Persentase Penduduk berakses air minum/air bersih perpipaan (%)	23,95
h	Kependudukan dan catatan sipil	
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,89
2.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	100
3.	Kepemilikan KTP (%)	100
4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	100
i	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,56
j	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
1.	Cakupan peserta KB aktif (%)	76,24
2.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	38,46
k	Ketenagakerjaan	
1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,28
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	74,43
l	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
1.	Persentase koperasi aktif (%)	74,38
m	Otonomi Daerah	
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	59
2.	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	40
3.	Penduduk Miskin (%)	7,31
4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80,61
o	Pemberdayaan masyarakat dan desa	
1.	PKK aktif (%)	100
2.	Posyandu aktif (%)	100
p	Statistik	
1.	Buku "Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka"	Ada
2.	Buku "PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara"	Ada
B	Fokus Layanan Urusan Pilihan	
a	Komunikasi dan informatika	
1.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	2
2.	Jumlah surat kabar lokal	9
3.	Web site milik pemerintah daerah	1
b	Pertanian	
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	30,59
c	Pariwisata	
1.	Kontribusi sub sektor perhotelan dan restoran terhadap PDRB (%)	2,87
d	Kelautan dan perikanan	
1.	Produksi perikanan (ton)	18.634,9
e	Perdagangan	
1.	Kontribusi sub sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	14,53
f	Perindustrian	
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,95

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2011)
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	
A	Fokus Kemampuan ekonomi daerah	
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita/tahun (rupiah)	2.995.000
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita/tahun (rupiah)	787.000
B	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
1.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (%)	40,07
C	Fokus Sumberdaya Manusia	
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	3,76
2.	Rasio ketergantungan	0,54

Keterangan : Data BPS Tahun 2011

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan tekanan perlunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara secara garis besar merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka yang menjadi unit analisis adalah APBD, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJM, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada SKPD selama kurun waktu 5 tahun.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas riil yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun kedepan. Penghitungan kapasitas riil dihitung dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk dapat memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari rencana anggaran dan realisasinya, baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan data tahun 2007 s/d tahun 2011 rencana anggaran dan realisasi dapat dijelaskan melalui penghitungan kinerja pelaksanaan pendapatan, kinerja pelaksanaan belanja, kinerja pelaksanaan pembiayaan dan neraca daerah.

a. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
- b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

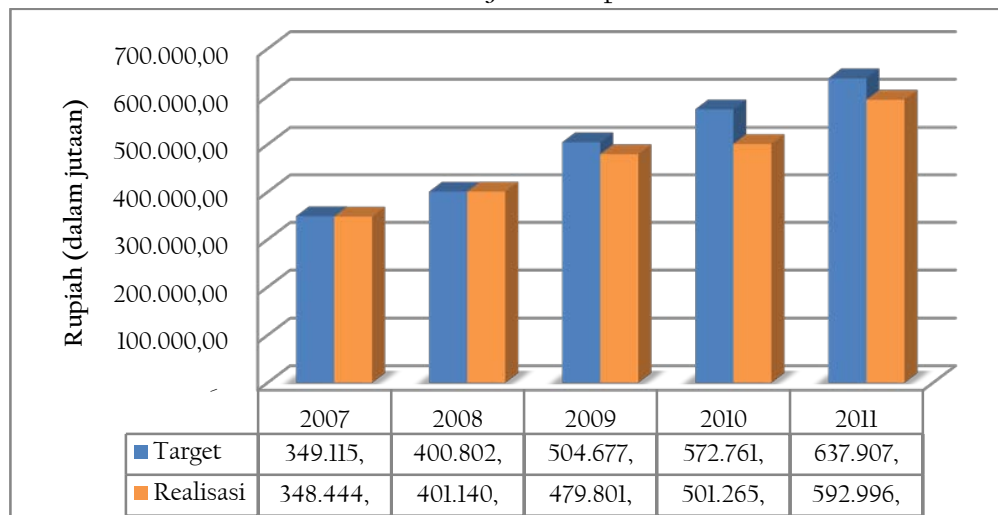
Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2007-2011 dalam Jutaan Rupiah

Pendapatan	Realisasi (dalam Jutaan Rupiah)					Pertumbuhan (%)
	2007	2008	2009	2010	2011	
Pendapatan Asli Daerah	17,727.46	22,741.20	25,495.51	25,130.99	29,271.95	13.86
Dana Perimbangan	311,593.08	353,257.45	394,871.50	383,947.65	461,116.92	10.62
Lain-lain Pendapatan yang Sah	19,124.17	25,141.59	59,434.50	92,187.05	102,607.90	58.57
Jumlah	348,444.71	401,140.23	479,801.50	501,265.69	592,996.77	14.38

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2007 sebesar Rp. 348.444.710.594,- meningkat sebesar Rp. 592.996.773.484,- pada tahun 2011. Dengan demikian, persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2007 ke tahun 2011 mencapai 14,38%.

Gambar 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011 dalam Jutaan Rupiah



Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 5 tahun (2007-2011) memiliki pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 13,86% dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata pertahun sebesar 5,20%. Kontribusi dana perimbangan terhadap APBD dalam setiap tahunnya rata-rata sebesar 82,83% dari total pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 11,97% total pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kinerja dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari indikator Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah pada tahun 2007 sebesar Rp. 17.727.456.775,- meningkat menjadi Rp. 29.271.954.163,- pada tahun 2011.

Tabel 3.2.
Capaian Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2007	21,942,249,149.00	17,727,456,775.00	80.79
2008	15,978,379,002.00	22,741,200,771.00	142.32
2009	19,088,902,551.00	25,495,508,761.00	133.56
2010	21,358,888,090.00	25,130,986,503.00	117.66
2011	26,642,958,986.00	29,271,954,163.00	109.87

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Pencapaian Pajak Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.182.607.129,- angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.905.869.484,- dengan demikian tren peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2011 mencapai 10,47% kontribusinya terhadap PAD.

Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun fluktuasi. Pada tahun 2007 retribusidaerah hanya sebesar Rp.5.798.763.036,- dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 12.962.105.328,-. Dengan demikian, peningkatan retribusi daerah dari tahun 2007-2011 rata-rata mencapai 40% kontribusinya terhadap PAD. Kinerja retribusi Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut dapat dilihat secara positif sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2007, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 2.076.610.154,- dan meningkat menjadi Rp. 5.151.569.449,- pada tahun 2011, dengan kontribusi rata-rata terhadap PAD sebesar 13,38% dari kurun waktu 2007-2011.

Adapun pencapaian dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah juga terjadi fluktuasi terhadap kontribusi kepada PAD dengan rata-rata kontribusi pertahun sebesar 36,14%. Hal ini terlihat dari peningkatan pencapaian dari tahun 2007 yang sebesar Rp. 7.946.214.101 menjadi Rp. 7.975.672.257,- pada tahun 2011.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi dana perimbangan tahun 2007 sebesar Rp. 311.593.080.089,- dan meningkat menjadi Rp.461.116.921.167,- pada tahun 2011. Capaian dari komponen dana perimbangan tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007-2012 dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2007	58,447	60,936	104.26
		2008	74,897	68,269	91.15
		2009	152,868	94,519	61.83
		2010	118,992	88,013	73.97
		2011	131,596	115,936	88.10
2	Dana Alokasi Umum	2007	218,943	218,943	100.00
		2008	244,566	244,566	100.00
		2009	248,190	248,185	100.00
		2010	251,160	251,160	100.00
		2011	318,149	304,437	95.69
3	Dana Alokasi Khusus	2007	32,043	31,714	98.97
		2008	40,026	40,422	100.99
		2009	52,168	52,167	100.00
		2010	44,775	44,775	100.00
		2011	40,752	40,744	99.98
4	Jumlah	2007	309,433	311,593	100.70
		2008	359,489	353,257	98.27
		2009	453,226	394,871	87.12
		2010	414,926	383,948	92.53
		2011	490,497	461,117	94.01

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 102.607.898.154,- jika dibandingkan pada tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 17.729.846.700,-. Termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dari Propinsi atau Pemda Lainnya, dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah serta Pendapatan Lainnya. Capaian dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2007-2011
dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	2007	58,447.00	60,935.65	104.26
		2008	74,897.24	68,269.50	91.15
		2009	152,867.71	94,519.18	61.83
		2010	118,991.93	88,013.12	73.97
		2011	131,595.89	115,936.35	88.10
2	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2007	218,943.00	218,943.00	100.00
		2008	244,565.50	244,565.50	100.00
		2009	248,190.01	248,185.32	100.00
		2010	251,160.03	251,160.03	100.00
		2011	318,149.08	304,436.67	95.69
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2007	32,043.00	31,714.43	98.97
		2008	40,026.00	40,422.45	100.99
		2009	52,168.00	52,167.00	100.00
		2010	44,774.50	44,774.50	100.00
		2011	40,751.60	40,743.90	99.98
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	2007	309,433.00	311,593.08	100.70
		2008	359,488.74	353,257.45	98.27
		2009	453,225.72	394,871.50	87.12
		2010	414,926.46	383,947.65	92.53
		2011	490,496.58	461,116.92	94.01
5	DBH SDA Pertambangan Umum dari Propinsi atau Pemda lainnya	2007	309,433.00	311,593.08	100.70
		2008	359,488.74	353,257.45	98.27
		2009	453,225.72	394,871.50	87.12
		2010	414,926.46	383,947.65	92.53
		2011	490,496.58	461,116.92	94.01
6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pemb. Daerah	2007	309,433.00	311,593.08	100.70
		2008	359,488.74	353,257.45	98.27
		2009	453,225.72	394,871.50	87.12
		2010	414,926.46	383,947.65	92.53
		2011	490,496.58	461,116.92	94.01
7	Pendapatan Lainnya	2007	309,433.00	311,593.08	100.70
		2008	359,488.74	353,257.45	98.27
		2009	453,225.72	394,871.50	87.12
		2010	414,926.46	383,947.65	92.53
		2011	490,496.58	461,116.92	94.01

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

b. Kinerja Pelaksanaan Belanja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Tabel 3.5.
Total Belanja Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2007	400,727,219,988.00	313,564,112,385.00	78.25
2008	463,619,884,436.00	382,811,963,138.00	82.57
2009	576,720,616,464.00	492,392,498,389.00	85.38
2010	625,217,786,850.00	514,514,306,104.00	82.29
2011	681,076,216,988.00	566,976,760,128.00	83.25

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Realisasi belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 rata-rata sebesar 82,35%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat penyerapan anggaran belanja daerah secara optimal. Sedangkan jika dilihat dari segi penggunaannya, maka terdapat peningkatan di setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 16,35%.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 rata-rata sebesar 86,12%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat penyerapan anggaran belanja operasi secara optimal. Sedangkan jika dilihat dari segi penggunaannya, maka terdapat peningkatan di setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,32%.

Tabel 3.6.
Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2007-2011 dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2007	173,265.96	126,168.63	72.82
		2008	192,714.59	164,754.39	85.49
		2009	207,894.82	192,163.93	92.43
		2010	250,923.26	236,577.86	94.28
		2011	317,614.79	272,977.26	85.95
2	Belanja Subsidi	2007	1,040.00	1,040.00	100.00
		2008	1,040.00	1,040.00	100.00
3	Belanja Hibah	2008	2,050.00	2,000.00	97.56
		2009	3,647.50	2,616.15	71.72
		2010	7,908.30	7,385.50	93.39
		2011	10,834.74	8,741.74	80.68
4	Belanja Bantuan Sosial	2007	18,837.86	15,927.15	84.55
		2008	13,617.17	8,951.30	65.74
		2009	12,796.08	8,765.87	68.50
		2010	13,181.08	11,160.23	84.67
		2011	10,853.42	9,672.81	89.12
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2007	9,430.58	9,023.85	95.69
		2008	15,078.33	13,938.51	92.44
		2009	15,805.06	15,070.82	95.35
		2010	16,547.06	15,811.87	95.56
		2011	16,447.06	15,713.32	95.54
6	Belanja Tidak terduga	2007	850.00	217.55	25.59
		2008	850.00	406.03	47.77
		2009	850.00	204.17	24.02
		2010	602.90	156.90	26.02
		2011	550.00	516.15	93.85
7	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2007	203,424.40	152,377.18	74.91
		2008	225,350.10	191,090.23	84.80
		2009	240,993.46	218,820.93	90.80
		2010	289,162.59	271,092.37	93.75
		2011	356,300.00	307,621.29	86.34

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 rata-rata sebesar 79,19%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat efisiensi penggunaan anggaran belanja modal. Sedangkan jika dilihat dari segi penggunaannya maka terdapat peningkatan disetiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 14,29%.

Tabel 3.7.

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2007-2011 dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2007	20,859.44	16,542.58	79.30
		2008	13,788.25	9,367.10	67.94
		2009	12,798.18	8,408.33	65.70
		2010	12,449.15	8,740.65	70.21
		2011	23,132.03	18,463.68	79.82
2	Belanja Barang dan Jasa	2007	67,983.30	54,770.26	80.56
		2008	88,515.16	66,512.62	75.14
		2009	107,196.90	80,554.98	75.15
		2010	109,431.32	86,100.22	78.68
		2011	133,366.67	111,634.53	83.70
3	Belanja Modal	2007	108,460.08	89,874.09	82.86
		2008	135,966.38	115,842.01	85.20
		2009	215,732.08	184,608.25	85.57
		2010	214,174.73	148,581.06	69.37
		2011	168,277.52	129,257.26	76.81
4	Jumlah Belanja Langsung	2007	197,302.82	161,186.94	81.70
		2008	238,269.79	191,721.73	80.46
		2009	335,727.16	273,571.57	81.49
		2010	336,055.20	243,421.94	72.44
		2011	324,776.22	259,355.47	79.86

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

c. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali atas investasi jangka panjang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah. Tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama jangka waktu 5 tahun sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan 2011 dapat mengelola pembiayaan secara efektif dan efisien sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah selama 5 tahun adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2007-2011
dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2007	8,911.74	8,911.74
		2008	8,911.74	-
		2009	7,813.05	1,698.87
		2010	5,945.66	2,027.73
		2011	3,920.80	8,917.79
2	Pencairan Dana Cadangan	2007	150.00	150.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2011	516.07	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2011	1,500.00	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2007	159.99	15.00
		2008	10,104.00	10,035.00
		2009	104.00	117.90
		2010	180.00	37.13
		2011	180.00	102.30
6	Penerimaan Kembali Atas Investasi Jangka Panjang	2011	-	59.86
7	Jumlah	2007	9,221.73	9,076.74
		2008	19,015.74	10,035.00
		2009	7,917.05	1,816.77
		2010	6,125.66	2,064.86
		2011	6,116.86	9,079.95

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2007-2011 juga sebagian besar berasal dari Silpa tahun berkenaan, sebagian lagi berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Realisasi pembiayaan netto pada tahun 2008 mengalami defisit sebesar Rp 10.996.400.000,- dan mengalami surplus tahun 2007 sebesar Rp 84.367.418.658,- tahun 2009 sebesar Rp 12.590.999.179,- tahun 2010 sebesar Rp 13.248.617.552,-serta tahun 2011 sebesar Rp 74.504.469.224,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2007-2011 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan, adapun realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2007-2011
dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi
1	Pembentukan dana cadangan	2011	10,000.00	10,000.00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2007	9,674.86	6,400.00
		2008	111,915.00	111,346.40
		2009	7,126.87	5,576.71
		2010	7,908.30	7,385.50
		2011	10,834.74	8,741.74
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2010	6,500.00	6,500.00
		2011	4,500.00	4,500.00
4	Jumlah	2007	9,430.58	9,023.85
		2008	15,078.33	13,938.51
		2009	15,805.06	15,070.82
		2010	16,547.06	15,811.87
		2011	16,447.06	15,713.32

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

d. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu tahun 2007-2011 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Neraca Tahun Anggaran 2007-2011 dalam Jutaan Rupiah

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR					
1.1.1	Kas di Daerah	109,766.80	126,371.51	109,433.01	89,130.31	100,589.44
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	9,481.22	78.61	23.09	47.58	54.46
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	141.06	61.14	70.13	2.94
1.1.4	Kas Lainnya	-	-	110.58	-	-
1.1.5	Piutang Pajak	-	-	-	203.15	219.10
1.1.6	Piutang Retribusi	-	50.96	41.30	32.39	29.21
1.1.7	Piutang Lainnya	16,885.46	30,576.12	85,231.84	1,619.32	281.69
1.1.8	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	3,220.23	-	13,935.36	12,085.34
1.1.9	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	73,533.62	71,478.19
1.1.10	Persediaan	3,115.59	-	3,635.92	5,339.82	6,649.46
	Jumlah Aset Lancar	139,249.07	160,438.50	198,536.88	183,911.69	191,389.83
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	744.18	635.15	2,832.96
1.2.2	Investasi Permanen	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25,021.06	34,001.27	29,540.44	36,040.44	46,056.42
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	25,021.06	34,001.27	30,284.62	36,675.58	48,889.37
1.3	ASET TETAP	-	-	-	-	-
1.3.1	Tanah	135,979.59	138,259.95	139,033.13	139,759.99	140,389.05
1.3.2	Peralatan dan Mesin	31,370.79	53,336.94	79,547.50	100,361.62	127,602.20
1.3.3	Gedung dan Bangunan	188,039.48	232,718.36	309,107.63	361,228.95	395,115.69
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	119,489.43	169,214.01	253,825.73	318,416.82	378,395.08
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	10,781.69	12,001.57	1,670.23	2,624.06	4,927.91
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4,609.44	3,152.29	9,199.57	8,641.71	20,322.43
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	490,270.43	608,683.12	792,383.80	931,033.15	1,066,752.35
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	10,113.10
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	10,113.10
1.5	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-
1.5.1	Tuntutan Perbendaharaan	-	622.87	612.49	596.74	586.36

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	-	68.55	85.62	92.23	87.52
1.5.3	Aset lain-lain	-	-	-	9,668.20	9,963.20
	Jumlah Aset Lainnya	-	691.43	698.11	10,357.17	10,637.07
A	JUMLAH ASET	654,540.57	803,814.31	1,021,903.40	1,161,977.59	1,327,781.72
2	KEWAJIBAN	-	-	-	-	-
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-
2.1.1	Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	2,064.32
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2.1.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	111.24	-	-
2.1.4	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	111.24	-	2,064.32
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
2.2.2	Utang Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-	-
2.2.3	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-	-	2,064.32
3	EKUITAS DANA	-	-	-	-	-
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	-	-	-	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	119,248.02	126,450.12	109,455.44	89,177.89	98,579.58
3.1.2	Penerimaan Pembiayaan	-	123.03	-	-	-
3.1.3	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	18.03	61.14	70.13	2.94
3.1.4	Cadangan Piutang	16,885.46	30,627.08	85,273.14	89,323.85	84,093.54
3.1.5	Cadangan Persediaan	3,115.59	3,220.23	3,635.92	5,339.82	6,649.46
3.1.6	Dana untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	139,249.07	160,438.50	198,425.64	183,911.69	189,325.51
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	-	-	-	-
3.2.1	Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang	25,021.06	34,001.27	30,284.62	36,675.58	48,889.37
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	490,270.43	608,683.12	792,383.80	931,033.15	1,066,752.35
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	691.43	698.11	10,357.17	10,637.07
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	515,291.50	643,375.81	823,366.52	978,065.90	1,126,278.80
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	10,113.10
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	10,113.10
	JUMLAH EKUITAS DANA	654,540.57	803,814.31	1,021,792.16	1,161,977.59	1,325,717.40
B	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	654,540.57	803,814.31	1,021,792.16	1,161,977.59	1,327,781.73

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada lima tahun terakhir yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Namun pada analisis berikut yang disajikan hanya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, sedangkan untuk rasio aktivitas tidak dianalisa karena pada nilai kewajiban neraca hanya ada pada tahun 2009 dan 2011. Adapun analisa neraca dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2007-2011 dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio lancar (current ratio)	-	-	1,784.72	-	92.71
2	Rasio quick (quick ratio)	-	-	1,752.04	-	89.49
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	-	-	-	-	-
2	Rasio hutang terhadap modal	-	-	-	-	-

Sumber : Diolah dari Data Bagian Keuangan, Setda HSU 2007-2011

Berdasarkan data neraca Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tersaji pada tabel 3.8. dan hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.9. menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas yang positif. Hal ini diperlihatkan secara rinci hasil analisis neraca keuangan sebagai berikut.

Tabel 3.12.
Hasil Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2007-2011 dalam Jutaan Rupiah

No	Indikator	Nilai	Keterangan
A	RASIO LIKUIDITAS		
1	Rasio lancar (current ratio)	>1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
2	Rasio quick (quick ratio)	>1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat
B	RASIO SOLVABILITAS		
1	Rasio total hutang terhadap total asset	>1	Mampu melunasi hutang dengan aset yang tersedia
2	Rasio hutang terhadap modal	>1	Mampu melunasi hutang dengan modal yang tersedia

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan, Setda HSU 2007-2011

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa

dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat, pencapaian visi dan misi daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah agar memperkuat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi penerimaan daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu mengembangkan kreatifitas, inisiatif, kemampuan, dan memiliki motivasi yang kuat dalam menggali potensi dan sumber-sumber baru yang ada dalam meningkatkan penerimaan asli daerah dan mengelola keuangan daerah secara optimal, efisien dan efektif dan menghindari kebocoran.
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, agar lebih dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat sasaran dan efisien.
- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga keuangan non bank milik pemerintah daerah (BUMD) yang bergerak dalam permodalan usaha mikro yang mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecil secara merata.

Arah kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah meliputi :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
- 2) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
- 3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan

bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah di danai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

- 4) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diktum keenam, yang menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang cenderung bertambah besar setiap tahunnya akan mendorong pemerintah daerah mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sepadan dengan kebutuhan daerah

Belanja daerah yang bisa dialokasikan untuk biaya program pembangunan, bantuan keuangan dan sosial, belanja bagi hasil serta belanja tidak tersangka sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib dalam bentuk gaji upah dan tunjangan PNS. Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang harus dikelola secara efisien dan efektif untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah.

Dalam lima tahun terakhir 2007-2011, proporsi anggaran belanja untuk beban wajib (Gaji upah dan tunjangan PNS) dalam APBD mengalami peningkatan. Namun karena jumlah APBD juga mengalami peningkatan, jumlah dana yang bisa diatur pengalokasiannya berdasarkan prakarsa dan kebijakan daerah sendiri mengalami peningkatan pula.

Namun demikian pembiayaan pembangunan tidaklah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah semata tanpa adanya partisipasi kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Arah pengelolaan pembiayaan ke depan diharapkan didalam pembiayaan pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulan bagi

pembiayaan pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah.

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel berikut dapat dilihat proporsi belanja anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2007-2011

Tabel 3.13.
Proporsi Belanja Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2007-2011 (%)

No	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2009	298,226,914,360.00	497,969,209,902.00	59.89%
2	Tahun Anggaran 2010	330,084,166,055.00	521,914,306,104.00	63.24%
3	Tahun Anggaran 2011	356,366,596,741.00	583,271,760,128.00	61.10%

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kelompok selanjutnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan bagi hasil Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk *blockgrant* dari Pemerintah, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah. DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana perimbangan yang penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah, misalnya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perdagangan, dan bidang infrastruktur. Ketentuan tentang DAK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Kelompok terakhir adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Propinsi, antara lain Pajak Bahan Bakar Minyak,

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Permotor, Pajak Air Bawah Tanah, dan bantuan keuangan/hibah dari Pemerintah Propinsi. Kemudian Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, yang biasanya berasal dari Pemerintah Pusat, misalnya dana insentif daerah dan dana tambahan penghasilan untuk guru.

b. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah

Perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang memperkenalkan Anggaran Berbasis Kinerja. Ketentuan tersebut diperbaiki sehingga dihasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti pedoman teknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu isi berbagai peraturan tersebut di atas, bahwa penyusunan anggaran harus berdasarkan atau berbasis kinerja. Pada struktur APBD berbasis kinerja dapat dilihat adanya ketentuan surplus dan defisit anggaran. Kemudian berbasis kinerja juga pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, setiap usulan anggaran pendapatan dan anggaran belanja harus memperhatikan kinerja *input* (masukan) yang digunakan, *output* (keluaran) yang dihasilkan dan *outcomes* (hasil) atau berfungsi *output* sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran berbasis kinerja juga memperhatikan nilai waktu dari uang (*time value of money*), yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Selain berbasis kinerja, berbagai ketentuan tersebut juga masih menerapkan anggaran berimbang, artinya surplus anggaran harus jelas digunakan untuk apa dan apabila terjadi defisit anggaran harus jelas sumber untuk menutupnya. Dalam struktur anggaran, keberimbangan diperlihatkan pada SILPA Tahun berkenaan nilainya adalah 0 (nol) Rupiah.

Adapun kebijakan pendapatan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
 - a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Pendekatan intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan nilai objek pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
 - c. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- d. Perbaikan kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
 - e. Kebijakan pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Konsep *revenue sharing* atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam :
 - a. Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi.
 - b. Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
 3. Upaya untuk memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.
 4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian kebijakan terhadap belanja daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui :

1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan penambahan formasi CPNS. PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan

- memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan pembangunan pedesaan dan peningkatan kinerja aparatur desa melalui Tunjangan Penghasilan Kepala desa dan Perangkat Desa serta kelembagaan masyarakat desa termasuk melanjutkan penyediaan bantuan keuangan pembangunan kantor desa bagi desa-desa yang dinilai memenuhi syarat.
 3. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa diarahkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
 4. Belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka pemberdayaan organisasi/kelompok/anggota masyarakat yang diarahkan pada penguatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, pembinaan kehidupan beragama yang secara signifikan mendukung pencapaian IPM serta secara teknis dilakukan melalui mekanisme pengujian atas kelayakan proposal.
 5. Belanja Subsidi diarahkan khususnya kepada lembaga pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya mengurangi biaya pendidikan siswa serta dalam rangka akselerasi pencapaian wajib belajar 9 tahun.
 6. Belanja Hibah diarahkan dalam rangka penguatan fungsi lembaga/ badan, perusahaan daerah maupun organisasi kemasyarakatan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selanjutnya kebijakan terhadap pembiayaan daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui :

1. Penerimaan Pembiayaan melalui penerimaan hasil Piutang Daerah baik piutang pajak maupun penerimaan piutang lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan melalui penyertaan modal, penanaman saham di Bank Kalsel, pembayaran hutang daerah termasuk pembiayaan belanja infrastruktur melalui anggaran kegiatan tahun jamak.
3. Pembentukan Dana Cadangan diperuntukkan bagi pembiayaan biaya pemilihan kepala daerah periode berikutnya yang dimulai pengalokasiannya pada 2 tahun anggaran sebelumnya.

Analisis pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu tahun 2007-2011 dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah yang cenderung meningkat. Secara rinci ditunjukkan secara berturut-turut pada tabel berikut.

Tabel 3.14.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2009-2011 dalam Ribuan Rupiah

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	479,801,499.20	501,265,688.55	591,051,866.48
	Dikurangi Realisasi :	-	-	-
2	Belanja Daerah	492,392,498.39	514,514,306.10	566,976,760.13
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,576,711.51	7,400,000.00	16,295,000.00
	Defisit riil	(18,167,710.69)	(20,648.617.55)	7,780,106.35

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Pada tahun 2011 Perhitungan Anggaran mengalami surplus perhitungan anggaran. Berdasarkan tabel defisit riil anggaran maka dapat dilihat komposisi penutupan riil anggaran daerah pada tabel berikut.

Tabel 3.15.
Komposisi Penutupan Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2007-2011

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	93.51%	98.20%	1146.23%
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.49%	1.80%	13.15%
3	Penerimaan Pengeluaran	100.00%	100.00%	1159.38%

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain :

- a. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara setiap tahunnya rata-rata masih diatas 50% dari total belanja daerah, sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur.
- b. Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) antara lain karena di dalam belanja tak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta belum maksimalnya sistem penganggaran dengan menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standard Pelayanan Minimum dengan penganggarnya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas;

- c. Tingginya potensi PAD yang bila dimanfaatkan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD, serta semakin terbukanya sistem perekonomian nasional untuk pengembangan perekonomian lokal di masa datang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih berpeluang diwujudkan.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan *blueprint* pembangunan saat ini dalam dimensi masa depan, mencerminkan kerangka politik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat. APBD juga merupakan alat kontrol bagi masyarakat terhadap pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara/daerah, yang pada prinsipnya merupakan uang yang rakyat. Oleh karenanya, penyusunan APBD harus memperhatikan norma dan prinsip transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektifitas anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Hal ini mengandung makna seluruh proses penyusunan anggaran semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan umum, prioritas dan penempatan alokasi anggaran, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan anggaran dilaksanakan sejak proses identifikasi masalah, yang dilakukan oleh unsur eksekutif dengan proses penjangkaran aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran dan mekanismenya maupun yang dilakukan oleh unsur legislatif. Selanjutnya partisipasi juga dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran dan pengawasannya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan selalu mengevaluasi proses partisipasi masyarakat, dalam rangka meminimalkan adanya keluhan dari masyarakat mengenai kebijakan yang dijalankan yang tidak sesuai dengan aspirasi yang disampaikan dan dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya target pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi dalam pelayanan publik.

Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi Pemerintah Kabupaten sebagai cerminan kebutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Anggaran diperlukan karena kemampuan pendapatan yang terbatas sedangkan di sisi lain kebutuhan pendanaan relatif besar, sehingga diperlukan penyusunan skala prioritas. Pada posisi penentuan skala prioritas inilah diperlukan kompetensi dan kearifan pengambil kebijakan agar skala prioritas mencerminkan kebutuhan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan dan mencerminkan tingkat urgensi atas solusi suatu masalah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka kerangka pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib, antara lain belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa. Kemudian diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar pada masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar permukiman. Pendidikan diprioritaskan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan sekaligus merintis penuntasan pendidikan 12 tahun. Kesehatan diprioritaskan untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat, khususnya penduduk miskin melalui peningkatan pelayanan puskesmas dan rumah sakit daerah. Infrastruktur dasar permukiman diprioritaskan untuk penyediaan air bersih, pembangunan saluran air limbah, dan penyehatan lingkungan permukiman. Tentunya beberapa prioritas tersebut dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs). Kemudian pemenuhan kebutuhan lainnya adalah pengembangan ekonomi lokal pada sektor yang strategis, yaitu sektor yang menjadi pendorong perekonomian daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan dan penyerapan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal diprioritaskan pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan peternakan.

Berkenaan dengan sumber pembiayaan untuk mendanai belanja wajib dan belanja investasi, sumber pendapatan yang utama adalah dari Pemerintah melalui pendapatan Dana Perimbangan dan Pemerintah Propinsi melalui pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Setelah itu pendapatan yang berasal dari PAD. Berdasarkan data-data yang ada, maka PAD masih dapat ditingkatkan baik dengan metode intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan, mereview beberapa perda yang perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah, tetapi tetap diupayakan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi sekaligus adanya insentif bagi pengusaha untuk berinvestasi. Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau oleh pelayanan, tetapi juga disertai dengan perbaikan layanan pada para pelaku ekonomi.

Sehubungan dengan analisis APBD Tahun Anggaran 2007-2011, maka selain pemenuhan kebutuhan belanja dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki struktur APBD yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta lebih realistis dalam penganggaran pendapatan maupun belanja. Pada awal tahun dan tahun-tahun berikutnya diupayakan optimalisasi

pendapatan yang sesuai dengan potensi dan rasionalisasi jenis belanja, sehingga defisit anggaran tidak melebihi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Karena menurut Kementerian Keuangan angka defisit yang melebihi Rp 100.000.000.000,- daerah dimaksud memiliki kemampuan keuangan yang lebih tinggi.

Tabel 3.16.
Kerangka Pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2013-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN	686.897.710.445	722.901.764.582	767.945.298.897	802.896.361.011	838.733.311.310	879.051.035.857
1.1	Pendapatan Asli Daerah	30.715.689.100	31.000.000.000	32.800.000.000	34.677.500.000	36.636.375.000	38.680.693.750
1.1.1	Pajak Daerah	3.347.179.300	3.616.250.000	3.797.062.500	3.986.915.625	4.186.261.406	4.395.574.477
1.1.2	Retribusi Daerah	13.624.787.550	6.144.715.150	6.451.950.908	6.774.548.453	7.113.275.876	7.468.939.669
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	6.100.000.000	5.900.000.000	6.195.000.000	6.504.750.000	6.829.987.500	7.171.486.875
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7.643.722.250	15.339.034.850	16.355.986.593	17.411.285.922	18.506.850.218	19.644.692.729
1.2	Dana Perimbangan	499.634.182.345	532.222.968.802	566.968.927.201	604.016.571.654	643.520.190.720	685.644.513.509
1.2.1	Dana bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	95.466.340.345	100.239.657.362	105.251.640.230	110.514.222.242	116.039.933.354	121.841.930.022
1.2.2	Dana Alokasi Umum	356.539.892.000	381.497.684.440	408.202.522.351	436.776.698.915	467.351.067.839	500.065.642.588
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.627.950.000	50.485.627.000	53.514.764.620	56.725.650.497	60.129.189.527	63.736.940.899
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	156.547.839.000	159.678.795.780	168.176.371.696	164.202.289.356	158.576.745.590	154.725.828.599
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	65.000.000.000	66.300.000.000	72.930.000.000	80.223.000.000	88.245.300.000	97.069.830.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	34.000.000.000	34.680.000.000	35.373.600.000	36.081.072.000	36.802.693.440	37.538.747.309
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0	0	0
1.3.6	Dana bagi hasil SDA pertambangan umum dr Propinsi atau pemerintah daerah lainnya	57.547.839.000	58.698.795.780	59.872.771.696	47.898.217.356	33.528.752.150	20.117.251.290
2	BELANJA	722.498.684.475	762.236.112.121	804.159.098.288	846.377.450.948	887.426.757.319	931.354.381.806
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	405.774.792.950	400.292.406.562	422.308.488.923	444.479.684.592	466.036.949.294	489.105.778.284
2.1.1	Belanja Pegawai	354.742.440.620	360.253.274.854	380.067.204.971	400.020.733.232	419.421.738.794	440.183.114.864
2.1.4	Belanja Hibah	22.201.952.700	5.423.060.099	5.721.328.404	6.021.698.145	6.313.750.505	6.626.281.155
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	6.000.000.000	6.330.000.000	6.662.325.000	6.985.447.763	7.331.227.427
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27.032.060.000	27.718.823.300	29.243.358.582	30.778.634.907	32.271.398.700	33.868.832.936
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.798.339.630	897.248.310	946.596.967	996.293.307	1.044.613.533	1.096.321.903
2.2	BELANJA LANGSUNG	316.723.891.525	361.943.705.559	381.850.609.365	401.897.766.356	421.389.808.025	442.248.603.522

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.2.1	Belanja Pegawai	25.471.537.550	19.872.472.115	20.965.458.082	22.066.144.631	23.136.352.645	24.281.602.101
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.808.161.820	121.037.610.720	127.694.679.310	134.398.649.973	140.916.984.497	147.892.375.230
2.2.3	Belanja Modal	163.444.192.155	221.033.622.724	233.190.471.973	245.432.971.752	257.336.470.882	270.074.626.191
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.600.974.030)	(39.334.347.539)	(36.213.799.391)	(43.481.089.937)	(48.693.446.009)	(52.303.345.949)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0	0	0
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.600.974.030	51.974.347.539	54.528.599.391	62.507.425.937	68.470.100.529	72.871.265.035
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.500.974.030	48.993.534.520	51.317.115.070	59.046.921.884	64.740.723.780	48.851.530.760
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000	2.247.000.000	2.404.290.000	2.572.590.300	2.752.671.621	2.945.358.634
3.1.7	Penerimaan Atas Investasi	667.102.744	733.813.019	807.194.321	887.913.753	976.705.128	1.074.375.641
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000	12.640.000.000	18.314.800.000	19.026.336.000	19.776.654.520	20.567.919.086
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10.500.000.000	11.025.000.000	11.576.250.000	12.155.062.500	12.762.815.625
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	2.140.000.000	2.289.800.000	2.450.086.000	2.621.592.020	2.805.103.461
	PEMBIAYAAN NETTO	35.600.974.030	39.334.347.539	36.213.799.391	43.481.089.937	48.693.446.009	52.303.345.949
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0	0	0	0	0	0

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kedepan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan kerangka pendanaan selama lima tahun tersebut, kemudian kita dapat mencari kapasitas riilnya yaitu dengan menghitung belanja wajib dan mengikat, penghitungan kapasitas riil dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Perkiraan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012-2017
dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung			297,132.04	312,612.62	328,899.73	346,035.41	364,063.86
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	280,606.06	5.21%	295,225.63	310,606.89	326,789.51	343,815.24	361,728.01
2	Belanja penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,812.00	5.21 %	1,906.41	2,005.73	2,110.23	2,220.17	2,335.84
3	Belanja Bunga							
4	Belanja Bagi Hasil							
B	Belanja Langsung			30,241.31	31,816.88	33,474.54	35,218.56	37,053.46
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	9,771.87	5.21 %	10,280.99	10,816.62	11,380.17	98,802.20	12,596.88
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2,328.50	5.21 %	2,449.81	2,577.45	2,853.02	2,853.02	3,001.91
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	16,643.39	5.21 %	17,510.51	18,442.80	19,382.63	20,392.47	21,454.91
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)							
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)							
C	Pembiayaan Pengeluaran							
1	Pembentukan Dana Cadangan				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	Pembayaran pokok utang							

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	311,161.81		327,373.34	344,429.50	362,374.27	381,253.97	401,114.30

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Dari perkiraan belanja bagi tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangandaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan (belanja pegawai) dan belanja wajib dan mengikat. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil atau dana yang tersedia setiap tahunnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendanai pembangunan.

Tabel 3.18.
Perkiraan Kapasitas Riil Tahun Anggaran 2013-2017

No	Uraian	Tahun Dasar (2012)	Proyeksi				
			Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Pendapatan	694,527	797,868	916,586	1,052,967	1,209,642	1,389,629
2	Pencairan Dana Cadangan						20,000
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	98,580	103,550	108,770	114,252	120,010	126,057
	Total penerimaan	793,107	901,418	1,025,355	1,167,220	1,329,652	1,535,686
	Dikurangi :						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	311,162	379,995	483,375	622,738	830,426	1,156,660
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	481,945	521,423	541,981	544,481	499,226	379,025

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda HSU 2007-2011

Berdasarkan perkiraan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi tentatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah tersebut kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.19.
Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran

Kelompok Prioritas	Ketentuan Umum
Prioritas I (KP I)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku. ✓ Program KP I terkait langsung dengan pelayanan ke masyarakat, harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu, KP I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prioritas II (KP II)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program KP II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan penjabaran dari analisis per urusan. ✓ KP II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
Prioritas III (KP III)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. ✓ Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS

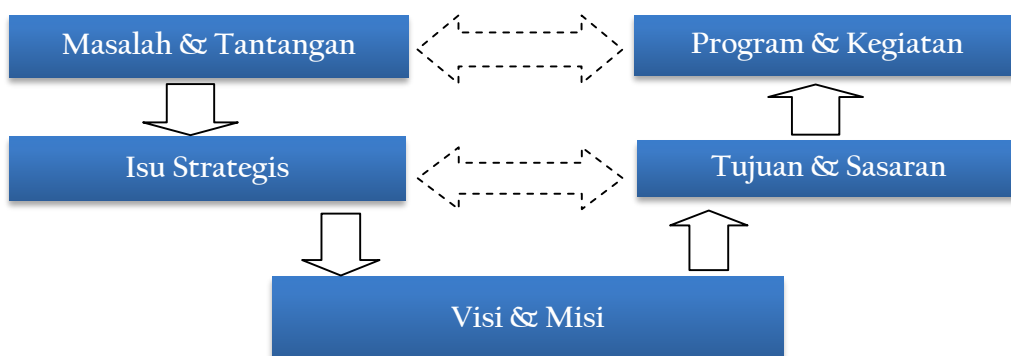
Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan yang dimaksud dengan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara ilustratif, pola hubungan antara permasalahan wilayah, isu strategis, visi dan misi hingga program dan kegiatan dapat dilihat dalam gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1.
Pola Hubungan antara Permasalahan Kabupaten Hulu



Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan perekonomian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dibagi menurut kondisi infrastruktur dan tata ruang, sosial budayserta ekonomi.

4.1.1. Aspek Infrastuktur dan Tata Ruang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup Hulu Sungai Utara adalah :

- Minimnya ketersediaan infrastruktur di Hulu Sungai Utara dan keberadaannya tidak lagi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.
- Rendahnya pelayanan infrastruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Lambatnya pertumbuhan infrastruktur di Hulu Sungai Utara
- Sulitnya pembangunan infrastruktur di Hulu Sungai Utara yang disebabkan oleh kondisi geografis Hulu Sungai Utara yang didominasi oleh lahan lebak sehingga menyebabkan biaya konstruksi yang relatif mahal.
- Sulitnya membebaskan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan faktor penghambat pengembangan infrastruktur dan daya saing daerah.
- Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur yang ada untuk memfasilitasi arus barang, jasa, dan manusia maupun finansial serta menjadi penentu bagi upaya pengurangan angka kemiskinan.
- Terbatasnya prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional sesuai standar keselamatan jalan dalam menunjang sektor riil.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Masih rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Terbatasnya kemampuan daerah dalam mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah.
- Tingginya persentase jaringan jalan berada dalam kondisi rusak ringan dan berat, pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

- Jika dilihat dari kelaikannya sebagian besar jalan raya dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan.
- Kurangnya infrastruktur untuk menunjang pertanian di Hulu Sungai Utara.
- Tingginya persentase kerusakan infrastruktur pengairan yang ada yaitu sebesar 56,94 %.
- Terbatasnya ketersediaan listrik dengan harga memadai, rasio elektrifikasi di Hulu Sungai Utara masih rendah. Pemadaman bergilir pada waktu tertentu menjadi menu harian, yang tidak saja melumpuhkan dunia usaha/industri, tetapi juga mematikan aktivitas rumah tangga.
- Tingginya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir dan dampak negatif perubahan iklim.
- Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar memerlukan penguatan para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah, pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi.
- Meningkatnya *concern* terhadap jasa konstruksi dan menguatnya tuntutan kualitas membutuhkan peningkatan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi.
- Adanya permukiman kumuh perkotaan Amuntai dari kumuh kategori rendah hingga kumuh tinggi/berat, yang memerlukan penanganan sesuai karakteristik masing-masing kategori dan masing-masing lokasi terutama permukiman yang berdiri di bantaran sungai
- Terbatasnya ketersediaan lahan bagi pengembangan perumahan dan permukiman di pusat kota Amuntai
- Terbatasnya penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka memenuhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air bersih.
- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap penyediaan air bersih. Cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini baru mencapai 95.695 jiwa atau 44,6% dari total jumlah penduduk sebanyak 214.552 jiwa pada tahun 2010
- Masih tingginya angka kebocoran PDAM di Hulu Sungai Utara.
- Meningkatnya tuntutan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis sebagai dampak meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan.
- Masih rendahnya akses pelayanan sanitasi dan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- Meningkatnya kebutuhan rumah akibat pertumbuhan keluarga baru menyebabkan terjadinya *backlog* perumahan yang cukup besar.
- Masih rendahnya keandalan bangunan terutama terhadap banjir dan kebakaran memerlukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun bangunan gedung yang diikuti dengan perhatian terhadap daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, kebakaran, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

- Belum diterapkannya konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Belum tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaitkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten.
- Belum tertatanya hirarki jaringan jalan kota Amuntai.
- Belum terpenuhinya kebutuhan jaringan jalan utama kota Amuntai yang berfungsi sebagai jalur menerus lalu-lintas antar kota, sebagai jalur utama yang menghubungkan wilayah-wilayah perkotaan strategis dan sebagai salah satu upaya dalam rangka percepatan pengembangan wilayah.
- Kondisi ruas-ruas jalan utama kabupaten pada umumnya masih kurang memadai, baik ditinjau dari faktor kapasitas maupun kondisi konstruksi jalannya.
- Belum dilaksanakannya penetapan kelas jalan, penamaan, penyediaan perlengkapan jalan (rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan); alat pengawasan dan pengamanan jalan; serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas pada semua ruas jalan yang ada di Hulu Sungai Utara yang didasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum untuk mendukung kebutuhan akan pelayanan transportasi darat yang mampu menjangkau seluruh wilayah.
- Perlunya peningkatan prasarana dan fungsi terminal Banua Lima (tipe B) dan beberapa sub terminal di Hulu Sungai Utara untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- Belum tertatanya jaringan trayek angkutan sungai, danau dan rawa
- Banyaknya sungai dan panjangnya alur sungai di Hulu Sungai Utara tidak diimbangi dengan ketersediaan dermaga pelabuhan yang representatif.
- Kondisi dermaga pelabuhan di Hulu Sungai Utara yang sebagian besar sudah tidak layak sehingga menghambat kelancaran arus barang, menimbulkan inefisiensi, memicu ekonomi biaya tinggi, dan menciptakan iklim usaha tidak kondusif. Kondisi ini membuat biaya distribusi barang sangat tinggi. Harga barang di tingkat konsumen terutama pada desa-desa perairan di Kecamatan Danau Panggang dan Paminggir cukup tinggi akibat mahal biaya pengangkutan.
- Kondisi alur sungai yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan alur oleh gulma air cukup menghambat kelancaran arus lalu lintas air di Hulu Sungai Utara.
- Sistem navigasi di alur-alur pelayaran yang kurang memadai.
- Belum terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal, khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
- Belum optimalnya pemanfaatan RTRW dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
- Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
- Belum mantapnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal.
- Tingginya potensi konflik pemanfaatan ruang

- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektoral.
- Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, serta belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRW.
- Terjadinya degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang
- Belum optimalnya dukungan terhadap pengembangan wilayah yang diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan pusat-pusat kegiatan nasional dalam RTRWN seperti PKW Amuntai
- Adanya aktivitas industri di daerah hulu berupa penambangan batubara dan industri pertanian (perkebunan karet dan kelapa sawit) berpengaruh terhadap mutu air di sub DAS Tabalong dan Balangan berupa adanya sisa pestisida, peningkatan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat, amonia dan ion hidrogen dalam air yang dapat menurunkan pH serta peningkatan kadar lemak dan minyak dalam air.
- Meningkatnya zat padat tersuspensi dan terlarut serta nilai kekeruhan yang tinggi yang disebabkan oleh aktivitas negatif pertambangan dan kerusakan hutan di hulu sungai Balangan, mengakibatkan pengolahan air di PDAM Amuntai memerlukan cukup banyak tawas yang berfungsi sebagai pengikat partikel lumpur.
- Adanya masalah persampahan di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, terminal, pertokoan dan tempat-tempat lain yang padat penduduknya.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat-tempat tertentu, apalagi untuk mengolahnya.
- Kurang tersedianya tempat sampah di lokasi-lokasi padat aktivitas terbatasnya jumlah TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang kurang intensif.
- Belum optimalnya kinerja TPA regional yang berwawasan lingkungan.
- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.
- Sering terjadinya pencemaran udara yang disebabkan pembakaran sampah dan pembakaran lahan pada saat persiapan tanam serta pembakaran jerami pada saat pasca panen menimbulkan kerugian dalam bentuk gangguan kesehatan manusia.
- Berkurangnya kawasan ruang terbuka hijau atau vegetasi sebagai korban pembangunan atau pengembangan wilayah, padahal fungsi dari vegetasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga kesungaiimbangan lingkungan.
- Meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal karena mobilitas penduduk yang cepat berdampak pada peningkatan terhadap kebutuhan lingkungan untuk menunjang sarana dan prasarana wilayah sebagai akibat adanya keunggulan ekonomi di kota Amuntai yang mengundang terjadinya proses urbanisasi untuk mengejar pendapatan yang lebih baik.
- Terjadinya perubahan lingkungan karena aktifitas manusia antara lain penggunaan pestisida yang dapat menimbulkan pencemaran.
- Terjadinya perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran lahan di musim kemarau menyebabkan kerusakan dan matinya organisme di areal tersebut.

- Rendahnya tingkat kepedulian dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan.
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi kegiatan antara pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang diindikasikan belum optimalnya kinerja dan hasil-hasil upaya pengendalian dalam mencegah dan mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena terbatasnya aparat dan sistem pemantauan lingkungan.
- Masih rendahnya rasio jumlah penduduk Hulu Sungai Utara yang tersentuh jaringan telekomunikasi.
- Maraknya keberadaan menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara yang memadai untuk menjamin keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.
- Maraknya keberadaan jasa pelayanan teknologi informasi memerlukan pengaturan penyediaan ruang/lokasi dan ijin operasional untuk meminimalkan terjadinya *cultural shock* dan dampak sosial lainnya.

4.1.2. Aspek Sosial Budaya

- Masih rendahnya pencapaian IPM yaitu sebesar 69,45 urutan ke II sedangkan Kalsel sebesar 70,44 yang artinya kualitas SDM juga rendah untuk itu perlu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- Angka harapan hidup masih rendah yaitu sebesar 63,47 tahun sedangkan Kalsel 64,17 tahun.
- Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu sebesar 22 per 1000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu sebanyak 18 dari 4157 kelahiran hidup pada tahun 2012 serta masih tingginya angka kesakitan sehingga untuk kedepannya diperlukan perhatian dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam hal pemenuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai (bidan desa, dokter spesialis, dan lain lain), peningkatan pelayanan murah dan terjangkau kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan pemenuhan infrastruktur kesehatan.
- Masih tingginya jumlah bayi dan balita dengan status gizi kurang (18,96 %) dan masih adanya bayi dan balita dengan status gizi buruk (5,29 %)
- Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih terbatas
- Belum mengertinya masyarakat akan arti pentingnya jaminan sosial kesehatan
- Belum mengertinya masyarakat tentang proses dan prosedur jaminan perlindungan dan jaminan masyarakat
- Rata-rata lama sekolah hanya 7,27 tahun sedangkan kalsel 7,45 tahun, artinya rata-rata masyarakat kita hanya bersekolah sampai kelas 1 SLTP, sehingga perlu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- Angka Putus Sekolah SD/MI 0,42 %, SLTP 10,73%, SLTA 35,80 % dan APK SD/MI 02,84 %, SLTP 83,81 %, SLTA 70,30 %, sedangkan APM SD/MI 94,85 %, SLTP 68,62 %, SLTA 46,81 %. Masih rendahnya APS, APK dan APM sehingga perlu penuntasan wajar 12 tahun

- Tingginya Angka Pengangguran sebesar 5,28%, angka kriminalitas dan penduduk miskin masih banyak sehingga dipandang perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- Masih lemahnya kualitas sumber daya birokrasi
- Lemahnya koordinasi antara SKPD-SKPD di dalam mengimplementasikan program-program pembangunan
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi dan pengembangan pariwisata
- Masih lemahnya koordinasi program-program kemiskinan diberbagai sektor
- Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat

4.1.3. Aspek Perekonomian

Bidang Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi belum optimal. Menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ditahun mendatang, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkesinambungan untuk dapat secara real kemajuan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat
- Struktur Perekonomian Daerah belum kuat. Membangun struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, dimana sektor pertanian dan perdagangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien, sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas dan berkembangnya industri kecil menengah yang berdaya saing, sehingga sektor perdagangan dan jasa perannya meningkat dengan pesat sebagai mesin penggerak perekonomian Hulu Sungai Utara.
- Masalah yang dihadapi oleh produk andalan daerah adalah berupa masih rendahnya produktivitas dan mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan relatif masih rendah
- Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, mutu kemasan produk yang rendah dan belum adanya standarisasi produk.
- Terbatasnya Modal, IPTEK, informasi pasar dan promosi produk untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya untuk UKM dan Koperasi serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada sentra-sentra produksi.
- Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif (modal, iptek, bahan baku, informasi pasar dan sebagainya)
- Daya tarik bagi Investor untuk berinvestasi di daerah masih belum optimal dikarenakan ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, sumber daya alam yang masih belum terangkat dan kualitas pelayanan serta SDM yang masih rendah.

Bidang Sumber Daya Alam

- Pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
- Adanya pengaturan dan perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan.

4.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.

Isu-isu strategis di atas perlu dikorelasikan dengan isu dan kebijakan nasional maupun regional khususnya yang memberikan manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi penekanan pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan dari pusat dan provinsi. Di samping itu, sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025, RPJMD 2013-2017 ini juga harus mengacu pada arahan yang terdapat dalam RPJP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana pembangunan Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan saat ini tengah memasuki RPJM Nasional ke-2 (2010-2014) dengan penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, terdapat 11 prioritas nasional, 10 di antaranya sangat relevan dengan isu pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini yakni reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Adapun fokus perhatian Provinsi Kalimantan Selatan pada periode RPJM Provinsi 2011-2015 di antaranya adalah peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah serta pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Arahan Tahapan Ketiga RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.

Adapun arahan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tercakup dalam tahapan ketiga menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025 ditujukan untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang semakin berkualitas, terciptanya perekonomian daerah yang semakin meningkat, meningkatnya ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah, terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang semakin baik, meningkatnya kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan politik, semakin

meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup serta meningkatnya perwujudan pengelolaan sumberdaya alam dan lahan yang berkelanjutan.

Atas dasar hal tersebut di atas selanjutnya sasaran yang diinginkan adalah terciptanya perwujudan masyarakat yang sehat, semakin cerdas, semakin produktif, berakhlak mulia yang ditunjang dengan penguasaan iptek, semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, tersedianya sarana prasarana infrastruktur wilayah yang semakin baik, semakin baiknya pelayanan publik pada sektor pemerintahan, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian maka sasaran pembangunan ini dapat terlihat dari kehidupan yang semakin berkualitas; semakin meningkatnya kemakmuran masyarakat dan berbagai kebutuhan kehidupan sosial lainnya yang dapat terlayani sektor pemerintahan.

Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu dalam hal :

1. Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pemerintahan dibangun dan memperoleh legitimasi dari masyarakat dimaksudkan untuk terselenggaranya keteraturan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lainnya. Dalam pelaksanaannya fungsi-fungsi pemerintahan ini dilaksanakan oleh aparatur dan lembaga pemerintahan yang terbagi pada berbagai organisasi pemerintahan dengan pembidangan yang terspesialisasi dan bertanggungjawab atas segala pelaksanaannya.

Sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan sejak era reformasi dimana telah diberikan status daerah otonom secara luas bagi daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola dan mengatur berbagai urusan pemerintahan yang ada di masing-masing daerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di daerah bagaimana melaksanakan pemerintahan yang otonom dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, yang dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi rakyatnya masing-masing.

Berbagai kemajuan yang terjadi pada era globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat dan radikal serta melewati batas-batas wilayah suatu negara dan telah membawa manusia dalam era baru. Perkembangan yang cepat khususnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi sangat berpengaruh serta mampu menstimulasi terhadap kemajuan bidang-bidang lainnya. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah dapat meningkatkan kemajuan dalam bidang ekonomi, menunjang kemajuan dalam bidang pendidikan dan pengetahuan masyarakat, serta kemajuan dalam bidang sosial lainnya.

Kemajuan yang tercipta dalam kehidupan sosial masyarakat berakibat terhadap semakin tingginya tuntutan terhadap peranan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang seimbang dengan kemajuan global yang terjadi. Dalam konteks ini masyarakat semakin menuntut untuk memperoleh akses terhadap layanan publik yang semakin baik, transparan dan akuntabel. Tuntutan terhadap keikutsertaan masyarakat

dalam proses pembangunan dan pemerintahan, tuntutan terhadap layanan sosial, diberdayakannya masyarakat, penyetaraan gender, perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak, ketersediaan berbagai prasarana kemasyarakatan dan prasarana lainnya menuntut pemerintah untuk mampu mengembangkan organisasinya agar dapat menjawab berbagai tantangan dan tuntutan masyarakatnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utaramemiliki kewajiban untuk melaksanakan 26 urusan wajib pemerintahan dan 8 urusan pilihan.

Guna terlaksananya berbagai urusan wajib dan pilihan sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara telah dibentuk organisasi kerja yang terbagi dalam satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Pada pelaksanaannya, fungsi penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ini masih belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Hal ini akibat adanya keterbatasan-keterbatasan baik secara kelembagaan maupun individu guna dapat melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud. Keterbatasan ini antara lain terbatasnya SDM aparatur terkait bidang tugas yang ditangani atau masih belum sesuai kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas yang diemban di samping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban kerja SKPD.

Dengan keterbatasan ini maka berdampak pada kurang optimalnya kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akibat lain dari keterbatasan ini yakni kurang tertatanya administrasi kerja, relatif masih rendahnya pendapatan asli daerah, opini BPK terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan dan asset daerah masih dalam tahapan wajar dengan pengecualian (WDP), besarnya sisa lebih anggaran (SILPA), banyaknya dokumen-dokumen rencana, pelaksanaan program dan kegiatan, maupun pelaporan kegiatan yang tidak terpenuhi. Dengan demikian harapan masyarakat terhadap pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

2. Potensi Rawa yang Belum Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal

Salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kawasan rawa yang luas dan memiliki produktivitas besar terhadap pengembangan sektor pertanian. Dari luasan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 89.270 hektar terdapat lebih kurang 89 % adalah kawasan rawa lebak. Luasan rawa lebak ini merupakan potensi yang sangat besar bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Hulu Sungai Utara bilamana dapat dimanfaatkan secara optimal. Sampai tahun 2011 berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sekitar 36.066 hektar diantaranya telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan melalui sistem irigasi tadah hujan, lebak dan lebak polder. Namun demikian masih terdapat kawasan rawa yang belum dapat dimanfaatkan mengingat statusnya masih sebagai kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas sekitar 41.934 hektar.

Pemanfaatan lahan rawa juga dihadapkan pada kendala sistem tata kelola air yang tidak optimal dalam menunjang kepentingan pengusahaan lahan pertanian, disamping belum sepenuhnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi pertanian telah diterapkan. Hal ini terkait dengan permasalahan kualitas sumberdaya petani dan nelayan di kawasan rawa

yang belum sepenuhnya mampu menyerap dan menerapkan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil sektor pertanian dan perikanan.

Lahan rawa yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara disamping memiliki potensi terhadap pengembangan pertanian tanaman pangan juga berpotensi bagi kegiatan perikanan dan peternakan. Oleh karenanya optimalisasi pemanfaatan lahan rawa menjadi hal yang penting untuk upaya meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan dapat menyerap tenaga kerja yang besar di daerah.

3. Kondisi Makro Ekonomi yang Masih Rendah

Kondisi makro ekonomi suatu daerah menggambarkan berbagai keadaan yang terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu gambaran keadaan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang menjelaskan tentang perkembangan dan perubahan terhadap produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah yang terbagi dalam 9 sektor ekonomi.

Pada aspek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) atas dasar harga konstan tahun 2000 tumbuh rata-rata sebesar 5,72%. Pertumbuhan yang terjadi bervariasi dimana pada tahun 2007 terjadi pertumbuhan sebesar 5,88%, meningkat di tahun 2008 menjadi 6,50%, terjadi penurunan pertumbuhan di tahun 2009 menjadi 5,26%, kembali terjadi penurunan pertumbuhan di tahun 2010 menjadi 4,58% dan pada tahun 2011 tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,39%. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dibawah laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan yang tumbuh di atas 6%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berada dibawah kinerja perekonomian rata-rata ditingkat provinsi.

Atas dasar kinerja sektor-sektor ekonomi daerah selama 5 tahun terakhir, dominasi sektor pertanian masih sangat tinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Hal ini mencirikan bahwa corak ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara bersifat agraris. Pada tahun 2007 sampai 2009 sektor pertanian menyumbang kontribusi di atas 34% dan cenderung menurun di tahun 2010 dan 2011 yang berkisar 30 sampai 31%. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini diikuti dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa, namun sayangnya tidak diikuti oleh perkembangan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan pada tahun 2011 hanya mampu berkontribusi sebesar 8,95% dari total PDRB.

Atas dasar penelaahan PDRB di atas dapat digambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara masih bersifat primer (sub sisten) dan kurang memiliki inovasi untuk berkembang ke arah ekonomi yang bersifat sekunder. Dalam hal ini tidak banyak diperoleh nilai tambah ekonomi yang diharapkan terjadi pada sektor industri pengolahan khususnya yang berbasis potensi pertanian. Atas dasar hal ini dibutuhkan kebijakan yang lebih terhadap bagaimana mensinergikan antara sektor industri pengolahan sebagai industri hilir dengan sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku industri berbasis potensi lokal.

Sektor jasa memberikan pertambahan kontribusi yang signifikan dimana pada tahun 2007 berkontribusi sebesar 17,98% dan pada tahun 2011 meningkat pesat menjadi 24,34%. Namun demikian ternyata pertumbuhan sektor jasa ini hanya terjadi pada sub

sektor jasa pemerintah yakni pendapatan pegawai negeri sipil di daerah, sedangkan pada sub sektor jasa swasta relatif tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah akan sangat ditentukan oleh adanya investasi dan permodalan sebagai input terhadap proses produksi barang dan jasa. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara perkembangan terhadap investasi dan permodalan masih sangat terbatas pada industri kecil, industri kerajinan, sektor usaha berbasis pertanian sedangkan jenis-jenis investasi besar masih sangat minim.

Kondisi makro ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga-lembaga ekonomi yang terdapat di suatu daerah. Pada daerah perkotaan relatif mempunyai perkembangan yang cukup baik dengan adanya lembaga perbankan yang semakin bertambah dalam lima tahun terakhir. Namun untuk daerah kecamatan atau desa masih sangat terbatas keberadaan lembaga ekonomi yang dapat menunjang perkembangan ekonomi kecamatan/desa. Sebagian besar koperasi dan lembaga ekonomi pedesaan masih tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

4. Pencapaian Target Tujuan Millenium (MDG's)

Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap masyarakat global. Komitmen Indonesia dalam upaya mencapai MDG's adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat 8 program MDG's yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, meliputi 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ; 2) mencapai pendidikan dasar bagi semua ; 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ; 4) menurunkan kematian anak ; 5) meningkatkan kesehatan ibu ; 6) mengendalikan HIV dan AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya ; 7) menjamin kelestarian lingkungan hidup ; dan 8) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.

Terkait dengan 8 tujuan pembangunan milenium ini terdapat beberapa hal yang berkenaan langsung dan relevan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Persoalan kemiskinan yang cukup tinggi meliputi 7,31 % dari penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara (tahun 2011),rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang relatif rendah yakni 7,48 tahun atau setara kelas 1 SLTP; masih kurangnya akses kaum perempuan terhadap kesetaraan gender ; masih tinggi kasus kematian anak dan kematian ibu melahirkan ; isue tentang permasalahan lingkungan yang rentan terhadap kegiatan budidaya di kawasan rawa serta bencana alam banjir yang terjadi hampir setiap tahunnya ; serta masih rendahnya kemitraan pembangunan di tingkat daerah. Permasalahan-permasalahan ini bukan hanya telah menjadi isu di tingkatan regional Kabupaten Hulu Sungai Utara namun telah menjadi isu nasional dan global.

5. Masih Rendahnya Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan nilai yang menggambarkan tentang bagaimana kualitas sumberdaya manusia yang terdapat pada suatu daerah yang merupakan akumulasi terhadap berbagai indikator di masyarakat secara komposit.

Indikator dimaksud meliputi angka melek huruf, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Sampai dengan tahun 2011 angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 69,45 meningkat dibanding tahun 2010 dengan angka IPM sebesar 68,89. Secara rata-rata angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dengan besaran 70,44 tahun 2011. Pada tahun 2011 posisi IPM Hulu Sungai dalam lingkup provinsi berada pada peringkat II dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berada di atas Kabupaten Balangan dan Kabupaten Barito Kuala. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dari indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita masyarakat di Hulu Sungai Utara masih berada di bawah rata-rata provinsi.

6. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur kewilayahan merupakan hal yang sangat fundamental bagi perkembangan daerah. Sebagai bentuk dari fungsi pelayanan publik maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang mencukupi secara ekonomi akan berbanding lurus dengan daya tarik investasi dan permodalan pada daerah yang bersangkutan sehingga akan memberikan dampak pada meningkatnya daya saing daerah yang tercermin pada keunggulan komparatif yang dimiliki daerah.

Dalam prinsip pelayanan publik, infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah tidak hanya yang bersifat menunjang perekonomian daerah tetapi juga terhadap pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam hal ini infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah juga meliputi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, fasilitas umum dan berbagai fasilitas sosial ekonomi lainnya.

Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya pada bidang infrastruktur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, beberapa isu penting menyangkut persoalan infrastruktur yakni terbatasnya kesesuaian antara infrastruktur yang tersedia terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan. Panjang jalan kabupaten yang tersedia belum mencukupi dibanding mobilitas kendaraan yang membutuhkan jalan. Kemacetan yang terjadi pada beberapa ruas jalan khususnya kota Amuntai adalah sedikit gambaran tentang belum memadainya penyediaan infrastruktur jalan. Pada wilayah kecamatan dan desa masih banyak diperlukan pembukaan jalan baru ataupun peningkatan terhadap jalan yang telah ada. Hal ini terkait dengan upaya untuk membuka akses masyarakat pada wilayah-wilayah terisolir guna meningkatkan potensi perekonomiannya. Begitu pula dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur lainnya dirasakan belum memadai baik dari sisi kuantitas terlebih dari sisi kualitas serta pemerataan penyebarannya yang berakibat adanya wilayah-wilayah di kawasan kecamatan dan desa yang termarjinalkan hak-hak nya untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan.

Rendahnya penyediaan infrastruktur wilayah juga terkendala dengan indeks kemahalan harga satuan bangunan gedung ataupun jalan akibat kondisi lahan yang lempung.

Keterbatasan sarana dan prasarana umum lainnya juga masih terasa yakni terhadap akses masyarakat terhadap penyediaan air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. Fasilitas penunjang permukiman juga mengalami hal yang sama. Kebutuhan terhadap fasilitas layanan persampahan dan kebersihan lingkungan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk dan permukiman.

7. Pengembangan Wilayah dan Permukiman

Ditetapkannya kota Amuntai sebagai pusat kegiatan wilayah dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, membawa konsekwensi terhadap kebutuhan infrastruktur penunjang yang semakin meningkat dalam upaya mewujudkan pengembangan kota Amuntai. Dibutuhkan adanya ketersediaan fasilitas perekonomian seperti pasar yang representatif dan mampu melayani proses transaksi barang dan jasa baik pada lingkup regional Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun interregional dengan daerah-daerah lainnya yang berdekatan. Selain itu juga dalam mengantisipasi penetapan kota Amuntai sebagai PKW dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti penyediaan sarana perhubungan darat dan sungai yang proporsional.

Kota Amuntai sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi daerah sekaligus ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ada di kecamatan dan desa untuk mencari peluang usaha dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Terjadi perpindahan masyarakat dari desa-desa dan kecamatan ke kota Amuntai khususnya bagi penduduk yang termasuk dalam katagori usia produktif. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya kebutuhan sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan. Secara perlahan terjadi konsentrasi pemukiman pada kawasan-kawasan tertentu di kawasan perkotaan disamping juga semakin meningkatnya kebutuhan sarana prasarana penunjang permukiman.

Kebutuhan akan perluasan kawasan perkotaan sebagai kebijakan pengembangan wilayah pada wilayah-wilayah tertentu sehingga memungkinkan untuk dapat menampung pertambahan jumlah penduduk diperkotaan yang terkait dengan penyediaan kawasan permukiman. Sejalan dengan ini maka pada fase selanjutnya juga dibutuhkan berbagai fasilitas penunjang permukiman seperti penyediaan lahan penampungan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH), penyediaan layanan air bersih.

Kaitan antara isu strategis, dengan prioritas kebijakan nasional, Kalimantan Selatan dan arahan dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Kesesuaian Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2017 dengan Isu Strategis Provinsi dan Nasional

Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara	Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan	Isu Strategis Nasional
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pembangunan Manusia	Memantapkan penataan kembali NKRI
Pengembangan potensi rawa yang belum optimal termanfaatkan	Daya saing Perekonomian Daerah	Meningkatkan kualitas SDM

Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara	Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan	Isu Strategis Nasional
Perbaikan kondisi makro ekonomi	Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan	Membangun kemampuan iptek
Pencapaian tujuan pembangunan milenium	Degradasi kuantitas dan kualitas Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup	Memperkuat daya saing perekonomian
Perbaikan Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terintegrasi dengan pendidikan dan kesehatan serta permasalahan sosial lainnya.	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah		
Pengembangan wilayah dan permukiman serta aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil dengan percepatan pengembangan wilayah		

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa yang akan datang dan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017 Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bhakti kepala daerah yang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Selain itu dalam proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik yang merupakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai program pembangunan atas dasar kondisi dan potensi daerah. Pendekatan lainnya adalah pendekatan partisipatif yakni dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2012, maka pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan terarah pada visi :

“TERWUJUDNYA RAWA MAKMUR MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI BERNUANSA ISLAMI”

Pemahaman terhadap visi di atas yakni “terciptanya kondisi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari, meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana umum serta terselenggaranya suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini.

Pemahaman RAWA pada visi di atas mengandung pengertian bahwa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luasan seluruhnya 892,7 km² memiliki kawasan rawa atau kawasan yang tergenang baik secara monoton maupun yang tergenang secara periodik dan meliputi 89% dari total luas wilayahnya. Luasnya kawasan rawa yang terdapat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi ciri khas tersendiri bagi daerah sehingga bila

disebutkan kata RAWA terkandung pengertian ini adalah nama lain sebagai identitas Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Istilah **MAKMUR** pada visi di atas yakni dengan lahan rawa yang sangat luas yang dimiliki oleh daerah di Hulu Sungai Utara terkandung berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah sebagai kawasan ekonomi produktif yang dapat membawa pada kesejahteraan masyarakat. Bilamana kawasan ini dapat ditata dan dimanfaatkan secara tepat maka akan sangat menunjang terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan akan menjadi asset daerah dalam menuju masyarakat yang lebih makmur.

Kalimat **SEJAHTERA DAN MANDIRI** dapat difahami sebagai akibat dari adanya proses pemanfaatan potensi rawa dan berbagai potensi lokal lainnya yang dimiliki oleh daerah akan berdampak pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan serta kemandirian di daerah. Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian diperoleh dari proses pemanfaatan sektor-sektor ekonomi kawasan rawa yang dikelola secara bijak dan mandiri dengan memperhatikan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini.

NUANSA ISLAMI merupakan kondisi yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini. Sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan yang terjadi di masyarakat yang cepat dan dinamis dalam era globalisasi, berakibat pada terciptanya pergeseran kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Selain itu pembangunan yang dilakukan baik pada sektor pemerintah ataupun sektor swasta juga turut menciptakan perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat dan menggeser nilai-nilai sosial dan budaya di daerah. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai religius dan keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini.

Kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator yang diharapkan semakin baik dibanding tahapan atau periode sebelumnya yakni :

1. Pada aspek sumberdaya manusia, ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kecerdasan, semakin produktif, meningkatnya kadar keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan keagamaan, ditunjang dengan meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu lebih berperan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, memiliki jati diri yang kuat dan mandiri dan mampu bersaing serta memiliki kapabilitas dalam persaingan global.
2. Pada aspek ekonomi, ditunjukkan melalui meningkatnya struktur ekonomi yang lebih kuat dari periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, lebih mampu untuk bersaing dalam perekonomian global, meningkatnya optimalisasi ketermanfaatan potensi ekonomi lokal baik sumberdaya fisik maupun non fisik yang dapat menyerap dan menciptakan lapangan kerja, semakin berkembangnya dunia usaha yang menjurus pada efisiensi ekonomi dan terarah pada kemampuan bersaing secara komparatif dan kompetitif.
3. Dalam aspek infrastruktur kewilayahan, ditunjukkan oleh semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik yang lebih dapat menunjang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ketersediaan

sarana dan prasarana publik ini dalam jumlah yang proporsional, yang dapat menjamin terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan secara lebih berkualitas.

4. Pada bidang pemerintahan, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari *good governance*, yang ditunjang dengan keberadaan aparatur yang semakin profesional yang dapat memberikan pelayanan publik secara lebih baik, semakin meningkatnya kinerja penegakkan aturan perundang-undangan, meningkatnya pelaksanaan proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan transparan.
5. Dalam aspek lingkungan hidup, ditunjukkan oleh keberadaan lingkungan yang stabil dan lestari, baik sumberdaya hayati dan sumberdaya alam berupa hamparan rawa yang dikelola dengan sangat memperhatikan berbagai kaidah kelestarian dan ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.

Indikator-indikator di atas diharapkan akan terwujud secara bertahap dari tahun ke tahun hingga akhir tahun 2017 yang akan datang, dan secara berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagai perwujudan keadaan yang lebih baik sebagaimana indikator dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang dapat direalisasi sebagaimana yang direncanakan. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi.

5.2. MISI

Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan MISI yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun MISI pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD tahun 2013- 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Dalam misi ini diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sesuai Potensi Daerah Khususnya Rawa dan Budaya Lokal

Pada misi ini arah pembangunan adalah untuk terciptanya perekonomian masyarakat yang semakin maju dan berkembang dengan berlandaskan pada potensi daerah khususnya rawa. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas. Disamping itu juga untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan daerah. Secara agregat akan semakin tercipta struktur perekonomian yang kuat dengan tingkat pertumbuhan yang berkualitas dan merata, yang tergambar dengan semakin terwujudnya transformasi

ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri), serta ketimpangan/disparitas yang kecil di masyarakat. Pada misi ini juga dikehendaki perkembangan pada sektor produksi barang dan jasa yang menjadi sektor pelengkap (komplementer) terhadap potensi tenaga kerja lokal yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya peran usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang dan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat, yang berimplikasi pada penurunan persentase kemiskinan.

3. Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing di Era Globalisasi dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Religius Islam dan Kultur Budaya Daerah

Dalam misi ini pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi, berdaya, dan memiliki kemandirian yang ditunjang oleh kadar keimanan dan ketaqwaan yang semakin baik dan terimplementasi sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas sumber daya masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Dalam misi ini pembangunan kesehatan terarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi, semakin produktif, dan memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Guna terciptanya kondisi ini maka kebijakan pembangunan kesehatan di daerah ditujukan pada peningkatan layanan kesehatan melalui pemerataan dan peningkatan layanan diseluruh wilayah baik perkotaan dan pedesaan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Membangun Infrastruktur Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan

Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagaimana masyarakat dapat dijangkau oleh layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Arah pembangunan pada misi ini ditujukan untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selain itu juga menyediakan sarana dan prasarana sosial serta sarana-prasarana kemasyarakatan lainnya yang lebih berkualitas dalam menunjang aktivitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

6. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Pada misi ini diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjamin tetap tersedianya sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang diinginkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 pada dasarnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang dengan kehidupan keagamaan dan sosial yang kondusif. Selanjutnya adalah komitmen terhadap kepatuhan hukum oleh aparatur pemerintah dan masyarakat. Perbaikan kualitas kehidupan masyarakat (SDM) merupakan tujuan mendasar yang dilakukan secara bertahap terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal ditujukan untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional

Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang tepat (*right sizing*), diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

2. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Luas wilayah Kab. HSU yang didominasi oleh rawa lebih dari 90% menjadikan suatu keniscayaan untuk memanfaatkannya dan menggarapnya secara serius dari tahun ke tahun utamanya untuk kepentingan pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pertanian tanaman

pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dalam hal ini dibutuhkan peran Pemerintah Daerah yang lebih serius dalam menyediakan sarana dan prasarana terkait, termasuk penggunaan teknologi dan pembinaan terhadap masyarakat sehingga nilai tambah produk pertanian dapat ditingkatkan dan ketahanan pangan daerah dapat diwujudkan.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Struktur ekonomi yang kuat dan terus meningkat serta merata pada segenap masyarakat merupakan tujuan pembangunan ekonomi, yang ditandai dengan pendapatan perkapita masyarakat yang terus meningkat dan menurunnya angka kemiskinan. Untuk itu ekonomi kerakyatan harus terus diberdayakan dan peran industri mikro, kecil dan menengah terus dikembangkan. Selanjutnya juga diperhatikan pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi rakyat.

4. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan

Sumberdaya manusia adalah modal dasar dalam pembangunan yang harus diperhatikan. Kualitas sumberdaya manusia merupakan prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi perhatian utama untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pendidikan merupakan bagian dari investasi jangka panjang yang ditujukan untuk pembentukan kualitas dan karakter manusia.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing diwujudkan dengan mendorong pemberdayaannya. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat ditempuh dengan intervensi Pemerintah Daerah melalui Lembaga Kemasyarakatan yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih meningkat.

6. Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja

Salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk itu salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja. Tujuan ini menjadi komitmen daerah sebab tenaga kerja merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan, yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian. Tanpa tenaga kerja yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan maka akan sangat sulit untuk bersaing di dunia kerja.

7. Menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif

Tata kehidupan sosial budaya yang selaras dan harmonis merupakan upaya penting untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin serta dunia dan akhirat. Tujuan pembangunan ini meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap berpegang teguh pada norma-norma keagamaan. Kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan katalis bagi penyelenggaraan pembangunan yang bersendi ketuhanan di satu sisi dan di sisi lain juga merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap individu dan menjadi layanan dasar wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, sehingga mampu lebih berdaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

9. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah

Penyediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana wilayah yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan. Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Secara tidak langsung infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat, membuka daerah-daerah yang terisolir, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga dari sini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan

Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi menjadi hal yang memang seharusnya diupayakan untuk kepentingan masyarakat. Namun dalam hal ini perlu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan tetap melindungi sumberdaya hayati maupun sumberdaya lahan yang ada. Pengelolaan sumberdaya alam/lahan yang memperhatikan kaidah kelestariannya menjadi hal yang harus diwujudkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

B. Sasaran

Sasaran adalah identifikasi tujuan dalam jabaran yang lebih spesifik dan terkuantifikasi. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan di atas, maka sasaran

pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
3. Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Meningkatnya pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan
5. Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian
6. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
7. Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata
8. Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah
9. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
10. Menurunnya persentase kemiskinan
11. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan
12. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13. Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif
14. Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa
15. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan
16. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan
17. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman
18. Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
19. Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya alam/lahan berupa hamparan rawa yang terkelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.
20. Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2013-2017

Visi : Terwujudnya rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri bernuansa Islami

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2011)	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR PERIODE		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017			
I. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	1.1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional	1.1.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	a. Opini audit BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
			b. Penerapan SAKIP										
			- SKPD yang telah menyusun dan menetapkan IKU		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- SKPD yang telah menyusun Penetapan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- SKPD yang telah menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik format/sistematika dan waktu (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Terimplementasi nya rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW		10%	15%	20%	25%	30%	35%	35%	35%	35%
			d. Terimplementasi nya arahan kebijakan dalam dokumen RPJPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			e. Terlaksananya strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f. Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen RKPD	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2011)	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR PERIODE	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		
			g. Terlaksananya urusan yang menjadi kewenangan SKPD sesuai Renstra SKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			h. Terlaksananya program dan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan SKPD sesuai Renja SKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1.1.2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80,61	80,61	80,75	81	82	82,5	83	83	
			b. Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik	2	2	12	12	12	12	12	12	12
		1.1.3. Tersedianya produk hukum daerah yang sinkron dan harmonis, mempunyai nilai kepastian dan keadilan sebagai acuan daam penyelenggaraan urusan pemda, dengan kondisi masyarakat yang taat hukum	Tersedianya produk hukum daerah (SK, Perda,Perbup)	585	585	595	605	615	625	635	635	
			Kondisi masyarakat yang taat hukum (orang)	542	500	500	500	500	500	500	500	500
2. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sesuai Potensi Daerah Khususnya Rawa dan Budaya Lokal	2.1. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa utk peningkatan kesejahteraan masyarakat (peningkatan produktivitas sektor pertanian)	2.1.1. Meningkatkan pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan	a. Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi (ton)	48.875	153.313	168.538	171.066	173.632	176.236	178.880	178.880	
			b. Produksi Sektor Perikanan (ton)									
			- Perikanan Tangkap	12.047,50	12.047,50	12.053,52	12.059,55	12.065,58	12.071,61	12.077,64	12.077,61	
			- Perikanan Budidaya	9.877,80	9.877,80	10.371,70	10.890,30	11.434,80	12.006,50	12.606,90	12.606,90	
			c. Produksi Sektor Peternakan (ekor)									

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2011)	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR PERIODE
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
			- Itik	-	1.426.213	1.454.738	1.492.951	1.533.714	1.574.008	1.618.272	1.618.272
			- Kerbau	-	8.404	8.509	8.619	8.732	8.858	8.975	8.975
			d. Produksi Sektor Perkebunan (ton)								
			- Sawit Rakyat	-	5,20	10,50	10,50	10,50	13	13	13
			- Sawit Swasta	-	1.164,57	2.396,29	6.154,26	17.172,54	19.080,60	21.425,91	21.425,91
			- Karet	176,68	195	199	203	208	213	218	218
		2.1.2. Meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian	Luas areal pertanian organik	204,91	204,91	204,91	230,00	230,00	255,00	255,00	255,00
			Nilai Tukar Petani (NTP)	108,40	107,85	110	110	110	110	110	110
		2.1.3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%) :								
			a. Total Energi	5.167	4.588	5.219	5.245	5.271	5.297	5.323	5.323
			Kel.padi-padian	4.661	4.083	4.485	4.383	4.281	4.247	4.223	4.223
			Kel.Pangan Lainnya	506	505	734	862	990	1.050	1.100	1.100
			b.Total Protein	152,63	155,68	158,79	161,97	165,21	168,51	171,88	171,88
			Kel.padi-padian	114,63	-	-	-	-	-	-	-
			Kel.Pangan Lainnya	38,25	-	-	-	-	-	-	-
			Penguatan Cadangan Pangan (%)	-	-	20	40	40	-	-	-
			Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses pangandi daerah (%)	81,32	81,32	81,32	87,34	90,12	92,90	93,82	93,82
			Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	90	90	90	90	90	90	90	90
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	79,4	92,4	93,4	94,4	95,5	96,6	97,5	97,5
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informasi Data Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	37,5	41,67	50	50	80,56	80,56	80,56	80,56
	2.2. Meningkatkan perekonomian masyarakat	2.2.1. Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) (%)	6,39	6.40	6.50	6.59	6.70	6.73	6.80	6,80
			Kontribusi PDRB Sektoral terhadap PDRB Kabupaten								

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2011)	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR PERIODE
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		berkualitas dan merata	(%)								
			- Pertanian	33	33	33	32	32	32	32	32
			- Pertambangan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			- Industri Pengolahan	9,51	10,03	10,49	10,90	11,27	11,60	11,91	11,91
			- Listrik, Gas, Air bersih	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
			- Konstruksi	6,44	6,27	6,12	5,98	5,86	5,75	5,64	5,64
			- Perdagangan, Hotel & Restoran	19,66	19,72	19,76	19,81	19,85	19,88	19,92	19,92
			- Pengangkutan & Komunikasi	7,14	6,96	6,80	6,66	6,53	6,41	6,30	6,30
			- Keuangan, RE & Jasa Perusahaan	3,96	3,95	3,94	3,93	3,93	3,92	3,91	3,91
			- Jasa-jasa	19,46	19,55	19,64	19,72	19,79	19,86	19,92	19,92
			Laju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya)	9	9	9	9,1	9,2	9,3	9,5	9,5
			Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>)	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11
		2.2.2. Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	a. Jumlah koperasi aktif (unit)	89	89	91	93	96	98	101	101
			b. Jumlah industri/IKM (orang)	25.215	25.791	26.367	26.943	27.519	28.095	28.671	28.671
		2.2.3. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	a. PDRB per kapita (berlaku dlm juta rupiah)	8.387.356	9.281.987	10.176.618	11.071.249	11.965.880	12.860.511	13.755.142	13.755.142
			b. PDRB per kapita (konstan dlm juta Rupiah)	4.342.079	4.505.395	4.668.711	4.832.027	4.995.343	5.158.659	5.321.975	5.321.975
		2.2.4. Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	7,31	6,79	6,26	6,07	5,88	5,69	5,50	5,50
3. Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya Saing di Era Globalisasi dengan tetap	3.1. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	3.1.1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	92,85	94,04	95,23	96,42	97,61	98,8	100,00	100,00
			APM SMP/MTs/Paket B (%)	68,62	71,35	74,09	76,82	79,55	82,28	85,01	85,01

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2011)	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR PERIODE	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		
mempertahankan Nilai-Nilai Religius Islam dan Kultur Budaya Daerah			APM SMA/SMK/MA/ Paket C. (%)	46,81	49,60	52,39	55,18	57,97	60,76	63,55	63,55	
			Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,48	7,65	7,82	7,99	8,16	8,33	8,50	8,50	
			Angka melek huruf	96,02	96,10	96,19	96,26	96,34	96,42	96,50	96,50	
			IPM (%)	69,45	69,54	69,62	70,30	70,98	71,65	72,33	72,33	
	3.2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	3.2.1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LKM) :									
			- Jumlah BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi) yang berhasil	37	51	68	71	75	79	83	83	
			Jumlah organisasi pemuda	43	44	44	45	45	46	46	46	
			Jumlah klub olahraga	45	50	55	60	65	70	75	75	
			Jumlah klub seni	13	15	17	19	21	23	25	25	
			Jumlah organisasi perempuan									
			- Jumlah KUBE	7	7	7	7	7	7	7	7	
			- Jumlah Kelompok Tani	870	870	870	870	870	870	870	870	
			- Jumlah Kelompok Nelayan	103	103	103	103	103	103	103	103	
			- Jumlah Kelompok Peternak	394	394	394	394	394	394	394	394	
3.3. Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja	3.3.1. Meningkatkan kualitas hidup angkatan kerja usia produktif	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,28	5,23	5,18	5,13	5,08	5,03	4,98	4,98		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki/Pemuda (%)	90,78	90,73	90,68	90,63	90,58	90,53	90,48	90,48		
3.4. Menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif	3.4.1. Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Jumlah konflik bernuansa agama	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Jumlah kasus kriminalitas	128	126	124	122	120	118	116	116		
4. Mewujudkan Pemerataan dan	4.1. Meningkatkan derajat kesehatan	4.1.1. Meningkatnya jangkauan dan	Angka Kematian Ibu	14	18	16	14	12	11	10	10	
			Angka Kematian Bayi	32	22	22	22	21	21	20	20	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2011)	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR PERIODE	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat	masyarakat	kualitas pelayanan kesehatan	(AKB)									
			Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%)	5,68	5,57	5,46	5,35	5,24	5,13	5,00	5,00	
			Angka usia harapan hidup (tahun)	63,47	63,86	64,26	64,45	64,63	64,82	65,00	65,00	
			Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13	13	13	13	
			Jumlah Puskesmas	62	72	82	92	102	112	122	122	
5. Membangun Infrastruktur Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan	5.1. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah	5.1.1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Panjang jalan (km)	386,54	393,75	401,09	408,58	416,21	423,99	431,92	431,92	
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,44	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,91	0,91	
			Jumlah jembatan (buah)	185	187	191	194	198	202	206	206	
		5.1.2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman	Panjang saluran drainase (km)	91.350	92.264	93.186	94.118	95.059	96.010	96.970	96.970	
			Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%)	26,78	30	35	40	55	65	70	70	
			Rumah tangga pengguna air bersih (%)	61,32	65	65,5	70	75	80	85	85	
			Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	30,07	35	40	50	60	65	70	70	
			Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun)	3	6	7	8	9	10	10	10	
		5.1.3. Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Rasio jaringan irigasi	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
			Panjang jalan usaha tani (m)	149.300	155.067	162.567	170.067	177.567	185.067	192.567	192.567	
		6. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan	6.1. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	6.1.1. Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya	Terimplementasinya arahan kebijakan dalam Dokumen KLHS	3	4	5	6	7	8	9

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2011)	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR PERIODE
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam	dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan	alam/lahan berupa hamparan rawa yang dikelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.	Terimplementasinya rekomendasi dalam Dokumen AMDAL pada pelaksanaan proyek/kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terimplementasinya rekomendasi dalam Dokumen UKL/UPL pada pelaksanaan proyek/kegiatan	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen Tata Ruang	3	4	5	5	6	6	7	7

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan, sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil sebagai rumusan perencanaan yang mengarah pada bagaimana nantinya pemerintah daerah mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dalam perumusan strategi dijabarkan dengan strategi secara umum untuk capaian pembangunan yang bersifat makro. Selain itu dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dapat dilakukan dengan strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing misi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

6.1. Strategi

Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas penelaahan terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi daerah. Secara umum strategi pencapaian visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan misi-misi daerah. Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan dari rumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran, maka strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 sampai tahun 2017 adalah :

1) Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah.

Kualitas aparatur pemerintahan berperan sangat fundamental terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam memberikan layanan publik. Dengan semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh seorang aparat, akan dapat mengembangkan kemampuannya secara teknis dalam hal penyelenggaraan dan manajemen layanan pemerintahan. Hal ini akan berkorelasi dengan semakin meningkatnya kapasitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur tentunya juga harus didukung dengan komitmen moral dan etika serta etos kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan demikian maka pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar optimal dalam memberikan kepuasan masyarakat. Karenanya keberadaan aparatur berkualitas dan profesional akan sangat menentukan kapasitas dan kualitas layanan publik yang optimal diberikan kepada masyarakat.

2) Peningkatan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Manajemen pemerintahan yang tertata rapi akan menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berkualitas dengan didukung oleh keberadaan aparatur

profesional, memiliki etika dan komitmen moral yang tinggi akan menghasilkan layanan publik yang prima, efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaan sumberdaya pembangunan. Dengan demikian perwujudan pemerintahan yang baik akan tercermin pada bagaimana tata kelola pemerintahan itu dijalankan yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi serta bersinergi dengan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Aspek perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan merupakan bagian dari manajemen tata kelola pemerintahan yang harus ditingkatkan kinerjanya. Pada aspek perencanaan harus semakin dimantapkan, pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk implementasi berbagai program dan kegiatan juga harus semakin ditingkatkan kualitasnya, sedangkan pada aspek pengawasannya juga harus lebih diintensifkan. Dalam aspek perencanaan pembangunan perlu dibangun sistem perencanaan daerah yang teradministrasi dengan baik, lebih terpadu antar sektor dan lebih dapat diimplementasikan. Keberadaan dokumen perencanaan pada setiap unsur pemerintah daerah hendaknya tidak hanya dalam bentuk formal saja tetapi harus lebih substantif sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian pula dalam hal pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan harus teradministrasi secara jelas sesuai perundang-undangan yang mengaturnya.

3) **Pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan.**

Salah satu syarat dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya keterlibatan masyarakat yang bertindak tidak hanya sebagai obyek dalam pembangunan, tetapi juga sebagai subyek. Perkembangan dan kemajuan yang tercipta sebagai dampak dari globalisasi menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat berakibat pada munculnya akses dan desakan-desakan untuk menyerap dan menerima berbagai aspirasi serta keinginan masyarakat yang lebih banyak terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat luas. Karenanya secara sinergi pelibatan masyarakat dalam hal penentuan kebijakan pembangunan harus disikapi sebagai kekayaan khazanah dalam alam demokrasi yang sudah mengglobal tidak hanya dalam konteks regional tetapi sampai pada tatanan internasional.

4) **Peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah.**

Permasalahan umum yang terjadi di banyak daerah khususnya pemerintah kabupaten adalah terbatasnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara kontribusi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah hanya sekitar empat sampai lima persen total APBD setiap tahunnya. Dengan demikian ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap transfer pemerintah pusat sangat tinggi. Kondisi ini hendaknya harus selalu mendapat perhatian besar dari seluruh komponen di daerah agar pemerintah daerah bisa lebih independen dalam pembiayaan dan penganggaran terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menerapkan strategi

peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah ini perlu dilakukan inventarisasi kembali terhadap sumber-sumber penerimaan yang ada serta perluasan terhadap potensi sumber penerimaan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Selain itu dalam hal penyelenggaraan manajemen keuangan daerah juga perlu untuk semakin ditingkatkan kinerjanya, khususnya di tingkat SKPD. Hal ini dirasa perlu guna mendapatkan opini yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah.

5) Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tercermin pada aspek layanan umum. Gambaran pelayanan umum kepada masyarakat sangat terkait dengan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan dapat dinilai pada indeks kepuasan masyarakat. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan akan semakin tinggi kepuasan masyarakat yang dilayani serta semakin besar pula rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat. Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sangat tergantung dengan kualitas aparatur dan kelembagaan yang memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya penting untuk memberikan fokus perhatian bagaimana meningkatkan kualitas aparat dan lembaga pemberi layanan khususnya layanan dasar kepada masyarakat.

6) Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan negara yang demokratis tergantung bagaimana negara tersebut menempatkan hukum dan aturan sebagai panglima yang menjadi panutan bersama dalam kehidupan masyarakat. Semakin tinggi penerapan hukum dan aturan dapat dilaksanakan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan semakin baik kualitas demokrasi yang tercipta di negara tersebut. Kualitas penegakan hukum dan aturan yang berlaku sangat tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakatnya untuk mentaati hukum dan aturan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan berbanding lurus dengan terciptanya keamanan dan ketertiban, dimana semakin tegas penerapan hukum dan aturan akan semakin dapat memberi rasa aman serta terciptanya suasana yang kondusif di masyarakat. Oleh karenanya sebagai bentuk layanan pemerintah terhadap rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat perlu ditempuh upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula terhadap kehidupan sosial politik, diperlukan adanya pembinaan yang dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta semakin meningkatnya kualitas demokrasi yang tercipta dalam kehidupan sehari-hari.

7) Pemantapan integrasi ekonomi antara sektor primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan struktur ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, ketergantungan terhadap sektor primer (pertanian) masih sangat tinggi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat potensi sektor pertanian di Hulu Sungai Utara memang sangat ditunjang

dengan ketersediaan lahan rawa dan pertanian yang relatif luas, disamping jumlah tenaga kerja yang berkerja pada sektor pertanian juga sangat besar. Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tumpuan sektor ekonomi yang berkembang di pedesaan. Umumnya sentra-sentra usaha pertanian ini tersebar di berbagai pedesaan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan karenanya bilamana terdapat kebijakan yang mendukung terhadap perkembangan sektor pertanian maka akan semakin mendorong perkembangan ekonomi yang berbasis pedesaan. Namun demikian potensi yang terdapat pada sektor primer ini hendaknya dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menumbuhkan perkembangan pada sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Untuk ini diperlukan adanya kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dari terintegrasinya hubungan antar sektor. Pemikiran terhadap perlunya pengembangan terhadap sektor sekunder dan tersier ini adalah untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pendapatan masyarakat, karena dalam prosesnya sektor industri dan jasa memiliki margin ekonomi yang lebih besar sebagai bentuk produksi yang terkandung adanya unsur inovasi dan sumberdaya manusia yang lebih baik.

8) Pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian dan kedaulatan pangan, perdagangan, hotel, rumah makan serta sektor strategis lainnya.

Guna mewujudkan terciptanya nilai tambah perekonomian yang didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki oleh daerah dan diharapkan dapat mentransformasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, maka strategi terhadap pengembangan sektor industri kecil, koperasi, perdagangan, hotel dan rumah makan penting untuk dilakukan. Keberhasilan dalam merubah struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier akan berimplikasi pada meningkatnya PDRB yang berarti meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita menunjukkan secara rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, maka tingkat daya beli masyarakatpun akan meningkat. Dengan demikian pilihan konsumsi terhadap berbagai barang dan jasa juga meningkat. Kebutuhan akan barang-barang konsumtif akan semakin menyuburkan perkembangan sektor perdagangan, perhotelan dan rumah makan. Perubahan pada pola konsumsi masyarakat hendaknya dapat diimbangi dengan ketersediaan pangan yang akan menjamin stabilitas ketahanan pangan di daerah.

9) Penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Hal yang penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi adalah tersedianya lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja produktif. Ketersediaan lapangan kerja akan menjamin pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang bekerja sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang disumbangkan. Oleh karenanya semakin luas lapangan kerja yang tersedia, semakin banyak tenaga kerja yang diserap akan berakibat pada semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di daerah. Perkembangan aktivitas perekonomian akan semakin memperluas kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja sebagai efek dari multiplier ekonomi yang berkembang. Guna mempertahankan

kesinambungan perkembangan perekonomian harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan ketenagakerjaan.

10) Percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan MDG's.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama semua pemangku kepentingan sehingga dibutuhkan sinergi dan kemitraan semua pihak. Dalam strategi ini diperlukan tindakan yang mengarah pada perbaikan sistem jaminan sosial terhadap penyandang masalah sosial, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan sektor ekonomi produktif. Selain itu perlu adanya peningkatan kemampuan dasar masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar. Dengan demikian diharapkan mampu untuk mengadaptasi perkembangan di lingkungannya.

Pencapaian target MDG's juga merupakan agenda penting bagi pemerintah dalam menunaikan komitmen nasional dan internasional. Komitmen ini juga harus direspon oleh setiap daerah dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, disparitas gender dan permasalahan sosial lainnya.

11) Peningkatan mutu pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan pemerataan akses pendidikan.

Permasalahan pendidikan sangat erat kaitannya dengan perkembangan kualitas sumberdaya manusia. Sementara kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah sangat terkait erat dengan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti tercapainya kesejahteraan masyarakat, kemandirian, produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya masalah pendidikan ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan suatu daerah. Perhatian yang diberikan kepada bidang pendidikan merupakan investasi yang sangat berharga untuk terciptanya kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang, dan untuk ini maka strategi peningkatan mutu dan layanan pendidikan serta penyediaan berbagai sarana penunjang pendidikan serta pemerataan terhadap akses pendidikan sangat dibutuhkan dalam perencanaan bidang pendidikan.

12) Pemantapan pemahaman dan pengamalan serta layanan keagamaan.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dicirikan dengan suasana religius berdasarkan norma-norma keagamaan yang telah lama berkembang di masyarakat. Adanya pengaruh globalisasi yang tercipta dapat membawa akibat pada tergerusnya nilai-nilai keagamaan yang menjadi ideologi masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Oleh karenanya efek negatif dari kemajuan global harus dapat diimbangi dengan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang telah ada di masyarakat. Sebagai bentuk layanan pemerintah di bidang keagamaan perlu adanya upaya bersama dengan melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh agama

untuk membina dan melestarikan nilai-nilai Islami di kalangan generasi muda khususnya dan di masyarakat pada umumnya. Pengembangan terhadap sarana dan prasarana keagamaan melalui bantuan pemerintah juga perlu untuk tetap dilakukan sejalan dengan upaya memandirikan masyarakat terhadap upaya penyediaan sarana dan prasarana keagamaan sebagaimana yang telah berkembang selama ini.

13) Peningkatan dan pengembangan layanan sosial, peran pemuda, olahraga, budaya, seni dan pariwisata.

Salah satu fungsi hakiki dari adanya pemerintahan adalah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan dalam upaya untuk membuahkan kemandirian dan kemampuan mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Oleh karenanya dibutuhkan upaya-upaya pelayanan sosial guna menciptakan perbaikan dan kemandirian masyarakat. Pelayanan yang diberikan terarah pada upaya menciptakan ketahanan sosial bagi penyandang masalah sosial, memberdayakan peranan perempuan dalam rangka keseimbangan gender, memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan lanjut usia, mewujudkan terciptanya keluarga sejahtera, menangani masalah bencana, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Disamping itu untuk meningkatkan aktualisasi masyarakat juga dibutuhkan adanya perhatian terhadap peran pemuda dalam pembangunan, serta pelestarian terhadap seni dan budaya daerah.

14) Peningkatan layanan, sarana dan prasarana, serta pemerataan akses kesehatan.

Pelayanan terhadap bidang kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kebutuhan terhadap layanan kesehatan ini dirasakan semakin meningkat dari tahun-ketahun, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Oleh karenanya perlu disikapi oleh pemerintah dengan semakin meningkatkan mutu pelayanan dan akses kesehatan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

15) Peningkatan infrastruktur wilayah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur pemerintahan dan sosial lainnya.

Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sehari-hari dalam upaya memenuhi hajat hidup dan kebutuhan terhadap berbagai aktivitas ekonomi, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan terhadap sarana infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagi perkembangan kehidupan masyarakat, dan karenanya merupakan kewajiban pemerintah secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ini sebagai bentuk layanan yang dapat membawa masyarakatnya pada tingkatan kesejahteraan yang lebih layak.

16) Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem rawa.

Secara ekologi kehidupan komunitas masyarakat tidak terlepas dari keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya. Untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak hanya membutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar saja tetapi juga dibutuhkan adanya lingkungan yang terjaga dan asri serta memiliki kenyamanan. Pemanfaatan lahan rawa yang tersebar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya akan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Dengan demikian diperlukan upaya yang dapat meminimalisasi dampak negatif dari pemanfaatan rawa dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, sebagai daerah yang rawan terhadap bencana banjir juga diperlukan upaya untuk meminimalisasi potensi bencana serta melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan yang terjadi.

6.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang terkait dengan visi dan misi sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun 2013-2017 merupakan jabaran dari visi dan misi RPJMD, namun tetap tidak terlepas dan harus mengacu pada arah kebijakan yang ada pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.

Arah Kebijakan Tahun 2013

Arah kebijakan tahun 2013 pada aspek pemerintahan terarah pada upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang semakin baik, memberikan layanan masyarakat yang semakin berkualitas, mewujudkan masyarakat yang semakin mandiri dan dewasa serta berdaya saing dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta budaya, meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta memelihara kerukunan beragama. Pada aspek ekonomi terarah pada upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal. Selanjutnya pada aspek pendidikan dan kesehatan terarah pada melaksanakan perbaikan mutu dan pemberian layanan masyarakat baik pada sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih produktif dan berdaya saing. Pada bidang infrastruktur dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam penyediaan infrastruktur wilayah, infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi ; optimalisasi penataan ruang ; serta melakukan upaya pemeliharaan lingkungan dan kebersihan dalam rangka terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Khusus untuk pembangunan infrastruktur pengembangan Kota Amuntai, dilakukan tahapan-tahapan persiapan yang mengarah pada terwujudnya pengembangan kota Amuntai.

Arah Kebijakan Tahun 2014

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2014 arah kebijakan yang dibuat tentunya tidak terlepas dari kesinambungan dengan tahun sebelumnya. Berbagai arah kebijakan pada tahun 2014 ini tetap mengacu pada arah kebijakan tahun sebelumnya, namun lebih tertuju pada upaya peningkatan hasil yang diperoleh pada tahun 2013. Perbaikan pada tata kelola pemerintahan harus selalu dilakukan dengan lebih mensinergikan pada upaya pelibatan unsur masyarakat atau lembaga perwakilan rakyat untuk terlibat secara aktif berkontribusi pada berbagai kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kompetensi dan kapasitas diri aparatur pemerintahan, penataan kelembagaan dan hubungan kerja antar instansi, meningkatkan kualitas kerja baik pada bidang perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengendalian dan pelaporan, serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pada aspek pemerintahan ini juga dilakukan kebijakan yang terarah pada menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban guna mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum memilih wakil-wakil rakyat baik anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi atau DPR pusat. Pada aspek ekonomi diarahkan pada pemanfaatan berbagai potensi lokal guna terciptanya nilai tambah ekonomi khususnya kawasan rawa, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mendorong terbukanya lapangan kerja baru serta perbaikan kualitas tenaga kerja. Pada aspek sumberdaya manusia dilakukan kebijakan terhadap upaya meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, pada aspek infrastruktur wilayah diupayakan untuk melakukan persiapan pengembangan wilayah kawasan perkotaan dengan melakukan pembebasan lahan, meningkatkan ketersediaan jalan baru baik kecamatan maupun desa dalam upaya mengurangi isolasi, memelihara serta memperbaiki sarana jalan yang telah ada, memelihara dan meningkatkan infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sosial lainnya. Pada aspek lingkungan dilakukan pemeliharaan, pemulihan dan rehabilitasi serta mencegah potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

Arah Kebijakan Tahun 2015

Arah kebijakan pembangunan di tahun 2015 juga merupakan kesinambungan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tahun sebelumnya. Pada aspek pemerintahan yakni melaksanakan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewajiban daerah guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perbaikan kinerja pemerintahan terus diupayakan dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi aparatur, pembinaan kelembagaan pemerintah, peningkatan kinerja untuk menggali sumber pendapatan daerah, menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah provinsi/gubernur, dan memelihara kerukunan hidup dalam suasana keagamaan. Pada aspek ekonomi melakukan pengembangan pemanfaatan potensi lahan rawa, meningkatkan inovasi masyarakat dalam sektor pertanian dan industri pengolahan khususnya produk andalan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan pembinaan terhadap lembaga ekonomi yang ada di kecamatan maupun pedesaan. Pada aspek pendidikan dan kesehatan melakukan perbaikan terhadap mutu dan layanan

pendidikan dan kesehatan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui kebijakan pendidikan luar sekolah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan baik secara sosial maupun ekonomi, meningkatkan peran perempuan, perlindungan dan pembinaan anak terlantar, membina penyandang masalah sosial dalam upaya menumbuhkan kemandirian. Pada aspek infrastruktur wilayah melanjutkan upaya pengembangan dan perluasan kota Amuntai serta membuka akses masyarakat di pedesaan, peningkatan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur kewilayahan, perhubungan, ekonomi, dan infrastruktur sosial lainnya termasuk pemerintahan ; pada aspek lingkungan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem rawa, pengendalian bencana alam serta perbaikan/rehabilitasi terhadap dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap lingkungan.

Arah Kebijakan Tahun 2016

Arah kebijakan tahun 2016 merupakan penyesuaian terhadap berbagai tujuan dan target pembangunan 5 tahun RPJMD. Periode tahun ke 4 dalam pelaksanaan RPJMD lebih melihat pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya guna memastikan tercapainya visi dan misi serta target capaian indikator kinerja dalam RPJMD 2013 - 2017.

Kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2016 masih terarah pada peningkatan tata kelola pemerintahan, mewujudkan terlaksananya program-program ekonomi kerakyatan, peningkatan pendidikan masyarakat baik formal maupun informal serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek ekonomi dan sosial, pelaksanaan berbagai program harus benar-benar terfokus dalam upaya mengurangi kemiskinan di daerah sehingga Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terlepas dari status sebagai daerah tertinggal. Meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan perbaikan terhadap masalah ketenagakerjaan. Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada semakin meningkatnya perwujudan Amuntai Baru sebagai alternatif perluasan kawasan perkotaan, penyediaan infrastruktur perekonomian guna lebih memantapkan mobilitas perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan guna menunjang tercapainya sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan mandiri. Selanjutnya pada aspek lingkungan diarahkan pada semakin meningkat dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup, menjaga keseimbangan fungsi ekosistem baik kawasan perkotaan maupun kawasan rawa yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Arah Kebijakan Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun akhir dari periode pemerintahan yang mengusung visi Terwujudnya Rawa Makmur Menuju Masyarakat Sejahtera dan Mandiri Bernuansa Islami. Pada tahun ini segala program pembangunan dan target capaian kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2017 termasuk capaian terhadap arahan kebijakan tahapan ketiga RPJPD dapat dituntaskan. Pada arah kebijakan pembangunan tahun 2017 ini tetap melanjutkan berbagai arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya namun

dengan penekanan pada penuntasan berbagai program yang masih rendah capaian kinerjanya. Selain itu untuk penuntasan kemiskinan tetap merupakan prioritas daerah dalam rangka mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Secara umum arah kebijakan pembangunan tahun 2017 tetap terarah pada pengelolaan tata pemerintahan yang semakin berkualitas, pembangunan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lahan rawa, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program-program pendidikan baik pendidikan formal ataupun non formal serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu sesuai agenda politik tahun 2017 dilaksanakan Pemilukada Kab. HSU dan menjadi kewajiban daerah untuk dapat melaksanakan proses Pemilukada dalam suasana aman, damai dan kondusif. Pada aspek ekonomi diarahkan pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan lembaga ekonomi lokal, peningkatan investasi dan permodalan. Pada aspek pendidikan dan kesehatan tetap diupayakan peningkatan mutu layanan baik pendidikan maupun kesehatan serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Pada aspek infrastruktur wilayah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur sosial lainnya juga selalu dilakukan peningkatan dan perbaikan sesuai kebutuhan guna lebih terpenuhinya aksesibilitas masyarakat, termasuk pengembangan kota Amuntai.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

7.1. Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah (2010-2015). Kebijakan umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menerjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, yaitu:

1. Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Penguatan Profesionalitas aparatur pemerintah
 - b. Pemantapan kualitas fungsi pemerintahan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan
2. Strategi peningkatan sistem pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Memantapkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Strategi pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta pada proses kebijakan pembangunan
4. Strategi peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan penggalan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah
 - b. Memantapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah
5. Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Memantapkan kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada masyarakat
 - b. Memantapkan kualitas aparat pemberi layanan
6. Strategi peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - b. Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah dan aturan perundang-undangan yang berlaku

7. Strategi pemantapan integrasi ekonomi antara sektor primer, sekunder dan tersier. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta
 - b. Menumbuhkan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah
 - c. Meningkatkan Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani/nelayan
8. Strategi pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian dan kedaulatan pangan, perdagangan, hotel, rumah makan serta sektor strategis lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal.
 - b. Meningkatkan investasi dan permodalan.
 - c. Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi, serta diversifikasi dan rehabilitasi untuk mewujudkan ketahanan pangan.
9. Strategi penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Menciptakan peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja
 - b. Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk
 - c. Meningkatkan SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja
10. Strategi percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan MDG's. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan perkembangan sektor ekonomi produktif daerah
 - b. Meningkatkan pengembangan unit-unit usaha berbasis pedesaan
 - c. Meningkatkan implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan
11. Strategi peningkatan mutu dan layanan pendidikan formal dan informal, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kependidikan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil
 - b. Menyediakan sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai
 - c. Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan khusus untuk SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu
 - d. Membangun SMU/ SMK di setiap kecamatan secara bertahap
 - e. Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran yang berasal dari daerah
12. Strategi pemantapan pemahaman dan pengamalan serta layanan keagamaan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis
 - b. Meningkatkan layanan keagamaan serta sarana prasarana keagamaan
13. Strategi penyediaan layanan sosial, pemuda, olahraga, budaya, seni dan pariwisata. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial
 - b. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana

- c. Meningkatkan peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan
 - d. Melestarikan seni dan cagar budaya daerah
 - e. Meningkatkan peran perempuan serta pengarusutamaan gender
 - f. Melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
14. Strategi peningkatan layanan serta pemerataan akses kesehatan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
- a. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
 - b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
 - c. Meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD Pambalah Batung
 - d. Menjadikan RSUD Pambalah Batung sebagai rumah sakit rujukan lintas daerah
 - e. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan di RSU Pambalah Batung
 - f. Meningkatkan Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat inap
 - g. Meningkatkan kesejahteraan medis dan paramedis utamanya yang bertugas di daerah terpencil
15. Strategi peningkatan infrastruktur wilayah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur sosial lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
- a. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya
 - b. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya
 - c. Mewujudkan pengembangan wilayah Amuntai Baru sebagai alternatif perluasan kota Amuntai
 - d. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur desa melalui dana stimulan gotong royong
16. Strategi perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem rawa. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan
 - b. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian
 - c. Meningkatkan pengembangan dan konservasi sumberdaya air untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan lahan rawa

7.2. Program Pembangunan Daerah

Guna mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat.

Program pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 dimuat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.
Perumusan Program Prioritas Pada Program Pembangunan Daerah

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Strategi 1 : Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Pemerintah			
1. Penguatan Profesionalitas aparatur pemerintah	1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur	BKD
	2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Seluruh SKPD
	3) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kualitas hasil pemeriksaan dan pengawasan kinerja serta evaluasi kinerja yang akuntabel	BKD, Inspektorat Daerah, Bag. Ortal Setda
	4) Program pendidikan kedinasan	Peningkatan pelayanan masyarakat dan capaian kinerja aparatur	BKD
	5) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat desa	BKD, BPMPD, Pustarda
	6) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Seluruh SKPD
	7) Program Fasilitasi Pindah/Purna tugas PNS	Kesejahteraan pegawai	BKD
	8) Program Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Bahan perumusan perencanaan pembangunan	Bappeda
	9) Program Penyelenggaraan/Pelaksanaan Tugas-tugas dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bag. Umum Setda
2. Pemantapan kualitas fungsi pemerintahan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan	1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bag. Umum Setda, Bag. Tata Pemerintahan Setda
	2) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jangka waktu pembahasan PERDA Implementasi PERDA Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat DPRD
	3) Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Pegawai	Seluruh SKPD
	4) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penataan Daerah	Bag. Ortal Setda
	5) Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bag. Ortal Setda
	6) Program penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Kualitas Komunikasi dan Informasi Daerah	Bag. Pembangunan Setda
	7) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Kerjasama Pemerintah Daerah	Bag. Pemerintahan Setda

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	8) Program penataan daerah otonomi baru		Bag. Pemerintahan Setda
Strategi 2 : Peningkatan Sistem Pemerintahan Yang Berkualitas, Efektif Dan Efisien			
I. Memantapkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.	1) Program perencanaan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Bappeda, seluruh SKPD
	2) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Bappeda, DPKT, Diperta TPH, Dinas PU, Diskannak, Dinas Hutbun ESDM, Dinas Koperindag UKM
	3) Program pengembangan wilayah perbatasan	Sinkronisasi administrasi dan pembangunan wilayah perbatasan	Bag. Tata Pemerintahan Setda, Bappeda, Seluruh SKPD
	4) Program perencanaan pengembangan kota-kota kecil, menengah dan besar	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur	DPKT, Dinas PU, Dishub Kominfo, Bappeda, KPLH
	5) Program perencanaan sosial dan budaya	Implementasi rencana dalam pembangunan di bidang sosbud	BAPPEDA, SKPD Terkait
	6) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kualitas perencanaan pembangunan	SKPD Terkait
	7) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan	SKPD Terkait
	8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Bappeda, SKPD Terkait
	9) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan daerah rawan bencana	BPBD, Dinas PU, Diperta TPH, Dinas Kesehatan, DPKT, Bag. Kesra Setda
	10) Program perencanaan pembangunan ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	SKPD Terkait
	11) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Seluruh SKPD
	12) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Kualitas capaian kinerja pemerintahan	Inspektorat Daerah, Bag. Hukum Setda, Satpol PP,

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	13) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kondisi Pertanahan	Bag. Ortal Setda Bag. Pemerintahan Setda
	14) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Implementasi PKPT dan SOP dalam pengawasan	Inspektorat
	15) Program pengembangan data/informasi	Kualitas Perencanaan Pembangunan	BP4KKP
	16) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Dokumen kearsipan	Ktr. Pustarda
	17) Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dokumen kearsipan	Ktr. Pustarda
	18) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Dokumen kearsipan	Ktr. Pustarda
Strategi 3 : Pelibatan Masyarakat Dalam Kebijakan Pembangunan			
1. Meningkatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan	1) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi yang mandiri	Keluarga sejahtera, jumlah penduduk	BP3AKB, Dinkes
	2) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinkes
	3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Layanan terhadap penyandang masalah sosial	Dinsosakertrans, BPMPD, Bag. Kesra Setda, BP3AKB
	4) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kesejahteraan masyarakat desa	BPMPD, Dinkes, Dinas PU, Diperta TPH dan SKPD Terkait
	5) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Perkembangan dunia usaha	Bag. Ekonomi SDA Setda, Bappeda
	6) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Lingkungan yang aman dan nyaman	Satpol PP, SKPD Terkait
	7) Program kerjasama informasi dengan media massa	Cakupan sebaran informasi	Bag. Humas Setda
	8) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dokumen kearsipan	Bag. Humas Setda, Kantor Pustarda
	9) Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan	Bappeda, Bag. Tata Pemerintahan Setda, SKPD Terkait
Strategi 4 : Peningkatan Kemampuan Dan Kapasitas Keuangan Daerah			
1. Meningkatkan penggalan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah	1) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dispenda, SKPD Terkait
	2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dispenda
2. Memantapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah	1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Implementasi regulasi pengelolaan keuangan daerah	Bappeda, Bag. Keuangan Setda, Bag. Aset Daerah

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	APBD yang transparan dan akuntabel	Setda, Bag. Ekonomi SDA Setda, Bag. Hukum Setda Bag. Keuangan Setda
	3) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	APBDesa yang transparan dan akuntabel	BPMPD
Strategi 5 : Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah			
1. Memantapkan kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada masyarakat	1) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Perkara yang ditangani oleh unit pengaduan	Inspektorat, SKPD Terkait langsung dengan pelayanan publik
	2) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pengunjung website pemerintah daerah	Dishub Kominfo, Bag. Pembangunan Setda, Bag. Humas Setda
	3) Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan layanan kependudukan	Disdukcatpil, KPT
	4) Program peningkatan pelayanan terpadu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi	Bag. Tata Pemerintahan Setda
	5) Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi di Kecamatan	Seluruh Kecamatan, SKPD Terkait
	6) Program peningkatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bag. Pembangunan Setda
	7) Program peningkatan pelayanan administrasi terpadu	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi	Bag. Pemerintahan Setda
	8) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dokumen kearsipan	Ktr. Pustarda
2. Memantapkan kualitas aparat pemberi layanan	1) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kualitas pelayanan publik	SKPD Terkait langsung dengan pelayanan
	2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kualitas pelayanan publik	BKD, SKPD Terkait langsung dengan pelayanan
	3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Satpol PP
Strategi 6 : Peningkatan Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan Politik, Penegakkan Aturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku			
1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1) Program pengembangan wawasan kebangsaan	Suasana kehidupan beragama dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Bag. Tata Pemerintahan Setda, SKPD Terkait
	2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Wawasan kebangsaan masyarakat	Bag. Tata Pemerintahan Setda
	3) Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	Bag. Tata Pemerintahan Setda
	4) Program pemeliharaan keamanan ketenteraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Keamanan dan ketertiban masyarakat	Satpol PP, SKPD Terkait
	5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan	Lingkungan yang aman dan nyaman	Satpol PP

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	lingkungan		
	6) Program pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	Kemandirin masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Satpol PP
2. Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah dan aturan perundaang-undangan yang berlaku	1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Produk hukum daerah dan kesadaran hukum	Sekretariat DPRD, Bag. Hukum Setda, Satpol PP
	2) Program pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Lingkungan yang aman dan nyaman	SKPD Terkait
Strategi 7 : Pemantapan Integrasi Ekonomi Antara Sektor Primer, Sekunder Dan Tersier			
1. Meningkatkan peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta	1) Program Peningkatan Iptek Sistem Produksi	Produksi	Dinas Koperindag, SKPD Terkait
	2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kualitas produksi dan omzet	Dinas Koperindag, SKPD Terkait
	3) Program Peningkatan Kemampuan Tekhnologi Industri	Kapasitas dan kualitas industri	Dinas Koperindag, SKPD Terkait
	4) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pasar dan produk	Dinas Koperindag, SKPD Terkait
	5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan keamanan produk	Dinas Koperindag, SKPD Terkait
	6) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pangsa pasar produk dalam negeri	Koperindag, KPT
	7) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Keamanan konsumen dan ketertiban pedagang	DPKT, SKPD Terkait
2. Menumbuhkan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah	1) Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri	Pangsa pasar produk dalam negeri	Koperindag, KPT
	2) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Pertumbuhan perekonomian perdesaan	DPKT, Dinas Koperindag, Dinas PU, SKPD Terkait
	3) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Pertumbuhan perekonomian perdesaan	BPMPD, SKPD Terkait.
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani/nelayan	1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	BP4KKP, Diperta TPH, Diskannak, Dinas Hutbun, Pertambangan & ESDM
	2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan daerah	BP4KKP, Diperta TPH, Diskannak, Dinas Hutbun, Pertambangan & ESDM
	3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian	Produktivitas hasil pertanian	BP4KKP, Disperta TPH
	4) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Produktivitas hasil perikanan	Diskannak, BP4KKP

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Strategi 8 : Pengembangan Industri Kecil, Koperasi, Pertanian Dan Kedaulatan Pangan, Perdagangan, Hotel, Rumah Makan Serta Sektor Strategis Lainnya			
1. Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal	1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Luasan pengembangan dan pengelolaan hutan	Dinas Hutbun ESDM
	2) Program Pengembangan Kawasan Peternakan	Produksi Hasil Peternakan	Diskannak,
	3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pangsa pasar komoditas pertanian/perkebunan	Diperta TPH, Dinas Hutbun Pertambangan & ESDM
	4) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Diversifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Diskannak, Dinas Koperindag UKM
	5) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya perairan umum	Kawasan reservat (konservasi perikanan)	Diskannak
2. Meningkatkan investasi dan permodalan	1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	Realisasi Investasi	Bag. Ekonomi SDA Setda, SKPD Terkait
	2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Realisasi Investasi	Bag. Ekonomi SDA Setda, SKPD Terkait
3. Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi serta diversifikasi dan rehabilitasi untuk mewujudkan ketahanan pangan	1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan	Produktivitas Produk Pertanian /Perkebunan	Diperta TPH, Dinas Hutbun Pertambangan & ESDM
	2) Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan	Produksi Pertanian / Perkebunan	Diperta TPH, Dinas Hutbun Pertambangan & ESDM
	3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Diskannak
	4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Diskannak
	5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil-hasil peternakan	Diskannak
	6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Produktivitas Produk Peternakan	Diskannak
	7) Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kemandirian Pangan	BP4KKP, Diperta TPH, Diskannak, Dinas Hutbun Pertambangan & ESDM
	8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Produksi Pertanian	Diperta TPH, Dinas PU
	9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kesehatan Ternak	Diskannak, SKPD terkait
	10) Program peningkatan penerapan teknologi perikanan	Produksi Perikanan	Diskannak
	11) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya perikanan	Kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian sumberdaya perikanan	Diskannak, SKPD terkait
	12) Program pembinaan kelompok budidaya perikanan	Kemandirian Kelompok	Diskannak, BP4KKP

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Strategi 9 : Penciptaan Lapangan Kerja, Daya Saing Tenaga Kerja Serta Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan			
1. Menciptakan peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja	1) Program Peningkatan kesempatan kerja	Angka Pengangguran	Dinsosnakertrans
	2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Daya Saing Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
	3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Tingkat Kepuasan Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
	4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi dan UKM yang sehat dan mandiri	Dinas Koperindag UKM
2. Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk	1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Daya Saing Tenaga Kerja	Dinsosnakertran, SKPD Terkait
	2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil pertanian / perkebunan	Pangsa pasar produk pertanian /perkebunan	Diperta TPH Dinas Hutbun Pertambangan & ESDM
	3) Program Peningkatan dan Pemasaran Hasil peternakan	Pangsa pasar produk hasil peternakan	Diskannak
	4) Program Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pangsa pasar produk perikanan	Diskannak
	5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Kapasitas penyuluh (stratanya)	BP4KKP, Diperta TPH, Diskannak
3. Meningkatkan SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja	1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Daya Saing Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja bersertifikat	Dinsosnakertran, SKPD Terkait
	2) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Enterpreunership (Usahawan) Muda Baru	Disporabudpar, SKPD Terkait
Strategi 10 : Percepatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dan MDG's			
1. Meningkatkan perkembangan sektor sektor ekonomi produktif daerah	1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi / UKM yang mandiri	Dinas Koperindag, Bag. Ekonomi SDA Setda
	2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM	Jumlah UKM Berkembangnya UKM	Dinas Koperindag UKM
	3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi yang aktif Kelas Koperasi A, B, dst	Dinas Koperindag UKM
	4) Program pengembangan usaha-usaha kecil menengah perikanan	Pemberdayaan kelompok usaha perikanan Jumlah kelompok usahanya	
	5) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Berkembangnya Dunia Usaha	Bag. ESDA Setda
2. Meningkatkan pengembangan unit-unit usaha berbasis pedesaan	1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	LPM aktif	BPMPD
	2) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan	BPMPD
	3) Program Peningkatan Peran Perempuan di	Produktivitas kerja perempuan pedesaan	BPMPD

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Perdesaan		
	4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Kesejahteraan masyarakat desa Jumlah masya yg berpartisipasi	BMPMPD
	5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kemampuan Lembaga Tani NTP	Diperta TPH. BP4KKP
3. Meningkatkan implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan	1) Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Implementasi rencana pembangunan ekonomi	Bappeda
	2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)	Angka kemiskinan	Bappeda, Dinsosnakertrans
	3) Program pelayanan Raskin	Kebutuhan pangan pokok masyarakat miskin	Seluruh Kecamatan
Strategi II : Peningkatan Mutu Dan Layanan Pendidikan Formal Dan Informal, Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dan Pemerataan Akses Pendidikan			
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kependidikan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil	1) Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kelulusan siswa (%) • Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV • Persentase guru yang bersertifikasi • Persentase Guru Mengikuti Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalisme Berkelanjutan 	Dinas Pendidikan
2. Menyediakan sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> • PAUD yang terakreditasi • APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS) • Persentase Ptk Paud-Ni Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi 	Dinas Pendidikan
	2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	APM SD, APK SD dan APS SD APM SMP, APK SMP dan APS SMP	Dinas Pendidikan
	3) Program Pendidikan Menengah	APM SMA, APK SMA dan APS SMA	Dinas Pendidikan
	4) Program Pendidikan Non Formal	• Angka Melek Huruf dan Rata - Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan
	5) Program pengembangan budaya baca dan perpustakaan	Jumlah kunjungan pengunjung perpustakaan	Pustarda
3. Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan khusus untuk SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu	1) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah • Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah • Peserta Didik SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan 	Dinas Pendidikan
	2) Program Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik SMP/SMPLB yang melanjutkan pendidikan • Peserta Didik SMA/SMALB Putus Sekolah 	Dinas Pendidikan
4. Membangun SMU/SMK di setiap kecamatan secara	1) Program Pendidikan Menengah	SMU/SMK di setiap kecamatan	Dinas Pendidikan

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
bertahap			
5. Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran yang berasal dari daerah	1) Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Ratio Dokter terhadap jumlah penduduk	BKD, Bag. Kesra Setda
Strategi 12 : Pemantapan Pemahaman Dan Pengamalan Serta Layanan Keagamaan			
1. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis	1) Program pengembangan wawasan kebangsaan	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Bag. Kesra Setda, Dinsosnakertrans, Bag. Tata Pemerintahan Setda, Satpol PP
2. Meningkatkan layanan keagamaan serta sarana prasarana keagamaan	1) Program Pembinaan dan pengembangan keagamaan	Kualitas kehidupan dan kerukunan beragama	Bag. Kesra Setda, Sekretariat Korpri
	2) Program Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Kualitas kehidupan dan kerukunan beragama	Kantor Korpri
Strategi 13 : Penyediaan Layanan Sosial, Pemuda, Olahraga, Budaya, Seni Dan Pariwisata			
1. Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial	1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Angka kemiskinan	Dinsosnakertrans
	2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinsosnakertrans
	3) Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar	Dinsosnakertrans
	4) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Anak yatim dan jompo yang disantuni	Dinsosnakertrans, Bag. Kesra Setda
	5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Layanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsosnakertrans
2. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana	1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Cakupan pelayan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	BPBD
	2) Program Pasca Bencana	Korban bencana yang ditangani	BPBD
	3) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Cakupan layanan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial	BPBD, Dinas PU
3. Meningkatkan peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan	1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peran pemuda dalam pembangunan	Disporabudpar
	2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prestasi olahraga	Disporabudpar
	3) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Prestasi Olahraga	Disporabudpar, Bag. Kesra Setda
	4) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Partisipasi pemuda dalam pembangunan	Disporabudpar
	5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Prestasi Olahraga	Disporabudpar

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	6) Program Pembinaan dan Permasalahan Olahraga dan Seni	Prestasi Olahraga	Kantor Korpri
4. Melestarikan seni dan cagar budaya daerah	1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya	Disporabudpar
	2) Program Pengelolaan kekayaan budaya	Kelestarian budaya daerah	Disporabudpar
	3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kunjungan objek wisata daerah	Disporabudpar
	4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan objek wisata daerah	Disporabudpar
	5) Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan Kekayaan Budaya		Disporabudpar
	6) Program Pengembangan Kemitraan		Disporabudpar
	7) Program pengembangan nilai budaya	Nilai Budaya	Bag. Kesra Setda
5. Meningkatkan peran perempuan serta pengarusutamaan gender	1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Partisipasi perempuan dan perlindungan anak	BPPPAKB
	2) Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan peran perempuan dalam organisasi pemerintah daerah Angka keluarga sejahtera	BPPPAKB, SKPD Terkait
	3) Program Keresasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi perempuan dan perlindungan anak	BPPPAKB, SKPD Terkait
	4) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Cakupan layanan perlindungan perempuan Kasus KDRT	BPPPAKB, SKPD Terkait
	5) Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Angka keluarga sejahtera	BPPPAKB, SKPD Terkait
	6) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan peran perempuan dalam organisasi pemerintah daerah	Bag. Kesra Setda
6. Melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah kematian ibu angka kematian bayi	Dinas Kesehatan
	2) Program Pelayanan KB-KS	Jumlah Angka KB Aktif dan Keluarga Sejahtera	BP3AKB
Strategi 14 : Peningkatan Layanan Serta Pemerataan Akses Kesehatan			
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%),Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	Dinas Kesehatan
	2) Program peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Pelayanan Anak Balita	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
	3) Program Perbaikan Gizi Kesehatan Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
		Prevalensi gizi buruk/ Persentase Balita gizi buruk	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	4) Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Angka keluarga sejahtera	Dinas Kesehatan, BP3AKB	
	5) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Dinas Kesehatan	
	6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit	
	7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Kasus penyakit menular - Cakupan desa/Kelurahan UCI - Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, penemuan pasien baru TB BTA positif (%)	Dinas Kesehatan	
	8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan sarana air bersih Cakupan jamban sehat	Dinas Kesehatan	
	9) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan	
	10) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Kasus penyalahgunaan narkoba, Angka Penyadang Masalah Sosial (PMS)	BP3AKB	
	2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	1) Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Layanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
		2) Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan	Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT)	Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, SKPD Terkait
		3) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan	
5) Program Pengawasan Obat dan makanan		Apotek Berizin Pembinaan Toko Obat	Dinas Kesehatan	
6) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia		Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT)	Dinas Kesehatan	
3. Meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di RSUD Pambalah Batung	1) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	
	2) Program Penyelenggaraan BLUD	Length of Stay Bed Turn Over Bed Occupation Rate (BOR)	Rumah Sakit	
4. Menjadikan RSUD Pambalah Batung sebagai rumah sakit rujukan lintas daerah	1) Program Peningkatan Kapasitas dan sumber daya aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Rumah Sakit	
	2) Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Length of Stay Bed Turn Over Bed Occupation Rate (BOR)	Rumah Sakit	
5. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan di RSUD	1) Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Length of Stay Bed Turn Over	Rumah Sakit	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Pembalah Batung		Bed Occupation Rate (BOR)	
	2) Program Penyelenggaraan BLUD	Length of Stay Bed Turn Over Bed Occupation Rate (BOR)	Rumah Sakit
6. Meningkatkan Puskesmas di daerah-daerah yang sulit dan jauh dari RS untuk menjadi puskesmas rawat inap	1) Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kunjungan puskesmas	Dinas Kesehatan
	2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	ISO Puskesmas	Dinas Kesehatan
7. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan utamanya yang bertugas di daerah terpencil	1) Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil	Dinas Kesehatan
	2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan
Strategi 15 : Peningkatan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan Dan Infrastruktur Sosial Lainnya			
1. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya	1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Aksesibilitas antar wilayah	Dinas PU
	2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Arus lalu lintas Kepuasan masyarakat	Dinas PU
	3) Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Wilayah rawan longsor	Dinas PU
	4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan talud/bronjong	Wilayah rawan longsor	Dinas PU
	5) Program pembangunan/ rehabilitasi gedung pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang memenuhi standar	Dinas PU
	6) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Arus lalu lintas Kepuasan masyarakat	Dinas PU, BPBD
	7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Sistem tata air Cakupan jaringan irigasi Cakupan pelayanan air bersih / air minum	Dinas PU
	8) Program Pengendalian Banjir	kawasan rawan bencana banjir	Dinas PU
	9) Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kawasan rawan bencana kebakaran	BPBD
	10) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Arus penumpang Kepuasan masyarakat	Dishubkominfo
	11) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Arus penumpang dan bongkar muat barang Kepuasan masyarakat	Dishubkominfo
	12) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Arus penumpang dan bongkar muat barang Kepuasan masyarakat	Dishubkominfo
	13) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	Dishubkominfo
	14) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Angka kecelakaan	Dishubkominfo
	15) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah	Dishubkominfo, Bag.

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	dan Media massa		Pembangunan Setda, Bag. Humas Setda, Bappeda
	16) Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Kawasan rawan genangan	Dinas PU, Dinas Pasar, Kebersihan & Tata Kota
	17) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak pakai	Dinas PU
	18) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembangunan Jalan Gang/Lingkungan Perumahan	Aksesibilitas masyarakat	Dinas PU
2. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya	1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Cakupan pelayanan air bersih / air minum	Dinas PU, PDAM
	2) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan pelayanan air bersih / air minum	Dinas PU, PDAM
	3) Program Pengembangan Perumahan	Rumah layak huni	Dinas PU
	4) Program rehabilitasi/ pembangunan jalan lingkungan perumahan dan permukiman	Aksesibilitas lingkungan perumahan dan permukiman Luas kawasan kumuh permukiman	Dinas PU
	5) Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kualitas lingkungan perumahan	Dinas PU, KPLH Dinas Pasar, Kebersihan & Tata Kota
	6) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kualitas lingkungan permukiman	Dinas PU, KPLH, Dinas Kesehatan, DPKT
	7) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Jumlah rumah yang memiliki fasilitas MCK	Dinas PU
3. Mewujudkan pengembangan wilayah dan perluasan kota Amuntai	1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas kawasan perkotaan	Bappeda, Dinas PU, DPKT
	2) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan kota	Dinas PU, Bappeda
	3) Program Pembangunan Kota Amuntai	Terbangunnya infrastruktur dasar di kawasan pengembangan kota Amuntai	Bag. Umum Setda, Dinas PU, DPKT, Dishub Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperindag UKM
4. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur desa melalui dana stimulan gotong royong	1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat	Dinas PU, BPMPD

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Strategi 16 : Perlindungan Dan Perbaikan Lingkungan Hidup Serta Ekosistem Rawa			
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran lingkungan	KPLH
	2) Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat polusi	KPLH
	3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kebersihan kota / wilayah Ranking adipura	KPLH DPKT, SKPD Terkait
	4) Program Peningkatan Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Proporsi RTH publik Indeks Kepuasan Masyarakat	DPKT
	5) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	Bag. ESDA Setda
2. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mawadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian	1) Program Perencanaan Tata Ruang	Implementasi regulasi perencanaan tata ruang	Bappeda (BKPRD)
	2) Program Pemanfaatan Ruang	Implementasi regulasi pemanfaatan ruang	Bappeda (BKPRD) Dinas PU, DPKT
	3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Implementasi regulasi pengendalian pemanfaatan ruang	Bappeda (BKPRD)
	4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Proporsi ruang terbuka hijau	Bappeda, KPLH
3. Meningkatkan pengembangan dan konservasi sumberdaya air untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan lahan rawa	1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tingkat kerusakan sumber daya alam	Dinas Hutbun, Pertambangan & ESDM, KPLH, SKPD Terkait
	2) Program Pengendalian Banjir	Kawasan rawan banjir	Dinas PU, BPBD
	3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Cadangan Sumber Daya Alam	Implementasi rencana dalam dokumen Pengendalian Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KPLH, Bappeda
	4) Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan kritis	Dinas Hutbun, Pertambangan & ESDM
	5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Informasi Lingkungan	KPLH
	6) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Kualitas Ekosistem Rawa	Bag. ESDA Setda
	7) Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Lahan	Bag. ESDA Setda
	8) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya Hutan	Berkurangnya lahan kritis Kualitas Ekosistem Rawa	Dishutbun ESDM
	9) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Ketertiban ijin industri	Dishutbun ESDM
	10) Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya lahan kritis	Dishutbun ESDM
	11) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Deteksi dini pada lokasi rawan longsor dan banjir	Dishutbun ESDM
	12) Program Perlindungan peningkatan kualitas pemanfaatan dan konservasi SDA dan LH	Cakupan masyarakat yang membutuhkan air bersih	Dishutbun ESDM

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
4. Mengamankan Sumber Air sub-sub DAS Tabalong dan Balangan dari dampak pertambangan di wilayah hulu	1) Program peningkatan koordinasi antar daerah dan lintas instansi (sektor publik dan sektor privat) pengamanan sub-sub DAS Tabalong dan Balangan sebagai upaya preventif dampak negatif pertambangan di wilayah hulu	Menurunnya kada polutan pada sub-sub DAS Tabalong dan Balangan	KPLH, Dinas Hutbun dan ESDM, Bag. Ekonomi SDA Setda
	2) Program Peningkatan Koordinasi anatar daerah dan lintas instansi (sektor publik dan sektor privat) pengamanan sub-sub DAS Tabalong dan Balangan	Kadar Polutan pada sub-sub DAS Tabalong dan Balangan	Dishutbun ESDM
	3) Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Dipenuhinya peraturan bidang pertambangan oleh masyarakat	Dishutbun ESDM

BAB VIII.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 merupakan pelaksanaan tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan atas visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kerja kepala daerah periode 2013-2017.

Indikasi rencana program prioritas mengacu pada program-program sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara lengkap Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.1. Indikasi program dan kegiatan prioritas beserta pendanaan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pada setiap SKPD :

Tabel 8.1.

Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas beserta Pendanaan berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan pada setiap SKPD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN																
Urusan Wajib																
1	01	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, indeks Kepuasan Pegawai											Disdik
PENDIDIKAN																
1	01	xx	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD yang terakreditasi											Disdik
1	01	xx	16	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	APM SD	92,85	95,23	96,42	97,61	98,80		100		100		Disdik
					APK SD	102,84	100	100	100	100		100		100		Disdik
					APS SD	98,91	99,27	99,46	99,64	99,82		100		100		Disdik
					APM SMP	68,62	74,09	76,82	79,55	82,28		85,01		85,01		Disdik
					APK SMP	83,81	90,15	93,32	96,49	99,66		100		100		Disdik
					APS SMP	86,9	91,45	92,54	93,63	94,72		95,81		95,81		Disdik
1	01	xx	17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA	46,81	52,39	55,18	57,97	60,76		63,55		63,55		Disdik
					APK SMA	70,3	81,7	87,4	93,1	98,8		100		100		Disdik
					APS SMA	91,1	70,34	74,04	77,74	81,44		85,14		85,14		Disdik
1	01	xx	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	96,02	96,19	96,26	96,34	96,42		96,50		96,50		Disdik
					Rata-rata Lama Sekolah	7,48	7,82	7,99	8,16	8,33		8,50		8,50		Disdik
1	01	xx	20	Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Angka Kelulusan Siswa (%)											Disdik
					- SD/MI	97,5	100	100	100	100		100		100		Disdik
					- SMP/MTs	86,9	93,72	94,18	94,64	95,00		99,98		99,98		Disdik
					- SMA/SMK/MA	91,1	99,93	99,95	99,97	99,98		100		100		Disdik
					Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV											Disdik
					Persentase Guru yang bersertifikasi											Disdik
					Persentase Guru mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Berkelanjutan											Disdik
1	01	xx	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan												Disdik

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
JUMLAH DINAS PENDIDIKAN				54.877.405.234		57.895.662.522		60.935.184.805		63.890.541.268		67.053.123.061		304.651.916.890		Disdik
Nama SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																
1				Urusan Wajib												
1	17			Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata												
1	17	xx	01	Program Pelayanan Administrasi kantor	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, indeks Kepuasan Pegawai											Dispora Budpar
1	17	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur											Dispora Budpar
1	17	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	2 org	2 org	2 org	3 org	5 org		5 org		5 org		Dispora Budpar
1	17	xx	06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	5 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt		7 Pkt		7 Pkt		Dispora Budpar
1	17			KEBUDAYAAN												Dispora Budpar
1	17	xx	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kelestarian budaya daerah	87,27	15 org 6 bcb	15 org 6 bcb	15 org 6 bcb	15 org 6 bcb		15 org 6 bcb		15 org 6 bcb		Dispora Budpar
1	17	xx	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya	10 sanggar	10 sggr	10 sggr	10 sggr		10 sggr		10 sggr		10 sggr	Dispora Budpar
1	17	xx	18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Partisipasi LSM/Perusahaan			2 unit	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		Dispora Budpar
																Dispora Budpar
2	04	xx	17	Program Pengembangan kemitraan	Tingkat Partisipasi LSM/Perusahaan	68,26	6 keg	6 keg	6 keg	6 keg		6 keg		6 keg		Dispora Budpar
1	18			PEMUDA DAN OLAHRAGA												Dispora Budpar
1	18	xx	15	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	60%	75%	50 org	50 org	50 org		50 org		50 org		Dispora Budpar
1	18	xx	16	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	Peran Pemuda dalam Pembangunan	38 orgns	39 orgns	40 orgns	40 orgns	42 orgns		45 orgns		45 orgns		Dispora Budpar
1	18	xx	17	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Enterpreunership (usahawan) muda baru		50 org	50 org	50 org	50 org		50 org		50 org		Dispora Budpar

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	18	xx	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Prestasi olahraga			6 cabor		12 cabor		19 cabor		25 cabor		25 cabor		Dispora Budpar	
1	18	xx	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Prestasi olahraga	20 cabor	22 cabor	22 cabor		22 cabor		24 cabor		24 cabor		24 cabor		Dispora Budpar	
1	18	xx	21	Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Prestasi olahraga	36,22	8 bh 10 bh	8 bh 10 bh		8 bh 10 bh		8 bh 10 bh		8 bh 10 bh		8 bh 10 bh		Dispora Budpar	
				KEPARIWISATA AN														Dispora Budpar	
2	04	xx	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisata	10.000 Org	10.000 Org	12.000 org		13.000 org		14.000 org		15.000 org		15.000 org		Dispora Budpar	
JUMLAH DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							6.782.518.045	7.155.556.537	7.531.223.255	7.896.487.583	8.287.363.719	37.653.149.139						Dispora Budpar	
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																			
Urusan Wajib																			
Pelayanan Umum																			
x	xx	xx	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	60%	60%	65%		65%		70%		70%		75%		Ktr. Pustarda	
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	60%	60%	65%		70%		70%		75%		80%		Ktr. Pustarda	
x	xx	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	4 org		4 org		4 org		4 org		4 org		4 org		Ktr. Pustarda	
x	xx	xx	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	90%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Ktr. Pustarda	
1	01			Pendidikan														Ktr. Pustarda	
1	01	xx	21	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terciptanya masyarakat Kab.HSU yang berwawasan luas dan berilmu pengetahuan		28%	30%		33%		37%		37%		37%		Ktr. Pustarda	
1	24			Kearsipan														Ktr. Pustarda	
1	24	xx	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan														Ktr. Pustarda	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	24	xx	16	Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah													Ktr. Pustarda	
1	24	xx	17	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan													Ktr. Pustarda	
1	24	xx	18	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dokumen kearsipan		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org	Ktr. Pustarda
JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							1.361.344.894		1.436.218.864		1.511.620.354		1.584.933.941		1.663.388.171		7.557.506.224	
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN																		
Urusan Wajib																		
1	02			DINAS KESEHATAN														
1	02	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, indeks Kepuasan Pegawai													Dinkes
1	02	xx	02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur													Dinkes
1	02	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur													Dinkes
1	02	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah													Dinkes
		xx	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur														Dinkes
KESEHATAN																		
1	02	xx	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan													Dinkes
1	02	xx	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	63,47	64,26		64,45		64,63		64,82		65,00		65,00	Dinkes
1	02	xx	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pembinaan Penyalahgunaan obat dan penggunaan bahan makanan berbahaya kepada anak sekolah													Dinkes

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	02	xx	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT)												Dinkes
1	02	xx	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												Dinkes
1	02	xx	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk/ persentase balita gizi buruk (%)	5,29	5,25	5,2	5,15	5,1	5	5	5	5			Dinkes
					Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100			Dinkes
1	02	xx	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Sarana Air Bersih												Dinkes
					Cakupan Jamban Keluarga												Dinkes
1	02	xx	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%)	85,4	95	100	100	100	100	100	100	100			Dinkes
					Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100			Dinkes
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, penemuan pasien baru TB BTA positif (%)	53,99	55	60	65	70	70	70	70	70			Dinkes
					Kasus Penyakit Menular												Dinkes
1	02	xx	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	ISO Puskesmas												Dinkes
1	02	xx	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan Penduduk Miskin												Dinkes
1	02	xx	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kunjungan Puskesmas	78,43 %	86%	87%	88%	89%	90%	90%	0,9				Dinkes
1	02	xx	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	73,5 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1				Dinkes

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab					
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
1	02	xx	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	85,76	86		87		90		93		95		95		Dinkes
					Cakupan Kunjungan Balita (%)	45,87	70		80		90		93		95		95		Dinkes
1	02	xx	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan Lansia														Dinkes
1	02	xx	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pembinaan terhadap industri Rumah tangga (IRT)														Dinkes
1	02	xx	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Jumlah Kematian Ibu	18	16		14		12		11		10		10		Dinkes
					Angka Kematian Bayi	23,97	23		22		22		21		21		21		Dinkes
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	89,91	89		89		90		90		90		90		Dinkes
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	86,46	87		89		90		93		95		95		Dinkes
1	02	xx	33	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Masyarakat														Dinkes
					STATISTIK														Dinkes
1	23	xx	15	Program Pengembangan Data dan Informasi	Kualitas perencanaan pembangunan														Dinkes
					PERENCANAAN PEMBANGUNAN														Dinkes
1	06	xx	20	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan	Kualitas perencanaan pembangunan														Dinkes
					KELUARGA BERENCANA														Dinkes
1	12	xx	26	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Angka Keluarga Sejahtera														Dinkes
				JUMLAH DINAS KESEHATAN			24.256.121.495		25.590.208.177		26.933.694.106		28.239.978.270		29.637.857.195		134.657.859.242		Dinkes
				Nama SKPD : RUMAS SAKIT PEMBALAH BATUNG															
				Urusan Wajib															
				KESEHATAN															RSU

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
																	Pembalah Batung
1	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran												RSU Pembalah Batung
1	02	01	33	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya parameter pelayanan												RSU Pembalah Batung
					BOR	57%	57%		58%	59%		60%		60%		60%	RSU Pembalah Batung
					LOS	3 hari	3 hari		4 hari	5 hari		6 hari		7 hari		7 hari	RSU Pembalah Batung
					TOI	2 hari	2 hari		2 hari	2 hari		1 hari		1 hari		1 hari	RSU Pembalah Batung
					BTO	68 kali	68 kali		70 kali	70 kali		70 kali		70 kali		70 kali	RSU Pembalah Batung
1	02	01	xx	Program Penyelenggaraan BLUD	Terpenuhinya parameter pelayanan BLUD melalui Rencana Strategis Bisnis												RSU Pembalah Batung
																	RSU Pembalah Batung
JUMLAH RUMAH SAKIT PEMBALAH BATUNG						15.437.165.499		16.286.209.602		17.141.235.606		17.972.585.533		18.862.228.516		85.699.424.755	RSU Pembalah Batung
Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1				URUSAN WAJIB Pelayanan Umum													
X	X	X	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													Dishubkomi nfo
X	X	X	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur													Dishubkomi nfo
X	X	X	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur													Dishubkomi nfo
X	X	X	05	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur													Dishubkomi nfo
																	Dishubkomi nfo
1	07			Perhubungan													Dishubkomi nfo
1	07		16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	50%	-	100,00%	-								Dishubkomi nfo

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	07	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	terciptanya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan													Dishubkominfo
			Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas														Dishubkominfo
1	7	18	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan														Dishubkominfo
1	25		Komunikasi														Dishubkominfo
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa														Dishubkominfo
1	25	18	Program kerjasama informasi dengan mas media	beroperasinya website Kab.HSU													Dishubkominfo
																	Dishubkominfo
JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.237.475.084	4.470.536.213	4.705.239.364	4.933.443.474	5.177.648.925	23.524.343.060							
Nama SKPD : DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA																	
Urusan Wajib																	
1	03	16	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	tercapainya penyediaan saluran drainase kota yang terintegrasi dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	91,00%		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPKT
				tercapainya pengaturan tata bangunan dan reklame di Kab.HSU	91,00%		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPKT
1	07	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	tersedianya PJU di lingkungan permukiman dan meningkatkan estetika kota	91,00%		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPKT

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	tersedianya fasilitas pengurangan sampah	belum adanya sistem pengelolaan persampahan terpadu	Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah		pengelolaan sampah dengan metode 3R		peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparatur dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah		Peningkatan kreativitas dgn modifikasi sampah sbg barang yang mempunyai nilai ekonomis		tereduksinya timbunan sampah di TPA Regional Tebing Liring		tereduksinya timbunan sampah di TPA Regional Tebing Liring	DPKT
				peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu		91,00%		1		1		1		1		1	DPKT
1	08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan Hidup	masih kurangnya pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan	Peningkatan keterampilan SDM dlm pengendalian & pencemaran lingkungan		pemantauan kondisi pencemaran lingkungan		Penilaian hasil pemantauan pencemaran lingkungan		evaluasi hasil pemantauan pencemaran lingkungan		tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pencemaran lingkungan		tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pencemaran lingkungan	DPKT
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	terlindungnya kawasan konservasi yang ada di Kabupaten	masih kurangnya perlindungan terhadap kawasan konservasi	inventarisasi luasan wilayah konservasi		penyusunan perencanaan wilayah konservasi		penetapan wilayah konservasi sumber daya alam		monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan wilayah konservasi sumber daya alam		terciptanya kawasan konservasi yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan		Terciptanya kawasan konservasi yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan	DPKT
1	08	18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	terciptanya pemulihan kondisi lingkungan	belum maksimalnya program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	identifikasi lahan kritis yang ada di Kabupaten		terciptanya pemulihan kondisi lingkungan		terciptanya pemulihan kondisi lingkungan		terciptanya pemulihan kondisi lingkungan		terciptanya pemulihan kondisi lingkungan		terciptanya pemulihan kondisi lingkungan	DPKT

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	terciptanya informasi yang aktual terhadap kondisi Lingkungan Hidup	belum adanya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	pembangunan sistem informasi lingkungan hidup		pembangunan sistem informasi lingkungan hidup		terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup		pengembangan sistem informasi lingkungan hidup		terciptanya pemanfaatan sistem informasi lingkungan hidup untuk pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		Terciptanya pemanfaatan sistem informasi lingkungan hidup untuk pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	DPKT
1	08	20	Program peningkatan pengendalian polusi														DPKT
1	08	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan														DPKT
1	08	22	Program Pengendalian kebakaran hutan	terjaganya kawasan hutan dan lahan produktif dari kebakaran	masih adanya kabut asap di wilayah Kabupaten	penentuan hot spot yang ada di Kabupaten HSU maupun tetangga		peningkatan pengawasan terhadap daerah yang berpotensi kebakaran		Terciptanya standar operasional dalam pemanfaatan lahan yang berpotensi kebakaran		Terciptanya pengetahuan pengelolaan lahan hot spot yang baik oleh masyarakat		Terciptanya koordinasi penanganan kebakaran hutan antar wilayah		Terciptanya koordinasi penanganan kebakaran hutan antar wilayah	DPKT
2	08	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	penambahan dan peningkatan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)		91,00%		1		1		1		1		1	DPKT
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pedagang Pengusaha memiliki izin usaha	10 Kecamatan	10 Kec		10 Kec		10 kec		10 Kec		10 Kec		10 Kec	DPKT
				Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar		91,00%		1		1		1		1		1	DPKT
2	06	19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		91,00%		1		1		1		1		1	DPKT
JUMLAH DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA						12.534.384.191		13.223.775.322		13.918.023.526		14.593.047.667		15.315.403.526		69.584.634.232	
Nama SKPD : KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Urusan Wajib																	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
			67,90%	20,58%		0		0		0		1				PU	
1	03	24	Program Pengembangan Jaringan Jalan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	terpeliharanya jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	30 ha	30ha		30ha		30ha		30 ha		150 ha		2	PU
				terlayannya kebutuhan kawasan pertanian	40 ha	40 ha		40 ha		40 ha		40 ha		40 ha		200 ha	PU
				tercapainya peningkatan fungsi irigasi/rawa	15%	15%		0		0		0		0		1	PU
1	03	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	rumah tangga pengguna air bersih	26,78%	5%		0		0		0		0		0	PU
				Cakupan pelayanan air bersih	26,78%												PU
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	cakupan pelayanan air minum	22,93%			0		0		0		0		1	PU
1	03	28	Program Pengendalian Banjir	Peningkatan Sarana Penanggulangan Banjir	10%	10,00%		0		0		0		0		1	PU
1	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang	50%	10,00%		0		0		0		0		1	PU
				jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan mutunya	56 bh	3 bh		3 bh		3 bh		3 bh		19 bh			PU
1	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Aksesibilitas antar desa	20,48%	9,93%		0		0		0		0		0	PU
1	04		Perumahan														
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	rasio rumah layak huni	86,22%			0		0		0		0		0	PU
				jumlah rumah layak huni	46.930 bh	199 bh		199 bh		210 bh		210 bh		818 bh			PU
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tangga bersantasi	57,66%	0,10%		0		0		0		0		0	PU
				Jumlah Rumah berjamaban	31.387 bh	20 unit		20 unit		23 unit		23 unit		116 uit			PU

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp		
		* Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak pakai			0		0		0		0		0		0	PU	
		* Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Jumlah rumah yang memiliki fasilitas MCK	31.387 bh		30 unit		30 unit		30 unit		31 unit		121 unit			PU	
		* Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembangunan Jalan Gang/Lingkungan Perumahan	Aksesibilitas masyarakat	25,62%		0		0		0		0		1			PU	
		Pelayanan Umum																
X	X X	03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	set/unit	228	56 set		56 set		56 set		56 set		56 set			PU	
X	X X	04	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														PU	
JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM						83.794.194.199		88.402.874.880		93.044.025.811		97.556.661.063		102.385.715.786		465.183.471.739		
Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
Urusan Wajib																		
Pelayanan Umum																		
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai		100%		100%		100%		100%		100%		Bappeda	
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Bappeda	
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Bappeda	
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah												Bappeda	
1	20			Pemerintahan Umum														Bappeda
1	20	xx	23	11. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pengunjung website pemerintah daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bappeda	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	06			Perencanaan Pembangunan Daerah													Bappeda		
1	06	xx	21	1. Program perencanaan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan daerah													Bappeda	
1	06	xx	18	2. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3 dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh												Bappeda	
1	06	xx	19	4. Program perencanaan pengembangan kota-kota kecil, menengah dan besar	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3		Bappeda	
1	06	xx	23	5. Program perencanaan sosial dan budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud													Bappeda	
1	06	xx	15	6. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kualitas perencanaan pembangunan													Bappeda	
1	06	xx	20	7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan													Bappeda	
1	06	xx	22	10. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	60%		Bappeda	
1	06	xx	16	11. Program Kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan													Bappeda	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
		* Program Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Bahan perumusan perencanaan pembangunan	100	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			Bappeda	
1	05		Penataan Ruang													Bappeda	
1	05	xx	15	1. Program Perencanaan Tata Ruang												Bappeda	
1	05	xx	16	2. Program Pemanfaatan Ruang												Bappeda	
1	04			Perumahan												Bappeda	
1	04	xx	15	1. Program Pengembangan Perumahan		1		1		2		2		2		Bappeda	
1	03			Pekerjaan Umum												Bappeda	
1	03	xx	29	1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh												Bappeda	
1	03	xx	22	2. Program Pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan												Bappeda	
JUMLAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						7.377.810.459		7.783.590.035		8.192.228.512		8.589.551.594		9.014.734.398		40.957.914.999	Bappeda
Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																	
Urusan Wajib																	Disducatpil
Pelayanan Umum																	Disducatpil
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran													Disducatpil
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													Disducatpil
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													Disducatpil
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													Disducatpil
1	10			Kependudukan dan Catatan Sipil													Disducatpil

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	10	xx	15	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Kependudukan													Disducatpil	
					- e- KTP	69,96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disducatpil	
					- Akta Kelahiran	13,98%	17,96%	21,98%	25,98%	29,98%	33,98%	33,98%	33,98%	33,98%	33,98%	33,98%	33,98%	Disducatpil	
					- Kartu Keluarga	84,45%	94,28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disducatpil	
																		Disducatpil	
JUMLAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							3.676.607.142		3.878.820.535		4.082.458.613		4.280.457.856		4.492.340.520		20.410.684.666	Disducatpil	
Nama SKPD : BADAN PEMBERPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA																			
Urusan Wajib																			
1	11			Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana															
1	11	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, indeks Kepuasan Pegawai		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BP3AKB	
1	11	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BP3AKB	
1	11	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BP3AKB	
1	11			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														BP3AKB	
1	11	xx	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi perempuan dan perlindungan anak													BP3AKB	
1	11	xx	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi perempuan dan perlindungan anak													BP3AKB	
1	11	xx	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan, Kasus KDRT													BP3AKB	
1	11	xx	18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan peran perempuan dalam organisasi pemerintah daerah.													BP3AKB	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
	16	Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial	Teratasinya masalah masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa														BPBD
	19	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Meminimalisir Bahaya Kebakaran														BPBD
	22	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	Meningkatkan pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam														BPBD
	24	Pasca Bencana	Membuat susunan program dan rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana														BPBD
	25	Perencanaan Pembangunan Daerah rawan Bencana	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan daerah rawan bencana														BPBD
	29	Pengendalian Banjir	Kawasan Rawan Banjir														BPBD
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Arus Lalu Lintas Kepuasan Masyarakat														BPBD
		Perbaikan Perumahan Akibat bencana alam/sosial	Cakupan layanan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial														BPBD
		Perencanaan Pembangunan daerah	Implementasi Rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan renja SKPD dalam pelaksanaan Pembangunan daerah														BPBD
JUMLAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					2.719.882.096		2.869.475.612		3.020.123.081		3.166.599.051		3.323.345.704		15.099.425.544		BPBD
Nama SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
1	13		DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI														

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	13	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, indeks Kepuasan Pegawai												Dinsos nakertran		
1	13	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Dinsos nakertran		
1	13	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Dinsos nakertran		
1	13	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah												Dinsos nakertran		
1	13			SOSIAL													Dinsos nakertran		
1	13	xx	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Angka Kemiskinan												Dinsos nakertran		
1	13	xx	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial												Dinsos nakertran		
1	13	xx	17	Program Pembinaan Anak Terlantar													Dinsos nakertran		
1	13	xx	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Anak yatim dan panti jompo yang disantuni												Dinsos nakertran		
1	13	xx	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Layanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial												Dinsos nakertran		
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LUAR NEGERI													Dinsos nakertran		
1	19	xx	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												Dinsos nakertran		
				PERUMAHAN													Dinsos nakertran		
1	04	xx	20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman													Dinsos nakertran		

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	14			TENAGA KERJA													Dinsos nakertran		
1	14	xx	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja	Daya Saing Tenaga Kerja												Dinsos nakertran		
1	14	xx	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Pengangguran												Dinsos nakertran		
1	14	xx	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pemahaman regulasi ttg ketenagakerjaan												Dinsos nakertran		
				KETRANSMIGRASI IAN													Dinsos nakertran		
2	08	xx	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi													Dinsos nakertran		
2	08	xx	16	Program Transmigrasi Lokal													Dinsos nakertran		
JUMLAH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							3.076.708.796	3.245.927.780	3.416.338.988	3.582.031.429	3.759.341.985	17.080.348.977							
Nama SKPD : DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																			
				Urusan Wajib													Dis. koperindag		
				Pelayanan Umum													Dis. koperindag		
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun			Dis. koperindag		
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	75%	75%	75%	80%	80%	85%	85%					Dis. koperindag		
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%				Dis. koperindag		
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%					Dis. koperindag		
1	15			Koperasi dan UKM													Dis. koperindag		
1	15	xx	16	1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	Koperasi dan UKM yang sehat dan mandiri	98 Koperasi Aktif dan 107.844	100 Koperasi aktif dan 108.922	102 Koperasi aktif dan 110.011	105 Koperasi aktif dan 111.111	107 Koperasi aktif dan 112.222	110 Koperasi aktif dan 113.345	110 Koperasi aktif dan 113.345					Dis. koperindag		

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			UMK	UMK		UMK		UMK		UMK		UMK		UMK		
1	15	xx	16	2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Koperasi / UKM yang mandiri											Dis. koperindag
1	15	xx	17	3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM	Jumlah UKM, Berkembangnya UKM	958	1.078	1.089	1.100	1.111	1.123	5.501				Dis. koperindag
1	15	xx	18	4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi yang aktif, Kelas Koperasi A, B, dst	98 Koperasi aktif	100	102	105	107	110	Jumlah Koperasi Aktif				Dis. koperindag
1	15	xx	15	5. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Penyebaran informasi kebijakan, legalitas usaha dan validitas data UKM	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan				Dis. koperindag
				Urusan Pilihan												Dis. koperindag
2	06			Perdagangan												Dis. koperindag
2	06	xx	15	1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perlindungan konsumen dan keamanan produk	10 kec	10 Kec	10 Kec	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec.				Dis. koperindag
2	06	xx	18	2. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri	Pangsa pasar produk dalam negeri	10 Kec.	10 kec.	10 kec.	10 kec.	10 kec.	10 kec	10 kec.				Dis. koperindag
2	07			Perindustrian												Dis. koperindag
2	07	xx	16	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kualitas produksi dan omzet	Nilai produksi Rp. 265.246.343	Nilai produksi Rp. 278.508.660	Nilai produksi Rp. 292.434.093	Nilai produksi Rp. 307.055.797	Nilai produksi Rp. 328.549.703	Nilai produksi Rp. 351.548.183	Nilai produksi Rp. 351.548.183				Dis. koperindag
2	07	xx	17	2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kapasitas dan kualitas industri	10.03%	10.49%	10.90%	11.27%	11.60%	11.91%	11.91%				Dis. koperindag
2	07	xx	19	3. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pasar dan produk	Nilai produksi Rp. 265.246.343	Nilai produksi Rp. 278.508.660	Nilai produksi Rp. 292.434.093	Nilai produksi Rp. 307.055.797	Nilai produksi Rp. 328.549.703	Nilai produksi Rp. 351.548.183	Nilai produksi Rp. 351.548.183				Dis. koperindag
JUMLAH DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						7.591.730.340	8.009.275.509	8.429.762.473	8.838.605.953	9.276.116.947	42.145.491.222					
Nama SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
		Urusan Wajib															Ktr. Satpol PP
		Pelayanan Umum															Ktr. Satpol PP
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	60%	60%	65%	0,7	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8			Ktr. Satpol PP
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	60%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	75%	75%			Ktr. Satpol PP
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	75%	75%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%			Ktr. Satpol PP
x	xx	xx	03	* Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan disiplin aparatur	80%	80%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%			Ktr. Satpol PP
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%			Ktr. Satpol PP
1	20			Pemerintahan Umum													Ktr. Satpol PP
1	20	xx	26	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk hukum daerah dan penegakannya	75%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%			Ktr. Satpol PP
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri													Ktr. Satpol PP
1	19	xx	15	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Lingkungan yang aman dan nyaman	80%	80%	85%	90%	90%	95%	95%	95%	95%			Ktr. Satpol PP
1	19	xx	20	2. Program pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Lingkungan yang aman dan nyaman	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%			Ktr. Satpol PP
JUMLAH KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						2.480.073.955	2.616.478.023	2.753.843.119	2.887.404.510	3.030.331.034	13.768.130.641						
Nama SKPD : SEKRETARIAT DEWAN																	
Urusan Wajib																	Setwan
Pelayanan Umum																	Setwan
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks	60%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%			Setwan

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab					
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	60%	17%	20%	20%	21%	21%	100%							Setwan
x	xx	xx	03	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	(Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur)	77% (120 Stel)	19%	25%	19%	19%	19%	100%							Setwan
1	20			Pemerintahan Umum															Setwan
1	20	xx	15	3. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah															Setwan
					Jangka waktu pembahasan PERDA	71% (1 Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun							Setwan
					Implementasi PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							Setwan
					Indeks Kepuasan Masyarakat	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%							Setwan
1	20	xx	23	11. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pengunjung website pemerintah daerah	0%	21%	25%	6%	27%	21%	100%							Setwan
JUMLAH SEKRETARIAT DEWAN						20.374.396.888	21.494.988.717	22.623.475.625	23.720.714.193	24.894.889.545	113.108.464.969								Setwan
Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH																			
Nama SKPD : BAGIAN UMUM SETDA																			
				Urusan Wajib															Bag. Umum Setda
				Pelayanan Umum															Bag. Umum Setda
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai														Bag. Umum Setda
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur														Bag. Umum Setda
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur														Bag. Umum Setda
1	20			Pemerintahan Umum															Bag. Umum Setda

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	20	xx	16	1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat													Bag. Umum Setda	
				* Program Penyelenggaraan/Pelaksanaan Tugas-tugas dan Operasional Kdh dan WKDh														Bag. Umum Setda	
Nama SKPD : BAGIAN HUKUM SETDA																			
				Urusan Wajib														Bag. Hukum Setda	
1	20			Pemerintahan Umum														Bag. Hukum Setda	
1	20	xx	26	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk hukum daerah dan penegakannya													Bag. Hukum Setda	
Nama SKPD : BAGIAN KEUANGAN SETDA																			
				Urusan Wajib														Bag. Keuangan Setda	
				Pelayanan Umum														Bag. Keuangan Setda	
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai													Bag. Keuangan Setda	
x	xx	xx	05	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur													Bag. Keuangan Setda	
x	xx	xx	06	3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah													Bag. Keuangan Setda	
1	20			Pemerintahan Umum														Bag. Keuangan Setda	
1	20	xx	17	1. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Bag. Keuangan Setda	
Nama SKPD : BAGIAN ASET DAERAH SETDA																			
				Urusan Wajib														Bag. Aset Daerah Setda	
				Pelayanan Umum														Bag. Aset Daerah Setda	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai												Bag. Aset Daerah Setda
x	xx	xx	05	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Bag. Aset Daerah Setda
x	xx	xx	06	3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah												Bag. Aset Daerah Setda
1	20			Pemerintahan Umum													Bag. Aset Daerah Setda
1	20	xx	17	1. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)												Bag. Aset Daerah Setda
Nama SKPD : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA																	
				Urusan Wajib													Bag. Ortal Setda
				Pelayanan Umum													Bag. Ortal Setda
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah												Bag. Ortal Setda
1	20			Pemerintahan Umum													Bag. Ortal Setda
				12. Program peningkatan pelayanan terpadu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi												Bag. Ortal Setda
1	20	xx	27	* Program Penataan Daerah Otonomi Daerah													Bag. Ortal Setda
				* Program Peningkatan Pelayanan Publik													Bag. Ortal Setda
1	21			Kepegawaian													Bag. Ortal Setda
1	21	xx	17	3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kualitas pelayanan publik												Bag. Ortal Setda
Nama SKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA																	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		Urusan Wajib														Bag. Pembangunan Setda
		Pelayanan Umum														Bag. Pembangunan Setda
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai											Bag. Pembangunan Setda
1	20			Pemerintahan Umum												Bag. Pembangunan Setda
				* Program penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan komunikasi dan informasi daerah												Bag. Pembangunan Setda
				* Program peningkatan pelayanan publik												Bag. Pembangunan Setda
1	06			Perencanaan Pembangunan Daerah												Bag. Pembangunan Setda
1	06	xx	15	1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kualitas perencanaan pembangunan											Bag. Pembangunan Setda
1	06	xx	16	2. Program Kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan											Bag. Pembangunan Setda
Nama SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA																
				Urusan Wajib												Bag. Kesra Setda
				Pelayanan Umum												Bag. Kesra Setda
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai											Bag. Kesra Setda
1	21			Kepegawaian												Bag. Kesra Setda
1	21	xx	17	1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur											Bag. Kesra Setda
1	17			Kebudayaan												Bag. Kesra Setda

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	17	xx	15	* Program pengembangan nilai budaya													Bag. Kesra Setda		
1	11			Pemberdayaan Perempuan													Bag. Kesra Setda		
1	11	xx	18	* Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan													Bag. Kesra Setda		
1	18			Pemuda dan Olahraga													Bag. Kesra Setda		
1	18	xx	15	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda													Bag. Kesra Setda		
1	18	xx	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan													Bag. Kesra Setda		
1	13			Sosial													Bag. Kesra Setda		
1	13	xx	16	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial													Bag. Kesra Setda		
																	Bag. Kesra Setda		
																	Bag. Kesra Setda		
				Program pembinaan dan pengembangan keagamaan													Bag. Kesra Setda		
Nama SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA																			
				Urusan Wajib													Bag. Humas Setda		
1	25			Komunikasi dan Informatika													Bag. Humas Setda		
1	25	xx	18	1 Program kerjasama informasi dengan media massa	Cakupan sebaran informasi												Bag. Humas Setda		
1	24			Kearsipan															
1	24	xx	18	2. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dokumen kearsipan												Bag. Humas Setda		
Nama SKPD : BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA																			
				Urusan Wajib													Bag. ESDA Setda		
				Pelayanan Umum													Bag. ESDA Setda		

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai												Bag. ESDA Setda	
x	xx	xx	05	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Bag. ESDA Setda	
1	20			Pemerintahan Umum													Bag. ESDA Setda	
1	20	xx	17	1. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Implementasi regulasi pengelolaan keuangan daerah												Bag. ESDA Setda	
				2. Program Pelayanan Raskin	Kebutuhan pangan pokok masyarakat miskin												Bag. ESDA Setda	
1	16			Penanaman Modal Daerah													Bag. ESDA Setda	
1	16	xx	15	1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Perkembangan Dunia Usaha												Bag. ESDA Setda	
1	16	xx	16	2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	Realisasi Investasi												Bag. ESDA Setda	
1	21			Kepegawaian													Bag. ESDA Setda	
1	21	xx	17	1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur												Bag. ESDA Setda	
1	15			Koperasi dan UKM													Bag. ESDA Setda	
1	15	xx	17	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM	Jumlah UKM, Berkembangnya UKM												Bag. ESDA Setda	
1	15	xx	15	* Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif													Bag. ESDA Setda	
1	08			Lingkungan Hidup													Bag. ESDA Setda	
1	08	xx	16	* Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup													Bag. ESDA Setda	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	08	xx	17	* Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam														Bag. ESDA Setda	
				Urusan Pilihan Pertanian														Bag. ESDA Setda	
				1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kemandirian Pangan													Bag. ESDA Setda	
				Kehutanan														Bag. ESDA Setda	
				* Program rehabilitasi hutan dan lahan														Bag. ESDA Setda	
				Perindustrian														Bag. ESDA Setda	
				1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kualitas produksi dan omzet													Bag. ESDA Setda	
Nama SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA																			
				Urusan Wajib Pemerintahan Umum														Bag. Pemerintah an Setda	
1	20			2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat													Bag. Pemerintah an Setda	
1	20	xx	20	4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Kualitas capaian kinerja pemerintahan													Bag. Pemerintah an Setda	
1	20	xx	25	* Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah														Bag. Pemerintah an Setda	
1	20	xx	27	* Program penataan daerah otonomi baru														Bag. Pemerintah an Setda	
				* Program peningkatan pelayanan administrasi terpadu														Bag. Pemerintah an Setda	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	06																Bag. Pemerintah an Setda
1	06	xx	21	1. Program perencanaan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah												Bag. Pemerintah an Setda
1	06	xx	17	3. Program pengembangan wilayah perbatasan	Sinkronisasi administrasi dan pembangunan wilayah perbatasan												Bag. Pemerintah an Setda
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													Bag. Pemerintah an Setda
1	19	xx	17	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan	Suasana kehidupan beragama dan ikatan sosial dikalangan masyarakat												Bag. Pemerintah an Setda
1	19	xx	18	2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Wawasan kebangsaan masyarakat												Bag. Pemerintah an Setda
1	05			Penataan Ruang													Bag. Pemerintah an Setda
1	05	xx	15	1. Program perencanaan tata ruang													Bag. Pemerintah an Setda
				* Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan													Bag. Pemerintah an Setda
JUMLAH SEKRETARIAT DAERAH						42.365.560.874	44.695.666.722	47.042.189.225	49.323.735.402	51.765.260.304	235.192.412.527					Setda	
Nama SKPD : INSPEKTORAT																	
Urusan Wajib																	
Pelayanan Umum																	Inspektorat
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	58%	65%	78%	83%	89%	92%			92%			Inspektorat
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	20%	20%	22%	67%	73%	80%			80%			Inspektorat
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	16%	16%	60%	70%	75%	80%			80%			Inspektorat

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	80%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	100%				Inspektorat
1	20			Pemerintahan Umum													Inspektorat
1	20	xx	21	1. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Kualitas hasil pemeriksaan dan pengawasan kinerja serta evaluasi kinerja yang akuntabel	60%	60%	65%	75%	80%	85%	85%	85%				Inspektorat
1	20	xx	20	2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Kualitas capaian kinerja pemerintahan	67%	67%	75%	84%	92%	97%	97%	97%				Inspektorat
				* Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Implementasi PKPT dan SOP dalam pengawasan	50%	50%	80%	70%	80%	90%	90%	90%				Inspektorat
JUMLAH INSPEKTORAT						4.504.581.326	4.752.333.299	5.001.830.797	5.244.419.590	5.504.018.360	25.007.183.371						Inspektorat
Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																	
Urusan Wajib																	
1	21			KEPEGAWAIAN													
1	21	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi, indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan pegawai												BKD
1	21	xx	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur												BKD
1	21	xx	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur												BKD
1	21	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur												BKD
1	21	xx	17	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Kesejahteraan Pegawai												BKD

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	21	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Capaian Laporan Keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah												BKD		
1	21	xx	26	Program Penataan Perundang-undangan	Produk hukum daerah dan penegakannya												BKD		
JUMLAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							6.238.170.238		6.581.269.601		6.926.786.256		7.262.735.389		7.622.240.791		34.631.202.275	BKD	
Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA																			
Urusan Wajib Pelayanan Umum																			
1	22	xx	01	Program Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi, indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan pegawai		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			BPMPD	
1	22	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur													BPMPD	
1	22	xx	05	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur													BPMPD	
1	22	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah													BPMPD	
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															BPMPD
1	22	xx	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	LPM Aktif													BPMPD	
1	22	xx	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan													BPMPD	
1	22	xx	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Kesejahteraan Masyarakat Desa, Jumlah Masyarakat berpartisipasi													BPMPD	
1	22	xx	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat desa													BPMPD	
1	22	xx	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan														BPMPD	
PEMERINTAHAN UMUM																		BPMPD	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	20	xx	29	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)													BMPMD		
				KELUARGA BERENCANA															BMPMD	
1	12	xx	26	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Angka Keluarga Sejahtera														BMPMD	
																			BMPMD	
JUMLAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA							5.200.636.424		5.486.671.428		5.774.721.678		6.054.795.679		6.354.508.065		28.871.333.274		BMPMD	
Nama SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH																				
Urusan Wajib																				
Pelayanan Umum																			Dispenda	
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	76%	85%	85%		85%		85%		85%		85%			Dispenda	
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	50%	80%	80%		80%		85%		85%		85%			Dispenda	
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	40%	75%	75%		75%		75%		75%		75%			Dispenda	
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		80%	80%		80%		80%		80%		80%			Dispenda	
1				Pemerintahan Umum															Dispenda	
1	20	xx	17	5. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.048.669.500	31.312.363.750	32.550.000.000		34.117.500.000		35.886.375.000		37.680.693.750		171.606.932.500			Dispenda	
1	20	xx	18	6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten / Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	750.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		4.550.000.000			Dispenda	
JUMLAH DINAS PENDAPATAN DAERAH							3.721.110.577		3.925.771.659		4.131.874.671		4.332.270.593		4.546.717.987		20.657.745.488			Dispenda
Nama SKPD : KANTOR KORPRI																				
Urusan Wajib																				Ktr. Korpri
Pelayanan Umum																				Ktr. Korpri

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai												Ktr. Korpri		
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Ktr. Korpri		
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												Ktr. Korpri		
1	18			Pemuda dan Olahraga													Ktr. Korpri		
1	18	xx	20	* Program Pembinaan dan Permasalahan Olahraga dan Seni	Prestasi Olahraga		58 Org		58 Org		58 Org		58 Org		58 Org	65 org	Ktr. Korpri		
				* Program Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Kualitas kehidupan dan kerukunan beragama												Ktr. Korpri		
JUMLAH KANTOR KORPRI																	Ktr. Korpri		
Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN TERPADU																			
Urusan Wajib																			
Pelayanan Umum																	KPT		
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPT		
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPT		
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPT		
1	20			Pemerintahan Umum													KPT		
1	20	xx	23	11. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pengunjung website pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPT		
1	20	xx	26	15. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk hukum daerah dan penagakannya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	KPT		
JUMLAH KANTOR PELAYANAN TERPADU							730.070.051	770.223.904	810.660.659	849.977.701	892.051.597	4.052.983.912	KPT						

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
Nama SKPD : KECAMATAN AMUNTAI TENGAH														KEC. AMT TENGAH			
				Urusan Wajib Pelayanan Umum													
X	X	01	01	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor													KEC. AMT TENGAH
X	X																KEC. AMT TENGAH
X	X	01	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													KEC. AMT TENGAH
X	X																KEC. AMT TENGAH
X	X	01	26	3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga													KEC. AMT TENGAH
X	X																KEC. AMT TENGAH
				4. Program PATEN Kecamatan													KEC. AMT TENGAH
				5. Program Pelayanan Raskin Kecamatan													KEC. AMT TENGAH
JUMLAH KECAMATAN AMUNTAI TENGAH					788.321.583	831.679.270	875.342.431	917.796.539	963.227.468					KEC. AMT TENGAH			
Nama SKPD : KECAMATAN AMUNTAI UTARA														KEC. AMT. UTARA			
				Urusan Wajib Pelayanan Umum													
X	X	1	1	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor													KEC. AMT. UTARA
X	X																KEC. AMT. UTARA
X	X	1	2	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													KEC. AMT. UTARA
X	X																KEC. AMT. UTARA
X	X	0	5	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													KEC. AMT. UTARA
X	X																KEC. AMT. UTARA
X	X	1	26	4. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga													KEC. AMT. UTARA
X	X																KEC. AMT. UTARA
				5. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu													KEC. AMT. UTARA
JUMLAH KECAMATAN AMUNTAI UTARA					324.876.686	342.744.904	360.739.011	378.234.853	396.957.479					KEC. AMT. UTARA			
Nama SKPD : KECAMATAN AMUNTAI SELATAN														KEC. AMT. SELATAN			
				Urusan Wajib Pelayanan Umum													
X	X	1	1	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor													KEC. AMT. SELATAN
X	X																KEC. AMT. SELATAN

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
X X	X X	1	2	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														KEC. AMT. SELATAN	
X X	X X	1	26	3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga														KEC. AMT. SELATAN	
				4. Program PATEN Kecamatan														KEC. AMT. SELATAN	
				5. Program Pelayanan Raskin Kecamatan														KEC. AMT. SELATAN	
JUMLAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN							333.917.184	352.282.630	370.777.468	388.760.175	408.003.803							KEC. AMT. SELATAN	
Nama SKPD : KECAMATAN BANJANG																		KEC. BANJANG	
Urusan Wajib Pelayanan Umum																			
X X	X X	01	01	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor														KEC. BANJANG	
X X	X X	01	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														KEC. BANJANG	
X X	X X	20	15	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur														KEC. BANJANG	
X X	X X	01	26	3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga														KEC. BANJANG	
				4. Program PATEN Kecamatan														KEC. BANJANG	
				5. Program Pelayanan Raskin Kecamatan														KEC. BANJANG	
JUMLAH KECAMATAN BANJANG							371.212.094	391.628.759	412.189.269	432.180.448	453.573.381							KEC. BANJANG	
Nama SKPD : KECAMATAN SUNGAI PANDAN																		KEC. SUNGAI PANDAN	
Urusan Wajib Pelayanan Umum																			
X X	X X	1	1	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor														KEC. SUNGAI PANDAN	
X X	X X	1	2	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														KEC. SUNGAI PANDAN	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
X	X	01	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													KEC. PAMING GIR		
X	X	01	26	3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga													KEC. PAMING GIR		
				4. Program PATEN Kecamatan													KEC. PAMING GIR		
				5. Program Pelayanan Raskin Kecamatan													KEC. PAMING GIR		
				6. Program administrasi kependudukan													KEC. PAMING GIR		
				7. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa													KEC. PAMING GIR		
JUMLAH KECAMATAN PAMINGGIR							401.186.379	423.251.630	445.472.341	467.077.749	490.198.098						KEC. PAMING GIR		
Nama SKPD : KECAMATAN SUNGAI TABUKAN																	KEC. TABUKAN		
				Urusan Wajib Pelayanan Umum															
X	X	01	01	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor													KEC. TABUKAN		
X	X	01	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													KEC. TABUKAN		
X	X	01	26	3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga													KEC. TABUKAN		
			15	4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan													KEC. TABUKAN		
			17	5. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa													KEC. TABUKAN		
				6. Program Penataan Administrasi Kependudukan													KEC. TABUKAN		
				7. Program PATEN													KEC.		

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
																	TABUKAN
																	KEC. TABUKAN
JUMLAH KECAMATAN SUNGAI TABUKAN					345.768.437		364.785.701		383.936.950		402.557.892		422.484.508				KEC. TABUKAN
Nama SKPD : KECAMATAN HAURGADING																	KEC. HAUR GADING
Urusan Wajib Pelayanan Umum																	
X	X	01	01	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor													KEC. HAUR GADING
X	X	01	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													KEC. HAUR GADING
				3. Program Peningkatan sumber daya aparatur													KEC. HAUR GADING
X	X	01	26	4. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga													KEC. HAUR GADING
				5. Program PATEN Kecamatan													KEC. HAUR GADING
				6. Program Pelayanan Raskin Kecamatan													KEC. HAUR GADING
JUMLAH KECAMATAN HAURGADING					343.740.293		362.646.009		381.684.924		400.196.643		420.006.377				KEC. HAUR GADING
Nama SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUH PPKKP																	
Urusan Wajib Pelayanan Umum																	
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai												BP4 KKP
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												BP4 KKP
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												BP4 KKP

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah													BP4 KKP	
				Urusan Pilihan														BP4 KKP	
2	01			Pertanian														BP4 KKP	
2	01	xx	15	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP													BP4 KKP	
2	01	xx	16	2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan daerah													BP4 KKP	
2	01	xx	17	6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan	Produktivitas Produk Pertanian /Perkebunan													BP4 KKP	
2	01	xx	18	12. Program peningkatan pemasaran hasil pertanian /perkebunan	Pangsa pasar produk pertanian /perkebunan													BP4 KKP	
2	01	xx	20	14. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kapasitas penyuluh (stratanya)													BP4 KKP	
				* Program pengembangan data/informasi														BP4 KKP	
JUMLAH BADAN PELAKSANA PENYULUH PPKKP							6.326.414.531	6.674.367.330	7.024.771.615	7.365.473.038	7.730.063.954	35.121.090.468						BP4 KKP	
Nama SKPD : DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																			
				Urusan Wajib															
				Pelayanan Umum															
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diperta TPH	
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diperta TPH	
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diperta TPH	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diperta TPH			
2				Urusan Pilihan												Diperta TPH			
2	1			Pertanian												Diperta TPH			
2	01	xx	15	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP	108,4	107,85	100	100	100	100	100	100	100	100	Diperta TPH			
2	01	xx	16	2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan daerah	56.740 Ton	65.504 Ton	66.583 Ton	67.679 Ton	68.793 Ton	69.925 Ton	69.925 Ton	69.925 Ton	69.925 Ton	69.925 Ton	Diperta TPH			
2	01	xx	17	3. Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi pertanian/perkebunan	Pangsa pasar komoditas pertanian/perkebunan	10%	15%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Diperta TPH			
2	01	xx	18	4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Produk Pertanian /Perkebunan	53,53 Ku/Ha	59,80 Ku/Ha	59,85 Ku/Ha	59,90 Ku/Ha	59,96 Ku/Ha	60,00 Ku/Ha	60,00 Ku/Ha	60,00 Ku/Ha	60,00 Ku/Ha	60,00 Ku/Ha	Diperta TPH			
2	01	xx	19	5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Pertanian / Perkebunan	153.313 Ton	168.538 Ton	171.066 Ton	173.632 Ton	176.236 Ton	178.880 Ton	178.880 Ton	178.880 Ton	178.880 Ton	178.880 Ton	Diperta TPH			
2	01	xx	16	6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kemandirian Pangan	1.097 Ton	1.225 Ton	1.377 Ton	1.378 Ton	1.529 Ton	1.530 Ton	1.530 Ton	1.530 Ton	1.530 Ton	1.530 Ton	Diperta TPH			
JUMLAH DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							15.518.241.953	16.371.745.261	17.231.261.887	18.066.978.088	18.961.293.504	86.149.520.693			Diperta TPH				
Nama SKPD : DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																			
				Urusan Wajib												Dishutbun ESDM			
				Pelayanan Umum												Dishutbun ESDM			
x	xx	xx	01	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu layanan administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Pegawai	60%	60%	65%	65%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	Dishutbun ESDM			
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	60%	60%	65%	70%	75%	75%	85%	85%	85%	85%	Dishutbun ESDM			

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	75%	75%	75%	80%	80%	85%	90%			Dishutbun ESDM				
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%			Dishutbun ESDM				
2				Urusan Pilihan											Dishutbun ESDM				
2	01			Pertanian											Dishutbun ESDM				
2	01	xx	15	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP	0		8 org			8 org	18 org			Dishutbun ESDM				
2	01	xx	17	5. Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi pertanian/perkebunan	Pangsa pasar komoditas pertanian/perkebunan	1	1	1	1	1	1	1			Dishutbun ESDM				
2	01	xx	18	6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Produk Pertanian /Perkebunan										Dishutbun ESDM				
2	01	xx	19	7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Pertanian / Perkebunan										Dishutbun ESDM				
					- Produksi sawit (ton)		5,2	10,5	10,5	10,53	13	13			Dishutbun ESDM				
					- Produksi karet (ton)	176,68	195	199	203	208	213	218			Dishutbun ESDM				
2	02			Kehutanan											Dishutbun ESDM				
2	02	xx	15	1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Luasan pengembangan dan pengelolaan hutan	20 ha	25 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	65 ha			Dishutbun ESDM				
2	02	xx	17	* Program Perlindungan dan konservasi sumber daya Hutan	a. Kualitas Ekosistem Rawa	3,37%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	6,19%			Dishutbun ESDM				
					b. Berkurangnya lahan kritis	680 ha	250 ha	250 ha	250 ha	250 ha	250 ha	1.250 ha			Dishutbun ESDM				
2	02	xx	19	* Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Ketertiban ijin industri	0	2	2	2	2	2	10			Dishutbun ESDM				
2	02	xx	16	* Program Rehabilitasi hutan	Berkurangnya lahan kritis	20 ha	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	25 ha			Dishutbun ESDM				

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
x	xx	xx	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur													Diskannak	
x	xx	xx	05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur													Diskannak	
x	xx	xx	06	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah													Diskannak	
				Urusan Pilihan														Diskannak	
2	01			Pertanian														Diskannak	
2	01	xx	15	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP													Diskannak	
2	01	xx	16	2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan daerah	40,8 Kg/kapita	40,8 Kg/kapita	41 Kg/kapita	41 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	41,5 Kg/kapita	Diskannak	
				3. Program pengembangan sistem penyuluhan pertanian	Produktivitas hasil pertanian													Diskannak	
				4. Program Pengembangan Kawasan Peternakan	Produksi Hasil Peternakan			6 kecamatan 8 desa	7 kecamatan 13 desa	8 kecamatan 17 desa	9 kecamatan 24 desa	9 kecamatan 24 desa	9 kecamatan 24 desa	9 kecamatan 24 desa	9 kecamatan 24 desa	9 kecamatan 24 desa	9 kecamatan 24 desa	Diskannak	
2	01	xx	22	8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil-hasil peternakan													Diskannak	
					- Daging ternak besar (kg)	556.990	562.237	566.945	573.696	579.527	585.162	585.162	585.162	585.162	585.162	585.162	585.162	Diskannak	
					- Daging ternak kecil (kg)	15.602	15.903	16.219	16.548	16.878	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	Diskannak	
					- Daging Unggas (kg)	2.195.375	2.292.162	2.423.157	2.562.341	2.710.286	2.867.607	2.867.607	2.867.607	2.867.607	2.867.607	2.867.607	2.867.607	Diskannak	
					- Telur (kg)	1.213.784	1.217.428	1.223.150	1.228.652	1.232.956	1.236.188	1.236.188	1.236.188	1.236.188	1.236.188	1.236.188	1.236.188	Diskannak	
					- DOD (ekor)	2.350.453	2.467.976	2.545.791	2.627.594	2.714.675	2.801.735	2.801.735	2.801.735	2.801.735	2.801.735	2.801.735	2.801.735	Diskannak	
2	01	xx	24	9. Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan	Produktivitas Produk Peternakan													Diskannak	
					- Ternak Besar		192	192	150	166	155	155	155	155	155	155	155	Diskannak	
					- Ternak Kecil		32	32	19	17	14	14	14	14	14	14	14	Diskannak	
					- Unggas		25600	25600	22694	27517	29614	29614	29614	29614	29614	29614	29614	Diskannak	
				10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kemandirian Pangan													Diskannak	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	01	xx	21	11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kesehatan Ternak (Persentase Pengendalian Kematian)													Diskannak	
					- Ternak Besar		1,5%		1,50%		1,50%		1,50%		1,50%		1,50%	Diskannak	
					- Ternak Kecil		3,80%		3,80%		3,80%		3,80%		3,80%		3,80%	Diskannak	
					- Unggas		9,50%		9,50%		9,50%		9,50%		9,50%		9,50%	Diskannak	
2	01	xx	23	13. Program peningkatan dan pemasaran hasil peternakan	Pangsa pasar produk hasil peternakan													Diskannak	
2	01	xx	20	14. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kapasitas penyuluh (stratanya)			5 orang		2 orang		2 orang		2 orang		11 orang		Diskannak	
2	05			Perikanan														Diskannak	
2	05	xx	22	1. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Produktivitas hasil perikanan													Diskannak	
2	05	xx	23	2. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan	Diversifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (produk)	2	4	4	4	4	4	4	4	4	6			Diskannak	
				3. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya perairan umum	Kawasan reservat (konservasi perikanan)(kawasan)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	8			Diskannak	
2	05	xx	21	4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	12.048	12.054	12.060	12.066	12.072	12.078	12.078	12.078	12.078	12.078			Diskannak	
2	05	xx	20	5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	10.628	11.159	11.717	12.303	12.918	13.564	13.564	13.564	13.564	13.564			Diskannak	
				6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Produksi Perikanan (ton)	22.676	23.213	23.771	24.369	24.990	25.642	25.642	25.642	25.642	25.641,96			Diskannak	
2	05	xx	17	7. Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya perikanan	Kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian sumberdaya perikanan	20%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	25%			Diskannak	
				8. Program pembinaan kelompok budidaya perikanan	Kemandirian Kelompok (kelompok)	10		1	1	1	1	1	1	1	14			Diskannak	

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab						
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp				
2	05	xx	23	9. Program optimalisasi dan pemasaran produksi perikanan	Pangsa pasar produk perikanan	50%	5%		5%		5%		5%		5%		75%		Diskannak	
				10. Program pengembangan usaha-usaha kecil menengah perikanan	Pemberdayaan kelompok usaha perikanan, Jumlah kelompok usahanya														Diskannak	
				- POKDAKAN		103	3		3		3		3		3		9		Diskannak	
				- KUB Tangkap		17	3		3		3		3		3		9		Diskannak	
				- POKLAHSAR		36	3		3		3		3		3		9		Diskannak	
JUMLAH DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN								11.649.783.970		12.290.522.088		12.935.774.498		13.563.159.561		14.234.535.959		64.673.776.077		Diskannak

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Suatu indikator kinerja pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun, mencakup pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Penetapan indikator untuk ketiga fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.1

Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2011)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,45	69,54	69,62	70,30	70,98	71,66	72,33	72,33
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi								
1.	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) (%)	6,39	6,40	6,50	6,59	6,70	6,73	6,80	6,80
2.	PDRB per kapita (berlaku dlm juta rupiah)	8.387.322	9.226.054	10.148.660	11.163.526	12.279.878	13.507.866	14.858.653	14.858.653
3.	PDRB per kapita (konstan dlm juta Rupiah)	4.342.079	4.515.762	4.696.393	4.884.248	5.079.618	5.282.803	5.420.000	5.420.000
4.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (%)	7,31	6,79	6,26	6,07	5,88	5,69	5,50	5,50
B	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Angka melek huruf (%)	96,02	96,10	96,19	96,26	96,34	96,42	96,50	96,50
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,48	7,65	7,82	7,99	8,16	8,33	8,50	8,50
3.	Angka partisipasi kasar (%)								
	a. SD/MI	102,84	100	100	100	100	100	100	100
	b. SMP/MTs	83,81	86,98	90,15	93,32	96,49	99,66	100	100
	c. SMA/SMK/MA	70,30	76	81,7	87,4	93,1	98,8	100	100
4.	Angka Partisipasi Murni (%):								
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,85	94,04	95,23	96,42	97,61	98,80	100	100
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,62	71,35	74,09	76,82	79,55	82,28	85,01	85,01
	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	46,81	49,6	52,39	55,18	57,97	60,76	63,55	63,55
5.	Angka usia harapan hidup (tahun)	63,47	63,86	64,26	64,45	64,63	64,82	65,00	65,00
6.	Persentase balita gizi buruk (%)	5,68	5,57	5,46	5,35	5,24	5,13	5,00	5,00
C	Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1	Jumlah gedung (buah)	11	11	11	11	11	11	11	11

9.2. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek layanan urusan umum penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun, mencakup pada layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Penetapan indikator untuk kedua fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.2

Tabel 9.2
Tabel Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2011)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
	Pendidikan								
1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	96,02	96,21	96,40	96,59	96,78	96,97	97,20	97,20
2.	Fasilitas Pendidikan:								
	a. Taman Kanak – kanak/RA	164	164	164	164	164	164	164	164
	b. Sekolah Dasar/MI	268	268	268	268	268	268	268	268
	c. SMP/MTs	61	61	61	61	61	61	61	61
	d. SMA/SMK/MA	27	27	27	29	30	31	32	32
	e. Perguruan Tinggi	4	4	4	4	4	4	5	5
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	71,11	72,59	74,07	75,55	77,04	78,52	80,00	80,00
4.	Angka Putus Sekolah (%):								
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	10,73	10,70	10,67	10,64	10,61	10,58	10,55	10,55
	c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	35,80	35,77	35,74	35,71	35,68	35,65	35,62	35,62
5.	Angka Kelulusan (%):								
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,5	99	100	100	100	100	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	86,9	93,62	93,72	94,18	94,64	95,00	99,98	99,98
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	91,1	99,92	99,93	99,95	99,97	99,98	100	100
6.	Angka Partisipasi Sekolah (%):								
7.	a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	98,91	99,09	99,27	99,46	99,64	99,82	100	100
	b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	89,27	90,36	91,45	92,54	93,63	94,72	95,81	95,81
	c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	62,94	66,64	70,34	74,04	77,74	81,44	85,14	85,14
	Kesehatan								
1.	Menurunnya Angka Kematian Bayi	32	22	22	22	21	21	20	20
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	80,8	89,91	81	82	83	84	85	85

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2011)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	85,8	86,47	87	89	90	93	95	95
4.	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	97,7	85,4	95	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	51,11	53,99	55	60	65	70	70	70
7.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	73,5	43,63	100	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Kunjungan bayi (%)	83,46	85,76	87	87	90	93	95	95
10	Cakupan Pelayanan puskesmas (%)	78,43	84,73	86	87	88	89	90	90
11	Cakupan Kunjungan Balita (%)	49,60	45,87	70	80	90	93	95	95
Pekerjaan Umum									
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,44	0,37	0,43	0,51	0,61	0,71	0,83	0,83
2.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	58,66	58,66	60	65	68	70	75	75
3.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	347,626	347,624	348,000	349,844	366,844	384,539	386,539	386,539
4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (km)	122,366	169,871	200,453	233,862	250,567	267,271	283,976	283,976
Perumahan									
1.	Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%)	26,78	30	35	40	55	65	70	70
Perencanaan Pembangunan									
1.	Tersedianya Perda RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Perda RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya PerBup RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Lingkungan Hidup									
1.	Persentase penanganan sampah (%)	92,55	92,55	93,00	94,00	94,00	96,00	96,00	96,00
Kependudukan dan catatan sipil									
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,89	1,88	1,87	1,86	1,85	1,84	1,83	1,83
2.	Kepemilikan KTP (%)	100	69,96	60	100	100	100	100	100
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	100	14,04	19,04	24,04	29,04	34,04	39,04	39,04

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2011)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,56	57,61	57,66	57,71	57,76	57,81	57,86	57,86
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1.	Cakupan peserta KB aktif (%)	76,24	76,84	77,44	78,04	78,64	79,24	79,84	79,84
2.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	38,46	37,66	36,86	36,06	35,26	34,46	33,66	33,66
	Ketenagakerjaan								
1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,28	5,23	5,18	5,13	5,08	5,03	4,98	4,98
2.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	38,46	37,66	36,86	36,06	35,26	34,46	33,66	33,66
	Koperasi dan UKM								
1.	Persentase koperasi aktif (%)	74,38	79,67	80,00	80,31	81,40	81,68	82,71	82,71
	Otda								
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	59	65	70	75	80	85	90	90
2.	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	40	42	44	46	48	49	50	50
3.	Kemiskinan (%)	7,31	6,79	6,26	6,07	5,88	5,69	5,5	5,5
4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80,61	80,61	80,75	81	82	82,5	83	83
	Pemberdayaan masyarakat dan desa								
1.	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Statistik								
1.	Buku "Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
	Komunikasi dan informatika								
1.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah surat kabar lokal	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pertanian								
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	30,59	33	33	32	32	32	32	32
	Industri Pengolahan								
1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	8,95	10,03	10,49	10,90	11,27	11,60	11,91	11,91
	Perikanan								
1.	Produksi Perikanan (Ton)	18.634,9	18.634,9	29.978,21	38.958,32	39.310,82	39.822,62	39.960,82	39.960,82

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2011)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
	Perdagangan, Hotel & Restoran								
1.	Kontribusi sector Perdagangan, Hotel & Restoran terhadap PDRB (%)	16,40	19,72	19,76	19,81	19,85	19,88	19,92	19,92
	Jasa-Jasa								
1.	Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB (%)	19,45	19,55	19,64	19,72	19,79	19,86	19,92	19,92
	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
	Komunikasi dan informatika								
1.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah surat kabar lokal	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pertanian								
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	30,59	33	33	32	32	32	32	32
	Industri Pengolahan								
1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	8,95	10,03	10,49	10,90	11,27	11,60	11,91	11,91
	Perikanan								
1.	Produksi Perikanan (Ton)	18,634,9	18,634,9	29,978,21	38,958,32	39,310,82	39,822,62	39,960,82	39,960,82
	Perdagangan, Hotel & Restoran								
1.	Kontribusi sector Perdagangan, Hotel & Restoran terhadap PDRB (%)	16,40	19,72	19,76	19,81	19,85	19,88	19,92	19,92
	Jasa-Jasa								
1.	Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB (%)	19,45	19,55	19,64	19,72	19,79	19,86	19,92	19,92

9.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun, mencakup pada Kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Penetapan indikator untuk keempat fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.3.

Tabel 9.3
Tabel Penetapan Indikator Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2011)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
	Fokus Kemampuan ekonomi daerah								
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita/tahun (rupiah)	2.995.000	2.996.747	2.999.200	3.001.653	3.004.106	3.006.559	3.009.012	3.009.012
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita/tahun (rupiah)	787.000	817.314	848.380	879.446	910.512	941.578	972.644	972.644
	Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur								
1.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (%)	40,07	45	50	55	60	65	70	70
2.	Persentase Penduduk berakses air bersih perpipaan (%)	24,95	35	40	50	55	65	70	70
	Fokus Sumberdaya Manusia								
1.	Rasio lulusan S1,S2 dan S3 (%)	3,74	3,79	3,84	3,89	3,94	3,99	4,04	4,04
2.	Rasio ketergantungan	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46

BAB X

PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2018 (sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017 mendatang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, maka dalam masa transisi tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sesuai dengan jadwal dan agenda yang ada dengan berpedoman pada RPJMD ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum seluruhnya rampung sampai akhir tahun 2017 dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2018.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2017 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum 2014 tetap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 yang sudah disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan telah dilantik pada tanggal 9 Oktober 2012.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 selanjutnya juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. SKPD, masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- b. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- c. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2013-2017 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dan dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat.

Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

10.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

- a. Pada setiap akhir tahun anggaran, seluruh SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
- b. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki makna perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

